



Laporan

KINERJA

2025

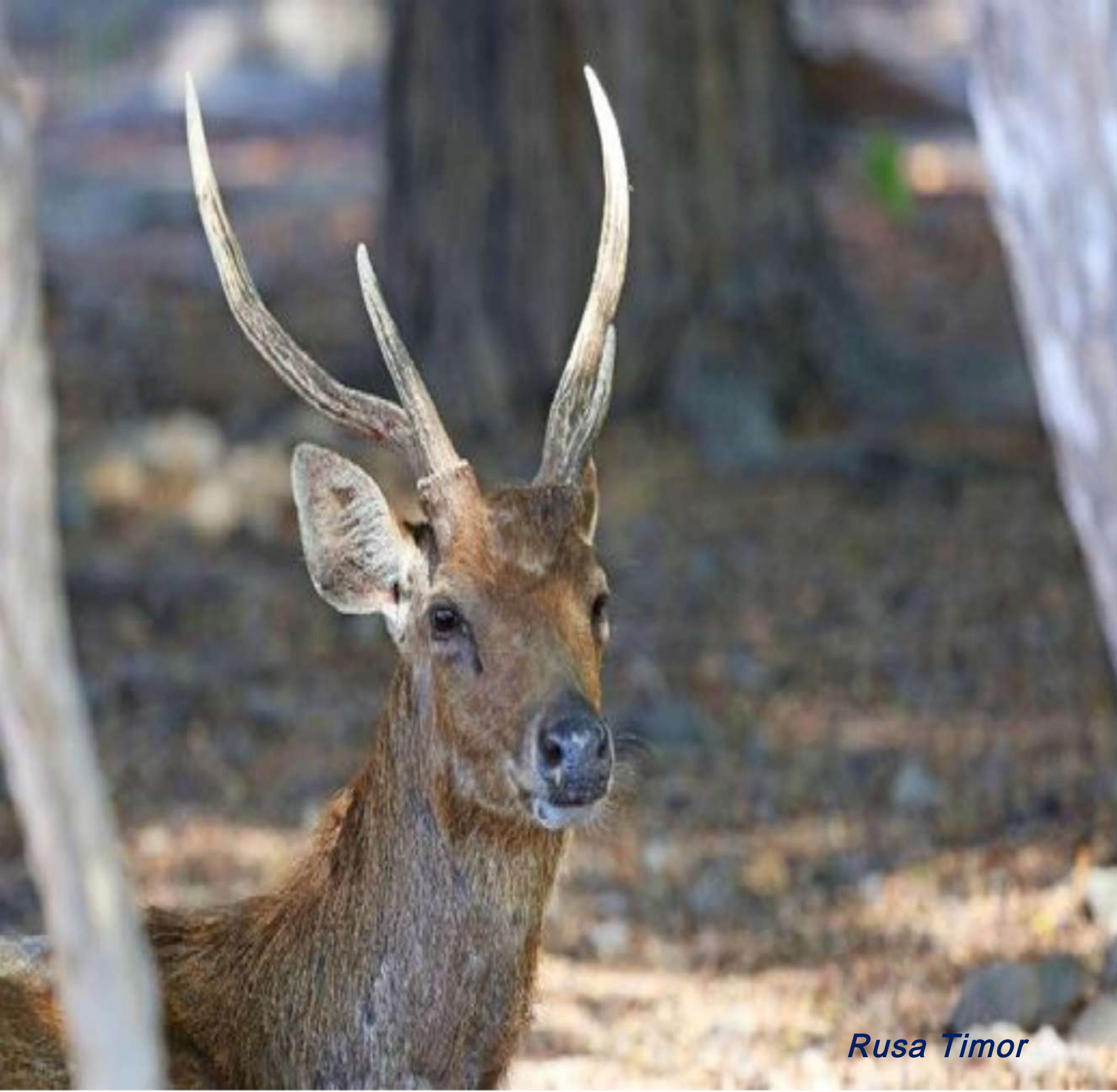
Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

Laporan
KINERJA
2025



Rusa Timor

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja P2HB tahun 2025 disusun sebagai bentuk Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka menunaikan tugas Melaksanakan Pengembangan Hutan Berkelanjutan, sesuai Permenhut No 1 Tahun 2024.



P2HB memiliki nilai kinerja sebesar 100% angka ini merupakan capaian dari satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja P2HB Tahun 2025, dan nilai efisiensi sebesar 1 dengan realisasi anggaran 99.98%.

Kinerja P2HB tahun 2025 mengacu pada IKP Setjen dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu P2HB melaksanakan kegiatan Pengembangan Hutan Berkelanjutan dengan 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target berupa jumlah Rekomendasi, Unit dan Layanan. IKK yang telah ditetapkan adalah Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati.

Capaian kinerja P2HB dibentuk dari berbagai komponen yang saling terintegrasi sebagai upaya memperkuat sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pengelolaan hutan. Dengan demikian, P2HB tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan teknis, tetapi juga sebagai penggerak penerapan kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi kehutanan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengembangan hutan cadangan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi hasil hutan seperti kayu log, getah pinus, dan bahan baku bioetanol. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kehutanan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan Indonesia 2045.

Untuk mendukung pelaksanaan Program P2HB Tahun Anggaran 2025, dialokasikan pagu anggaran awal sebesar Rp14,72 miliar yang bersumber dari RM (40,40%), PNB (56,92%), dan HLN (2,67%). Seiring dengan penataan anggaran dan kebijakan efisiensi akibat perubahan kelembagaan dan tugas fungsi, pagu efektif P2HB menjadi sebesar Rp8,02 miliar.

A. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2025, P2HB melaksanakan satu Sasaran Kegiatan dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu efektivitas penerapan kebijakan teknis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. IKK tersebut telah tercapai sesuai target melalui pemenuhan rekomendasi, unit, dan layanan yang ditetapkan. Adapun hasil penilaian IKK Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis pada P2HB mencapai 70,45% yang berada pada rentang nilai 70–72%, sehingga setelah dikonversi ke dalam IKP Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029 menghasilkan nilai 1 poin.

Capaian IKK tersebut menjadi dasar penilaian dan mendukung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal, yaitu Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029, dengan nilai capaian sebesar 1 poin.

Sepanjang Tahun 2025, P2HB menghasilkan 8 rekomendasi kebijakan sesuai dengan target yang direncanakan, yang mendukung penguatan kebijakan kehutanan nasional, antara lain pada aspek hilirisasi hasil hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian (HP), serta penguatan laboratorium kehutanan. Rekomendasi tersebut disusun dalam bentuk policy brief dan policy paper sebagai masukan strategis bagi perumusan dan penyempurnaan kebijakan kehutanan. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional dan sektoral kehutanan 2025-2029 untuk mendukung ketahanan pangan, energi, serta hilirisasi produk hasil hutan.

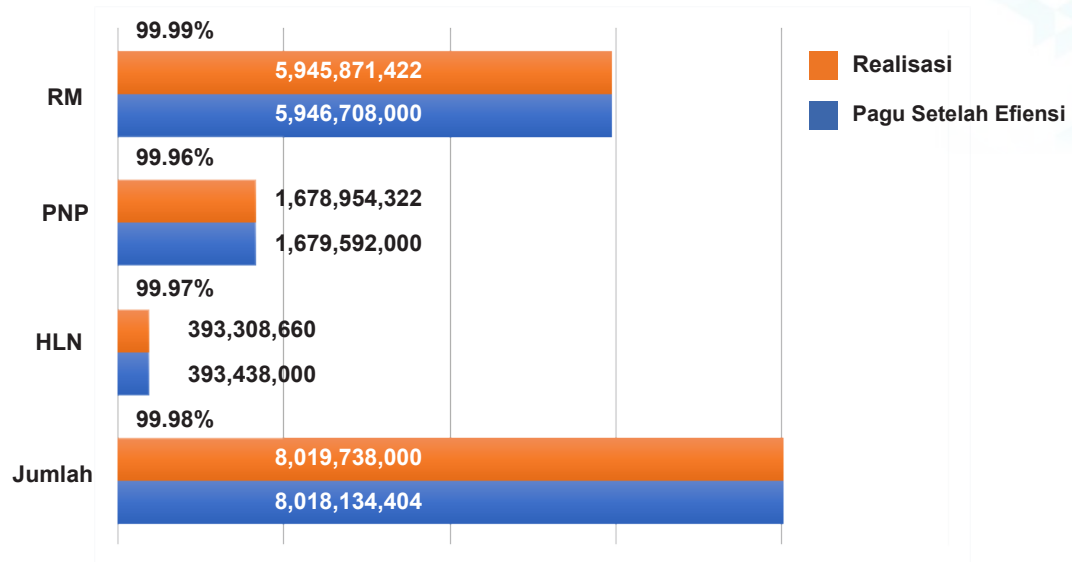
Dalam mendukung pencapaian kinerja, P2HB mengelola 14 unit kawasan hutan dan dapat memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan, yang terdiri atas 9 KHDTK dan 5 Hutan Penelitian; serta 7 layanan laboratorium kehutanan juga telah memenuhi target yang direncanakan, yang mencakup Laboratorium Terpadu dan Laboratorium Lapangan. Layanan tersebut mendukung kegiatan penelitian, pengujian, pengembangan teknologi, serta pelayanan teknis kehutanan.

Laboratorium Terpadu menyelenggarakan jasa pelayanan pengujian terstandarisasi. Sementara itu, salah satu KHDTK khususnya HP Dramaga menyediakan jasa pelayanan pendukung dalam pemanfaatan kawasan dan layanan teknis kehutanan.

Kedua layanan tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024.

Pelaksanaan anggaran P2HB Tahun 2025 setelah kebijakan efisiensi hingga Desember 2025 menunjukkan realisasi sebesar 99,98%, dengan tingkat realisasi per sumber dana yaitu RM 99,99%, PNBP 99,96%, dan HLN 99,97%. Terlampir diagram capaian realisasi anggaran P2HB Tahun 2025 dan capaian 8 rekomendasi kebijakan P2HB tahun 2025. Capaian Realisasi Anggaran P2HB Tahun 2025, disajikan pada gambar berikut.

Capaian Realisasi Anggaran TA 2025



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran P2HB secara keseluruhan adalah Rp8.018.134.404,- (99,98%) dari pagu anggaran efektif sebesar Rp.8.019.738.000,-.

Realisasi sudah optimal dan penggunaan anggaran sudah efisien dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja P2HB Tahun 2025 berada dalam kondisi efektif dan terkendali, didukung oleh penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Renstra P2HB Tahun 2025–2029.

Selain itu, P2HB melaksanakan benchmarking dengan Pusat Pengembangan (Pusbang) di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk memperoleh gambaran capaian indikator pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Benchmarking dilakukan melalui perbandingan capaian indikator pelaksanaan anggaran dan indikator kegiatan antar-Pusbang, serta penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menggunakan Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis. Instrumen tersebut mencakup indikator implementasi kebijakan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing instansi dalam pencapaian target kinerja. Secara keseluruhan, hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kinerja P2HB berada pada tingkat yang setara dan kompetitif dibandingkan pusat pengembangan lainnya, khususnya dalam implementasi kebijakan teknis, pengelolaan KHDTK, serta penyediaan layanan laboratorium.

B. KENDALA & LANGKAH KE DEPAN

Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan P2HB dan telah tercapai sebanyak delapan rekomendasi (8 R). Rekomendasi tersebut mendukung penguatan kebijakan kehutanan nasional (terlampir pada gambar).



» **Kendala**

Dalam pelaksanaan kegiatan P2HB Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain penyesuaian kebijakan akibat perubahan kelembagaan dan tugas serta fungsi, keterbatasan fleksibilitas anggaran pasca kebijakan efisiensi, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya dan sarana pendukung. Kendala tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian pelaksanaan sebagian kegiatan, namun tidak menghambat pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

» **Langkah ke Depan**

Sebagai langkah ke depan, P2HB akan memperkuat perencanaan dan pengendalian kinerja, meningkatkan sinergi antarunit kerja, mengoptimalkan pemanfaatan KHDTK dan HP (Hutan Penelitian), serta layanan laboratorium, dan mendorong peningkatan kualitas serta pemanfaatan rekomendasi kebijakan guna mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.



Kaleidoskop 2025 PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELAJUTAN



Penanaman Pohon di HP Gunung Dahu, 10 Januari 2025

Arahan Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB), 4 Februari 2025



Januari

Februari



Dukung P2HB dalam Pelatihan Pengendalian Kebakaran di Hutan Gambut, 21 April 2025

Open House di LSAI dan Penangkaran Rusa dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan ke-42, 17 Maret 2024



April

Maret



Asian Living Laboratory dalam Sidang ke-12 AFoCO, 13-14 Mei 2025

Open House di LSAI dan Penangkaran Rusa dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543, 31 Mei - 4 Juni 2025



Mei

Juni



Focus Group Discussion TKMH Kehutanan, 1 Agustus 2025

Rakor Pengelolaan Laboratorium dan Rakor Pengelolaan KHDTK lingkup P2HB, 9-10 Juli 2025



Agustus

Juli



Launching TKMH Kehutanan, 19 September 2025

Friends of Asia and Asian Forests (FAAF) Forum 2025, 27 -30 Oktober 2025



September

Oktober



Penanaman Pohon Serentak 2025 di Hutan Penelitian Gunung Dahu, 15 Desember 2025

Sinergi Hebat Setjen Penanaman Kompensasi Jejak Karbon Kemenhut, 13 November 2025



Desember

November

Kata Pengantar



Gun Gun Hidayat, Ph.D

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian Kegiatan Satker Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKj P2HB mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, elaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

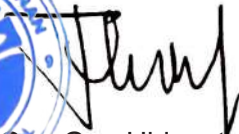
Laporan ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menggambarkan pencapaian kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2025 yang didasarkan pada pencapaian 1 (satu) sasaran program yang diukur dari pencapaian target-target pada 1 (satu) Indikator Kinerja Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Jenderal (Setjen).

Kami berharap laporan ini dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja kegiatan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2025 dengan harapan menjadi bahan peningkatan kinerja masa kerja berikutnya sekaligus memberikan landasan dalam mencapai prestasi-prestasi berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2026
Kepala Pusat




Gun Gun Hidayat, Ph.D
NIP. 197310051998031001



DAFTAR ISI


RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KALEIDOSKOP 2025 P2HB	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Tugas dan Fungsi P2HB.....	4
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Sumber Daya Manusia.....	6
1.6 Isu-isu Strategis	8
II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis P2HB Tahun 2025-2029	13
2.2 Rencana Kerja P2HB Tahun 2025	18
2.3 Perjanjian Kinerja P2HB Tahun 2025.....	20
2.4 Perjalanan Pagu Anggaran P2HB Tahun 2025	23
2.5 Pohon Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	27

III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	31
3.1.1 Sasaran Strategis/Program/Kegiatan P2HB.....	31
A. Capaian Target Kinerja Tahunan (Renja 2025)	33
B. Capaian Target Kinerja Lima Tahunan (Renstra2025-2029)	65
C. Capaian Target Kinerja terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya	66
D. Benchmarking Kinerja	67
E. Upaya dan Kendala	70
F. Outcome	71
G. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
H. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan.....	73
3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	74
3.2.1 Realisasi Anggaran.....	74
3.2.2 Nilai Kinerja Anggaran.....	79
3.3 Capaian Prioritas Nasional	80
3.4 Capaian Program Tematik	82
3.5 Capaian Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan PUG.....	82
3.6 Capaian Kinerja Lainnya	85
IV PENUTUP	90
V LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

1. Kinerja Program P2HB Tahun 2025-2029	13
2. Matriks Kinerja Utama Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025-2029	14
3. Target Kinerja Utama P2HB Tahun 2025-2029.....	15
4. Kegiatan , Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan P2HB Tahun 2025-2029	17
5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja P2HB 2025.....	18
6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan P2HB 2025	21
7. Prognosis Realisasi Anggaran P2HB per Output 2025.....	25
8. Indikator Kinerja dan Anggaran Kegiatan Tahun 2025	26
9. Rincian perhitungan IKK instrumen pengukuran efektivitas penerapan kebijakan teknis P2HB Tahun 2025.....	32
10. Capaian Indikator Kinerja P2HB berdasarkan Komponen Output Kegiatan (KRO) P2HB.....	45
11. Ringkasan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) TA 2025	40
12. Ringkasan Pelaksanaan & Capaian TKMH Kehutanan 2025.....	41
12b. Ringkasan Pelaksanaan & Capaian TKMH Kehutanan 2025.....	43
13. Kegiatan pengelolaan KHDTK-HP P2HB tahun 2025.....	50
14. Ringkasan Struktur dan Kegiatan Layanan Laboratorium P2HB TA 2025.....	53
15. Rekomendasi Strategis Transformasi Laboratorium P2HB.....	59
16. Capaian Indikator Kinerja P2HB berdasarkan Perjajnian Kinerja Tahun 2025	60



17. Capaian Target Kinerja Lima Tahunan (Renstra 2025-2029)	65
18. Benchmarking capaian Kinerja dengan P2SEMH, P2MABHK, dan Pusjakstra	67
19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	72
20. Kemajuan pelaksanaan anggaran tahun 2025	74
21. Kemajuan pelaksanaan anggaran setelah efisiensi tahun 2025.....	75
22. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2025	75
23. Peringkat NKA per Eselon 1 Kementerian Kehutanan.....	79

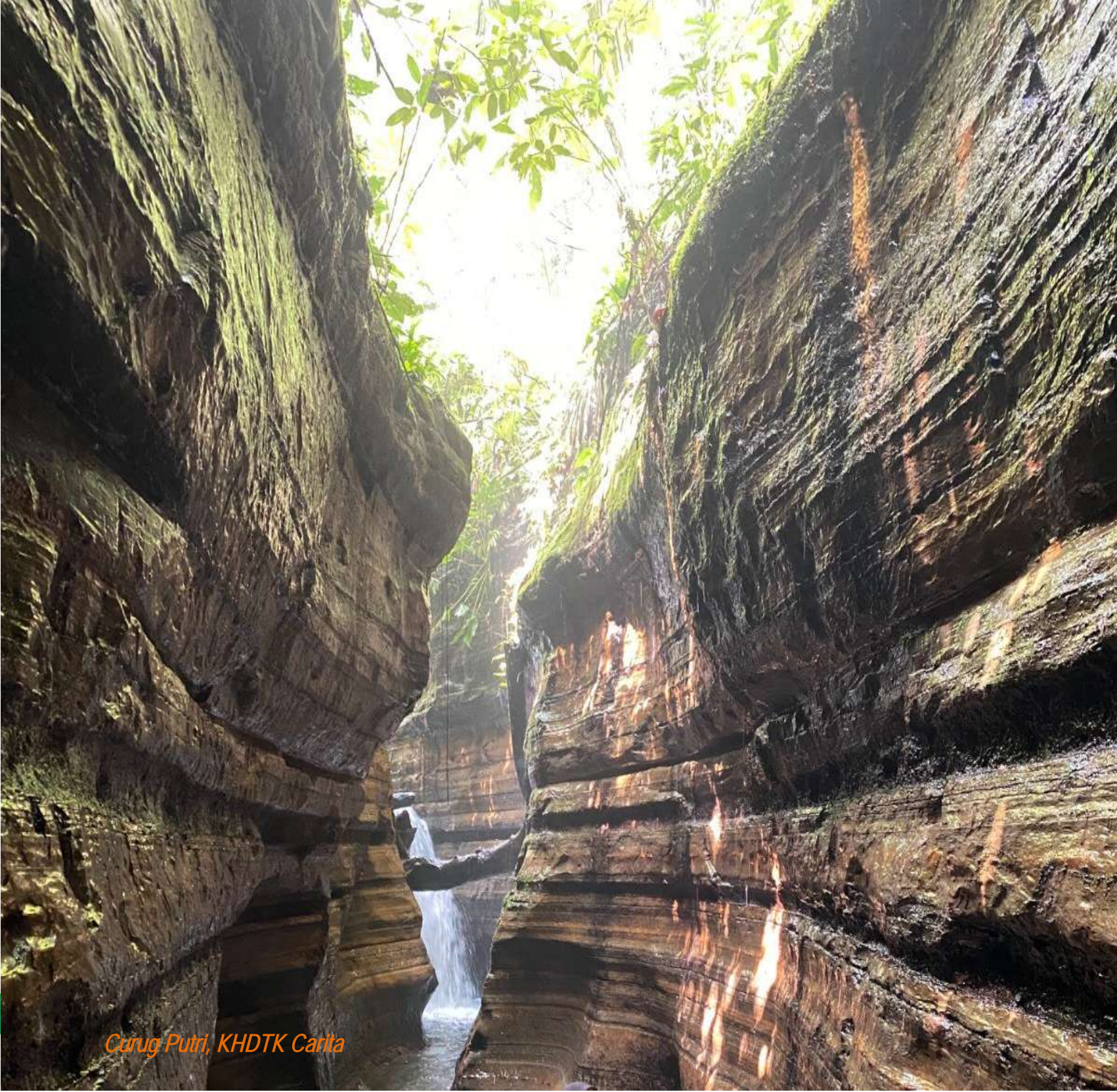
DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	5
2. SDM P2HB	6
3. Pegawai ASN P2HB berdasarkan jabatan	6
4. Pegawai ASN P2HB berdasarkan pendidikan	7
5. Sebaran Pegawai ASN P2HB berdasarkan tingkat golongan.....	7
6. Sebaran Pegawai ASN P2HB berdasarkan jenis Kelamin	7
7. Arsitektur Kinerja P2HB.....	16
8. Penetapan Perjanjian Kinerja P2HB 2025	22
9. Pagu efektif P2HB tahun 2025 berdasarkan sumber dana.....	23
9a. Perjalanan Pagu Anggaran P2HB Tahun 2025.....	24
10. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Output P2HB Tahun 2025.....	27
11. Penilaian Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis Kegiatan P2HB 2025	35
12. Capaian Rekomendasi Kebijakan pada Kegiatan P2HB tahun 2025.....	37
13. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Tata Kelola Getah Pinus	38
14. Proses Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP Tahun 2025.....	39
15. Proses Pelaksanaan Kegiatan TKMH Kehutanan Tahun 2025.....	42
16. Proses Pelaksanaan dan Hasil Pengkajian Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor.....	44
17. Proses pelaksanaan kegiatan Profilling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu pada studi kasus <i>Supply Demand Gaharu</i>	45
18. Proses Pelaksanaan Kegiatan Studi Pangan Hutan 2025.....	47
19. KHDTK dan HP Pusat Pengembangan HUTan Berkelanjutan	48

20. Penerimaan PNBP Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	49
21. Pengelolaan KHDTK-HP P2HB Tahun 2025	52
22. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Kehutanan	54
23. Kegiatan Layanan Laboratorium	55
24. Sertifikat Akreditasi (KAN) Laboratorium Terpadu - P2HB.....	55
25. Data Layanan Uji Laboratorium Terpadu TA 2025.....	56
26. PNBP Laboratorium Terpadu Tahun 2022 - 2025.....	57
27. Kegiatan Pengujian Laboratorium Terpadu.....	57
28. Kegiatan Pelatihan Dasar SMM SNI ISO/IEC 17025:2017.....	58
29. Organisasi Pengguna Fasilitas Penerapan PHB melalui website TKMH P2HB	63
30. Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Kerja P2HB 2025.....	78
31. Pemeliharaan ulat sutera dilakukan oleh para ibu karyawan.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja P2HB 2025.....	93
2. Hasil Kegiatan 3D2N KHDTK-HP Lingkup P2HB.....	97
3. Kegiatan Uji Banding Laboratorium Tahun 2025.....	117
4. Daftar Rekomendasi Kebijakan Kegiatan P2HB	118
5. Daftar Kerjasama TKMH Kehutanan - BRIN	125
6. Daftar Lembaga Mitra P2HB Tahun 2025.....	128
7. Inisiasi kerjasama dengan mitra yang masih dalam proses	132
8. Rincian perhitungan IKK Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis P2HB Tahun 2025	133



Curug Putri, KHDTK Carita

01

PENDAHULUAN



“

Sidang ke-12 Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Indonesia menegaskan komitmennya untuk pengelolaan hutan melalui pengembangan inisiatif Asian Living Laboratory (Living Lab). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Hutan, Gun Gun Hidayat, menyampaikan dalam forum sidang bahwa Living Lab perlu dibangun untuk peningkatan kapasitas, pengukuran dampak perubahan iklim, dan inovasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik di tingkat tapak.



1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan penguatan fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks sektor kehutanan, arah kebijakan nasional diarahkan pada pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional, pengendalian degradasi lingkungan, serta penguatan peran kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim. Kondisi tersebut menuntut tersedianya kebijakan teknis, rekomendasi, dan instrumen pendukung yang kuat, berbasis data, serta adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) memiliki peran penting dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan kehutanan melalui penyediaan rekomendasi kebijakan, pengembangan standar teknis, penyediaan layanan laboratorium, serta pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai laboratorium lapangan. P2HB berfungsi sebagai simpul penghubung antara kegiatan pengkajian teknis, pengembangan inovasi, dan kebutuhan kebijakan yang aplikatif di tingkat nasional maupun daerah.

Laporan Kinerja ini berisikan capaian atas pelaksanaan kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025. Laporan kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, pembenahan manajemen internal, serta perbaikan kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan di masa yang akan datang.



1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan/tindakan korektif bagi kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan.



1.3 TUGAS DAN FUNGSI P2HB

Tugas

P2HB

"Melaksanakan pengembangan hutan berkelanjutan".

Berdasarkan Permenhut
No 1 tahun 2024

Fungsi P2HB

Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan.



Pelaksanaan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan.



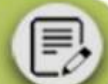
Pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.



Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan KHDTK.

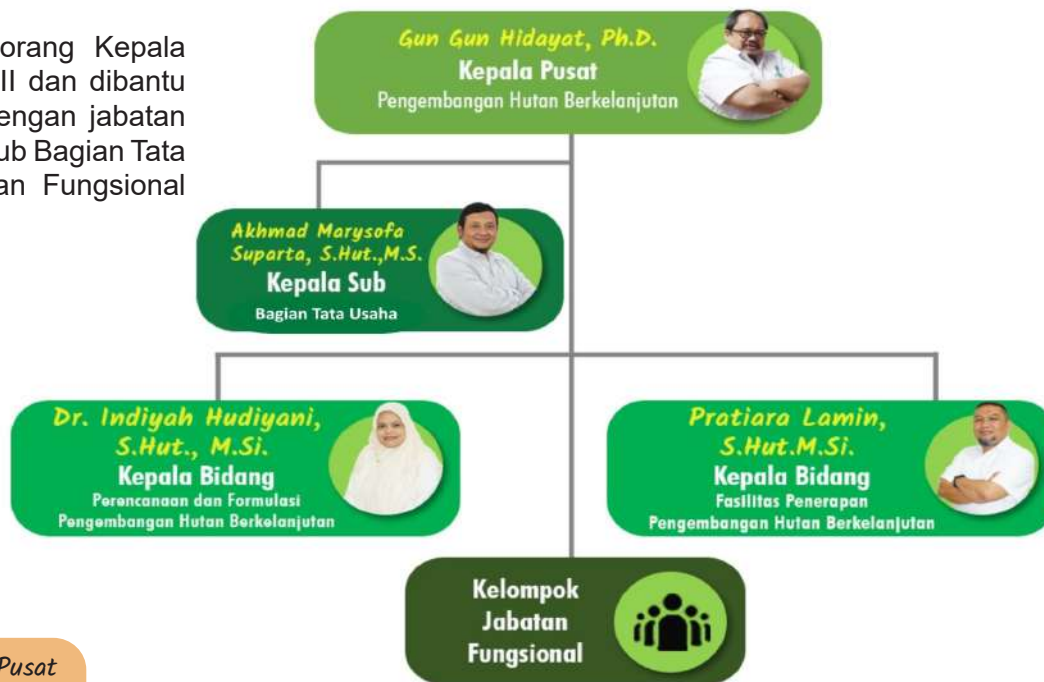


Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.



1.4 STRUKTUR ORGANISASI P2HB

P2HB dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dengan jabatan Eselon II dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang dengan jabatan Eselon III dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

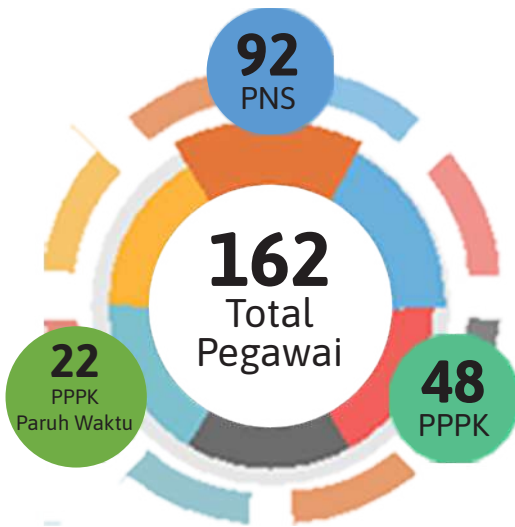


Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (sumber: Permenhut No. 1 Tahun 2024)

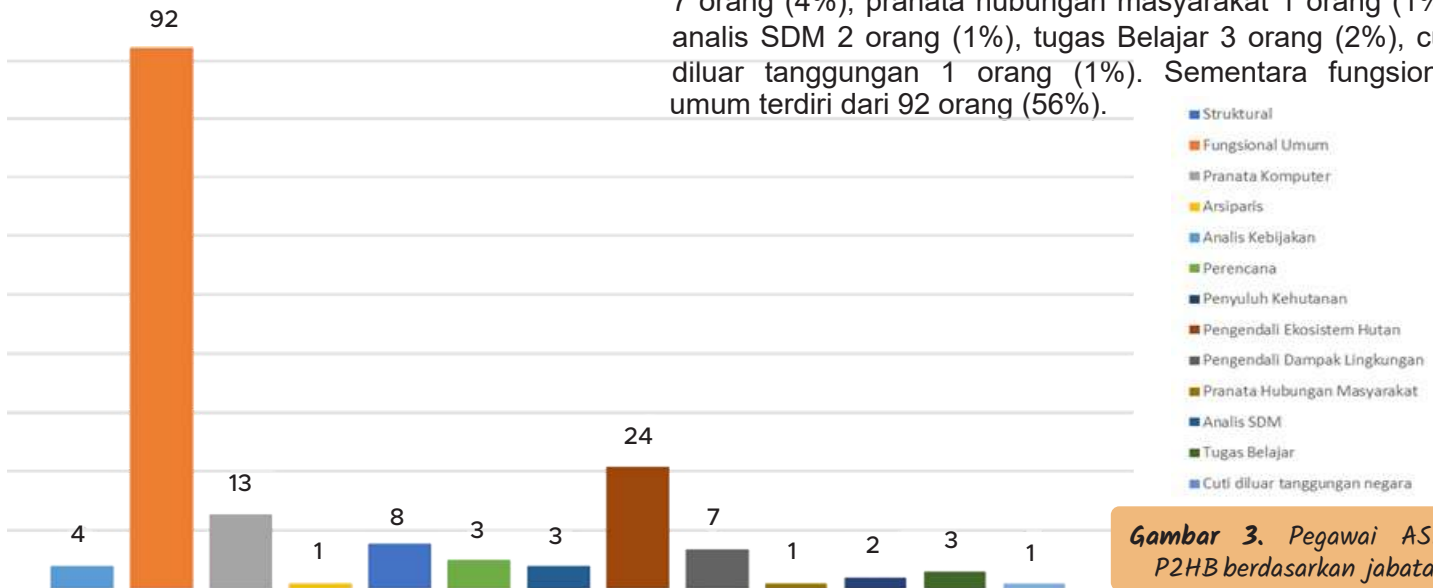
Dua bidang dan satu sub bagian tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan: melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan.
2. Bidang Fasilitas Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan: melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitas penerapan pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
3. Sub Bagian Tata Usaha: melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA



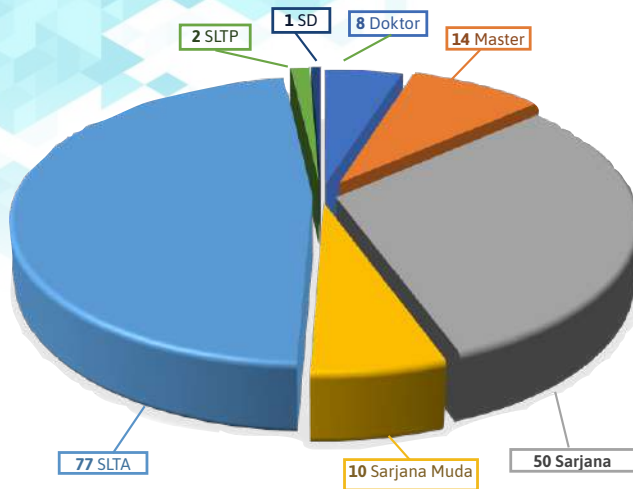
Gambar 2. Komposisi SDM P2HB



Gambar 3. Pegawai ASN P2HB berdasarkan jabatan

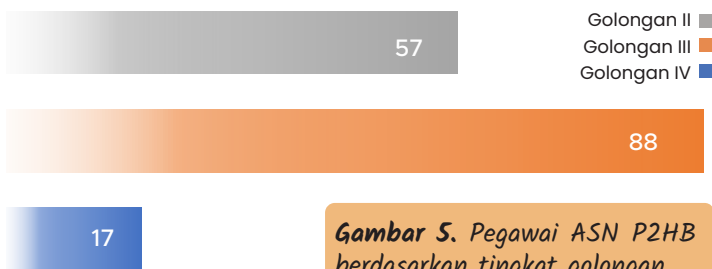
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri dari ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Paruh Waktu) Jumlah total SDM yang dimiliki oleh Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan di tahun 2025 yaitu sebanyak 162 pegawai, dengan komposisi terdiri atas 92 PNS, 48 PPPK dan 22 PPPK Paruh Waktu.

Persebaran pegawai dimasing-masing unit kerja sudah mengacu kepada kompetensi dan jabatan fungsional yang melekat pada masing-masing pegawai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan dipimpin oleh 4 orang jabatan struktural yang membawahi jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jabatan fungsional tertentu berjumlah 62 orang yang terdiri dari fungsional pranata komputer sebanyak 13 orang (8%), arsiparis 1 orang (1%), analisis kebijakan 8 orang (5%), perencana 3 orang (2%), penyuluh kehutanan 3 orang (2%), pengendali ekosistem hutan 24 orang (15%), analisis SDM 2 orang (1%), pengendali dampak lingkungan 7 orang (4%), pranata hubungan masyarakat 1 orang (1%), analisis SDM 2 orang (1%), tugas Belajar 3 orang (2%), cuti diluar tanggungan 1 orang (1%). Sementara fungsional umum terdiri dari 92 orang (56%).



Gambar 4. Pegawai ASN P2HB berdasarkan pendidikan

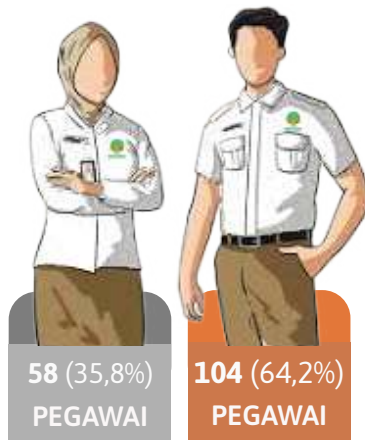
Pengelompokkan pegawai berdasarkan riwayat pendidikan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terbagi atas berbagai jenjang mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Program Doktoral (S-3) yang didominasi oleh pegawai lulusan SLTA sejumlah 77 orang. Selanjutnya diikuti oleh pegawai lulusan Sarjana (S-1) sebanyak 50 orang, pegawai lulusan Pascasarjana (S-2) sebanyak 14 orang, pegawai lulusan Sarjana Muda (D3) sebanyak 10 orang, lulusan Program Doktoral (S-3) sebanyak 8 orang, lulusan SLTP 2 orang dan lulusan SD 1 orang.



Gambar 5. Pegawai ASN P2HB berdasarkan tingkat golongan

Pengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat golongan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terbagi atas golongan IV sejumlah 17 orang, golongan III sejumlah 88 orang, golongan II sejumlah 57 orang dan yang terakhir golongan I sejumlah 0 Orang.

Gambar 6. Pegawai ASN P2HB berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan pemilahan gender pegawai di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, baik pegawai yang berstatus PNS maupun PPPK didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Pegawai Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri dari 104 orang pegawai laki-laki (52 PNS dan 52 PPPK) atau sebesar 64,2% dan 58 orang pegawai perempuan (40 PNS dan 18 PPPK) atau sebesar 35,8%.

1.6 ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan dalam pencapaian kinerja P2HB tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029. Dalam Renstra tersebut, untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional, Kementerian Kehutanan merumuskan empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025–2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus, dan pengembangan bioetanol.

Sejalan dengan isu strategis pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2025–2029, P2HB memiliki peluang strategis untuk berperan sebagai pusat fasilitasi dan inovasi dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan rekomendasi kebijakan, pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi multipihak guna mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, pengelolaan keanekaragaman hayati, penguatan fungsi hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi hasil hutan.

1) Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan

Isu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan fungsi P2HB dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. P2HB melaksanakan perannya melalui pengembangan kebijakan dan dukungan teknis yang mendorong pemanfaatan hutan secara produktif, penguatan kemitraan usaha kehutanan, serta peningkatan peran masyarakat dan pelaku usaha kehutanan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan hutan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan isu utama yang sejalan dengan tugas P2HB dalam penguatan implementasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang menjaga fungsi ekologis. P2HB berperan dalam perumusan rekomendasi, pengembangan model pengelolaan, dan pemantauan kebijakan yang mengintegrasikan aspek konservasi keanekaragaman hayati ke dalam pembangunan kehutanan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem hutan, perlindungan flora dan fauna, serta keberlanjutan jasa lingkungan.

3) Hutan sebagai Cadangan Pangan, Energi, dan Air

Isu hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air merupakan isu strategis yang berkaitan dengan tugas P2HB dalam pengembangan dan penguatan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendukung ketahanan nasional. P2HB berperan dalam perumusan rekomendasi kebijakan, pengembangan model pengelolaan kawasan hutan, serta dukungan teknis yang mengintegrasikan fungsi hutan sebagai penyedia sumber pangan, energi terbarukan, dan pengatur tata air. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan fungsi ekologis dan sosial ekonomi hutan.

4) Potensi Hilirisasi Hasil Hutan: Kayu Log, Getah Pinus dan Aren untuk Biethanol

Hilirisasi Hasil Hutan merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas P2HB dalam pengembangan kebijakan, model, dan dukungan teknis pengelolaan hutan berkelanjutan. P2HB berperan dalam mendorong peningkatan nilai tambah hasil hutan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan skema pemanfaatan hasil hutan, serta fasilitasi integrasi hulu–hilir dalam pengelolaan kehutanan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan.





Hutan Penelitian Pasir Hantap



Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB), Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, meluncurkan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan di Kampus Gunung Batu Bogor, pada tanggal 9 September 2025. Kehadiran TKMH Kehutanan menjadi wadah kolaborasi peneliti, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mempercepat alih pengetahuan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.



02

PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS P2HB TAHUN 2025 -2029

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut atas penataan kelembagaan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Dalam struktur organisasi tersebut, P2HB merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas kementerian di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dengan mandat utama pengembangan hutan berkelanjutan.

Renstra P2HB 2025–2029 diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Kehutanan dan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan, instrumen, dan model pengelolaan hutan berkelanjutan yang inovatif dan responsif terhadap tantangan nasional dan global. Arah kebijakan P2HB selaras dengan misi Kementerian Kehutanan, khususnya dalam menjaga ketahanan ekosistem hutan, meningkatkan nilai tambah kehutanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan kehutanan yang baik.

Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) P2HB mengacu pada Sasaran Program Sekretariat Jenderal, yaitu meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian, dengan IKP berupa Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029. Melalui mekanisme cascading kinerja, sasaran tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan P2HB, yaitu terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Tabel 1. Kinerja Program P2HB Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
SS4. Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	SS4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T4.SS4.SP3. Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian	T4.SS4.SP3.1 Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Untuk mengukur Sasaran Program Setjen “Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian”, pada periode 2025-2029 ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Setjen “Indeks Implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional” dengan target dalam Renstra Kemenhut 2025-2029 disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Matriks Kinerja Utama Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025-2029

PROGRAM :		PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN					
		TUJUAN PROGRAM 2 : Memperkuat Perumusan Kebijakan Dan Pelaksanaan Tugas Khusus Lainnya Dalam Mendukung Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET			2028	2029
			2025	2026	2027	4	5
T4. SS4.SP3. Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis Kementerian	T4. SS4.1.SP3.1. Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional	Poin	1	2	3		

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Berdasarkan tabel diatas, target IKP tahun 2025 menunjukkan 1 poin. Capaian IKP tersebut diperoleh dari hasil perhitungan capaian IKK P2HB. Pada tingkatan IKK (satuan persen) akan melakukan pengukuran implementasi kebijakan UKE I pada 2 (dua) aspek, yaitu 1) Implementasi kebijakan, serta 2) Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Sementara untuk target IKP (satuan poin) dihasilkan dari konversi pengukuran persentase dari level IKK menjadi poin.

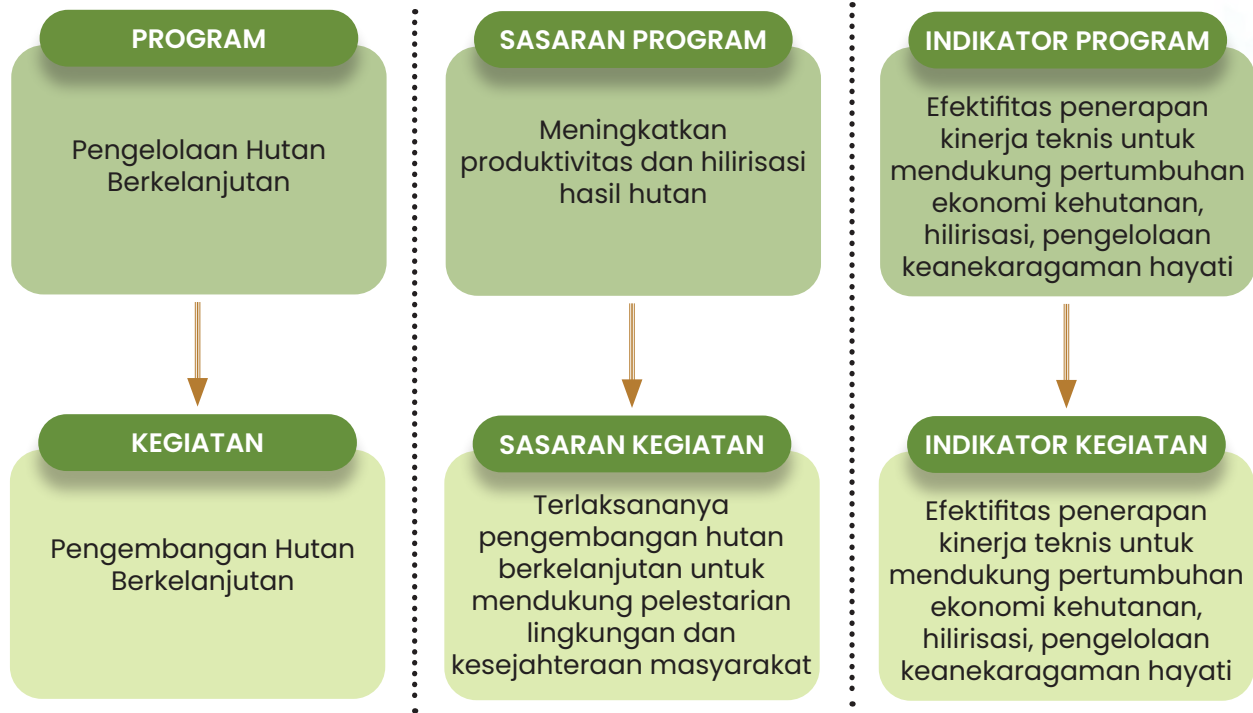


Tabel 3. Target Kinerja Utama P2HB Tahun 2025-2029

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/ Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian	Pengembangan Hutan Berkelanjutan/ Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	70%	72%	74%	76%	78%
		ABV 001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	Rekomendasi	8	9	10	12	13
		CDK-OP 001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Unit	14	14	14	14	14
		RDK-OP 001. Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Layanan	7	7	7	7	7

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Target kinerja utama P2HB tahun 2025 menunjukkan 70% pada sasaran strategis Pengembangan Hutan Berkelanjutan untuk mendukung Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan IKK “Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”



(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Gambar 7. Arsitektur Kinerja P2HB

Pelaksanaan sasaran kegiatan P2HB didukung oleh Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, yang diwujudkan melalui kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta layanan laboratorium kehutanan. Target kinerja P2HB Tahun 2025–2029 disusun secara bertahap, baik pada level indikator persentase efektivitas kebijakan maupun pada output utama berupa rekomendasi, unit KHDTK, dan layanan laboratorium.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan P2HB Tahun 2025-2029

IKK	KRO/RO/KOMPONEN	TARGET 2025	
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
Kegiatan: Pengembangan Hutan Berkelanjutan			
Sasaran Kegiatan:	Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat		
Efektifitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	ABV. Kebijakan Bidang Kehutanan		
	001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	8	Rekomendasi
	051. Perencanaan dan formulasi pengembangan kehutanan	4	Rekomendasi
	052. Fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan	4	Rekomendasi
	CDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14	Unit
	001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	14	Unit
	051. Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian Lestari dan Mandiri	14	Unit
	RDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7	Layanan
	001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	7	Layanan
	051. Pengelolaan Laboratorium Terpadu	4	Layanan
	051. Pengelolaan Laboratorium Lapangan	3	Layanan
	Program: DUKUNGAN MANAJEMEN		
	EBA.994. Layanan Perkantoran		
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Secara keseluruhan, perencanaan P2HB diarahkan untuk memperkuat sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pengelolaan hutan, serta mendukung Prioritas Nasional, khususnya Prioritas Nasional 2 (ketahanan pangan, energi, dan air) dan Prioritas Nasional 7 (reformasi birokrasi). Dengan demikian, P2HB diharapkan berperan sebagai penghubung strategis antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan berkelanjutan.

Tahun 2025-2029 kegiatan pada Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang mendukung prioritas nasional adalah Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan (RDK OP) yang masuk dalam Prioritas Nasional 2 (PN 2).

2.2 RENCANA KERJA P2HB TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) P2HB 2025–2029 dan menjadi landasan awal pencapaian target pembangunan kehutanan dalam kerangka RPJMN 2025–2029. Penyusunan Renja P2HB 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2024, serta Arsitektur Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025.

Dalam Renja 2025, P2HB melaksanakan kegiatan Pengembangan Hutan Berkelanjutan sebagai bagian dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran kegiatan terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja P2HB 2025

IKK	KRO/RO/KOMPONEN	TARGET 2025
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
Kegiatan: Pengembangan Hutan Berkelanjutan		
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat		
Efektifitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	ABV. Kebijakan Bidang Kehutanan	
	001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	8 Rekomendasi
	051. Perencanaan dan formulasi pengembangan kehutanan	4 Rekomendasi

IKK	KRO/RO/KOMPONEN		TARGET 2025
	052. Fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan	4	Rekomendasi
	CDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14	Unit
	001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	14	Unit
	051. Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian Lestari dan Mandiri	14	Unit
	RDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7	Layanan
	001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	7	Layanan
	051. Pengelolaan Laboratorium Terpadu	4	Layanan
	051. Pengelolaan Laboratorium Lapangan	3	Layanan
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN			
	EBA.994. Layanan Perkantoran		
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan, P2HB melaksanakan beberapa keluaran utama, meliputi penyusunan rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan melalui kegiatan perencanaan formulasi, dan fasilitasi penerapan kebijakan, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Litbang Kehutanan Lestari, serta penyediaan layanan laboratorium kehutanan. Seluruh keluaran tersebut dirancang untuk memperkuat basis kebijakan, inovasi, dan dukungan teknis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, arah kegiatan P2HB selaras dengan transformasi ekonomi hijau melalui pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendorong keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi dasar integrasi nilai konservasi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah sektor kehutanan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 8 dan SDGs 15.

Pengelolaan KHDTK Litbang Kehutanan Lestari diarahkan sebagai pusat inovasi dan laboratorium alam untuk pengembangan model pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara berkelanjutan, termasuk dukungan terhadap hilirisasi dan pengembangan bioekonomi kehutanan. Sementara itu, pengelolaan laboratorium terpadu dan laboratorium lapangan difokuskan pada penyediaan data, pengujian, dan rekomendasi teknis guna mendukung inovasi, standarisasi, dan peningkatan mutu hasil hutan.

Secara keseluruhan, Renja P2HB Tahun 2025 disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan nasional, sekaligus memperkuat peran P2HB sebagai unit pendukung kebijakan dan inovasi pengembangan hutan berkelanjutan.

Kegiatan laboratorium secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat sistem pengujian, **validasi, dan sertifikasi hasil penelitian kehutanan**. Hasilnya diharapkan mampu menjadi referensi nasional dalam pengembangan produk hutan berkelanjutan, mendukung transformasi sektor kehutanan ke arah bioindustri dan ekonomi sirkular, serta memastikan pengelolaan sumber daya hutan berbasis ilmu pengetahuan dan mutu.

2.3 PERJANJIAN KINERJA P2HB TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2025, seperti yang terlihat pada tabel 6..



Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan P2HB tahun 2025

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1. Stakeholder Perspective				
1	Pengembangan Hutan Berkelanjutan untuk mendukung Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat	1.1	Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	70%
2. Customer Perspective				
2	Perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang spesifik	2.1	Persentase keselarasan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang dihasilkan	85%
3	Fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	3.1	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	5 Lembaga
		3.2	Tingkat Pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan yang digunakan	80%
3. Internal Process				
4	Pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus dalam rangka penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	4.1	Tingkat kualitas pengelolaan laboratorium dan KHDTK	80%
5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hutan berkelanjutan	5.1	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan pengembangan hutan berkelanjutan	4 Poin

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
4. Learning and Growth				
7	Penguatan akuntabilitas kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif, efisien dan akuntabel	7.1	Nilai SAKIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	90-100 (Sangat Baik)
		7.2	Nilai Maturitas SPIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	3,8 poin
		7.3	Persentase penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	100%

(sumber : Renstra P2HB Tahun 2025-2029)

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan seperti pada gambar berikut.



Gambar 8. Penetapan Perjanjian Kinerja P2HB Tahun 2025

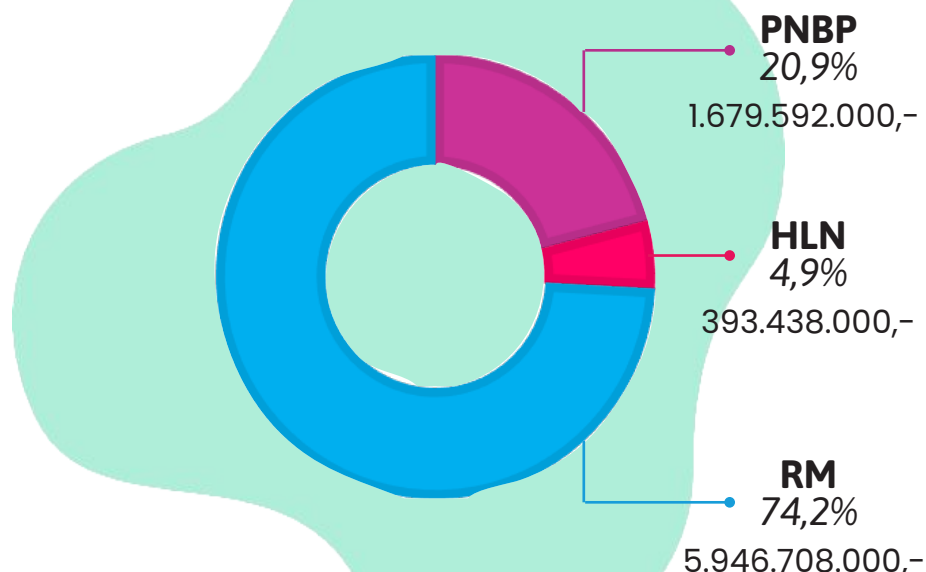
2.4 PERJALANAN PAGU ANGGARAN P2HB TAHUN 2025

Berdasarkan Pagu Indikatif tahun 2025, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mendapatkan anggaran sebesar Rp 14.718.591.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pagu Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.5.946.708.000,- (40,40%); PNBP sebesar Rp.8.378.445.000,- (56,92%); Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.393.438.000,- (2,67%).

Pelaksanaan anggaran setelah Efisiensi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8.019.738.000,- (Delapan milyar sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Pagu Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.5.946.708.000,- (74,15%); PNBP sebesar Rp.1.679.592.000,- (20,94%); Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.393.438.000,- (4,91%).

PAGU ANGGARAN P2HB TAHUN 2025

(ANGGARAN SETELAH EFISIENSI)



Gambar 9. Pagu Efektif P2HB tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana



Pada Tahun Anggaran 2025, P2HB melakukan 13 kali revisi anggaran yang disebabkan oleh pergeseran anggaran, perubahan kebijakan (blokir anggaran dalam rangka penghematan), pencatatan hibah langsung luar negeri (HLN), serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Proses revisi anggaran tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.

Berdasarkan gambar di atas, dari keseluruhan revisi tersebut, sebagian besar merupakan revisi administratif dan informasi kinerja yang tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran. Perubahan pagu hanya terjadi pada beberapa revisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan efisiensi operasional layanan perkantoran, penyesuaian kebijakan anggaran oleh DJA, serta pencatatan hibah langsung luar negeri (HLN) kerja sama dengan PT Komatsu Marketing and Support Indonesia sebesar Rp393.438.000,-.

Rangkaian revisi anggaran tersebut mencerminkan upaya penyesuaian pengelolaan anggaran P2HB terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Gambar 9a. Perjalanan Pagu Anggaran P2HB Tahun 2025

Untuk memprediksi capaian realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran, prognosis realisasi anggaran P2HB per Output tahun 2025, disajikan pada Tabel 6.a. Prognosis digunakan untuk memperkirakan besaran realisasi belanja berdasarkan tren penyerapan anggaran dan progres kegiatan yang sedang berjalan.

Tabel 7. Prognosis Realisasi Anggaran P2HB per Output 2025

RO	ALOKASI ANGGARAN	PAGU SETELAH EFISIENSI	PROGNOSIS REALISASI		
			Rp.	% PAGU AWAL	% PAGU EFISIENSI
ABV.001. Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.388.682	846.362	840.925	35,20	98,57
CDK OP.001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	4.012.587	765.807	762.500	19,00	99,57
RDK OP.001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.400.988	491.235	489.721	20,40	99,69
Jumlah Non Operasional	8.802.257	2.103.404	2.093.146	23,77	99,51
EBA.994. Layanan Perkantoran	5.522.896	5.522.896	5.519.149	99,93	99,93
Jumlah Operasional	5.522.896	5.522.896	5.491.149	99,93	99,93
TOTAL	14.326.153	7.626.300	7.612.895	61,85	98,72

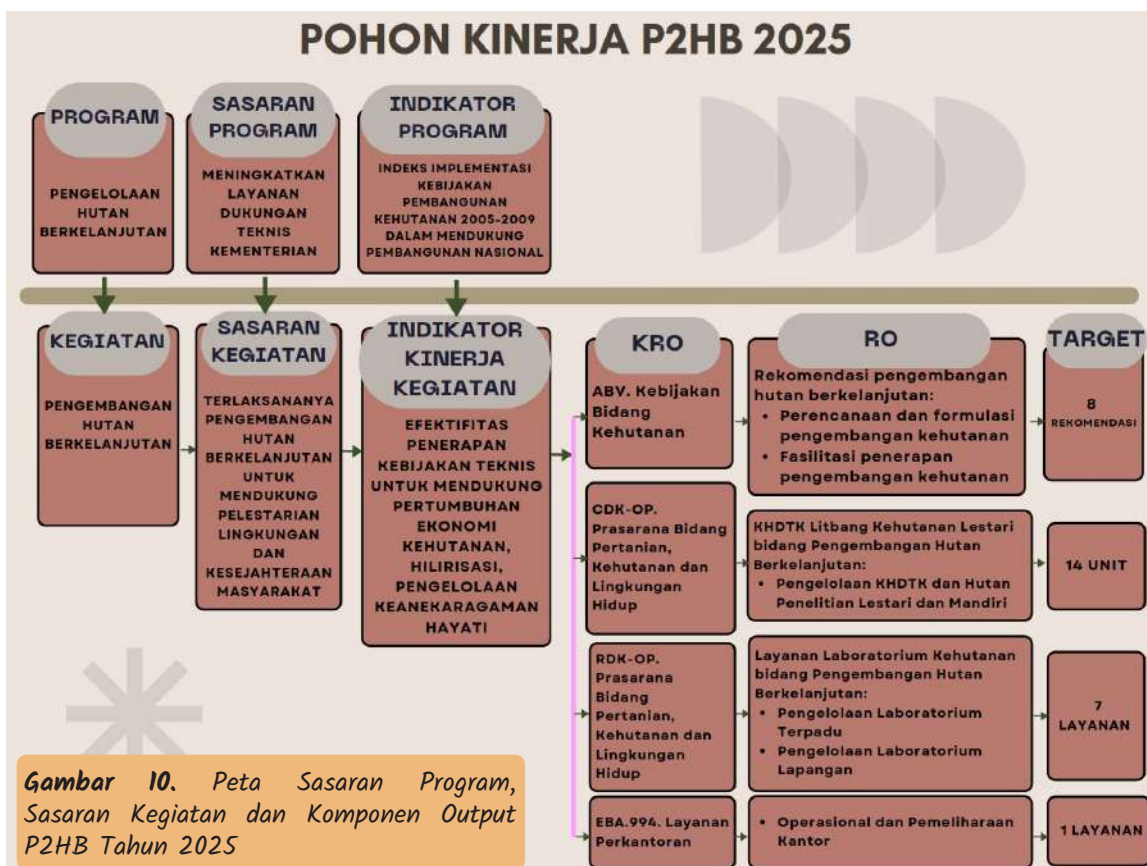
(sumber : Renja P2HB Tahun 2025)

Tabel 8. Indikator Kinerja dan Anggaran Kegiatan Tahun 2025

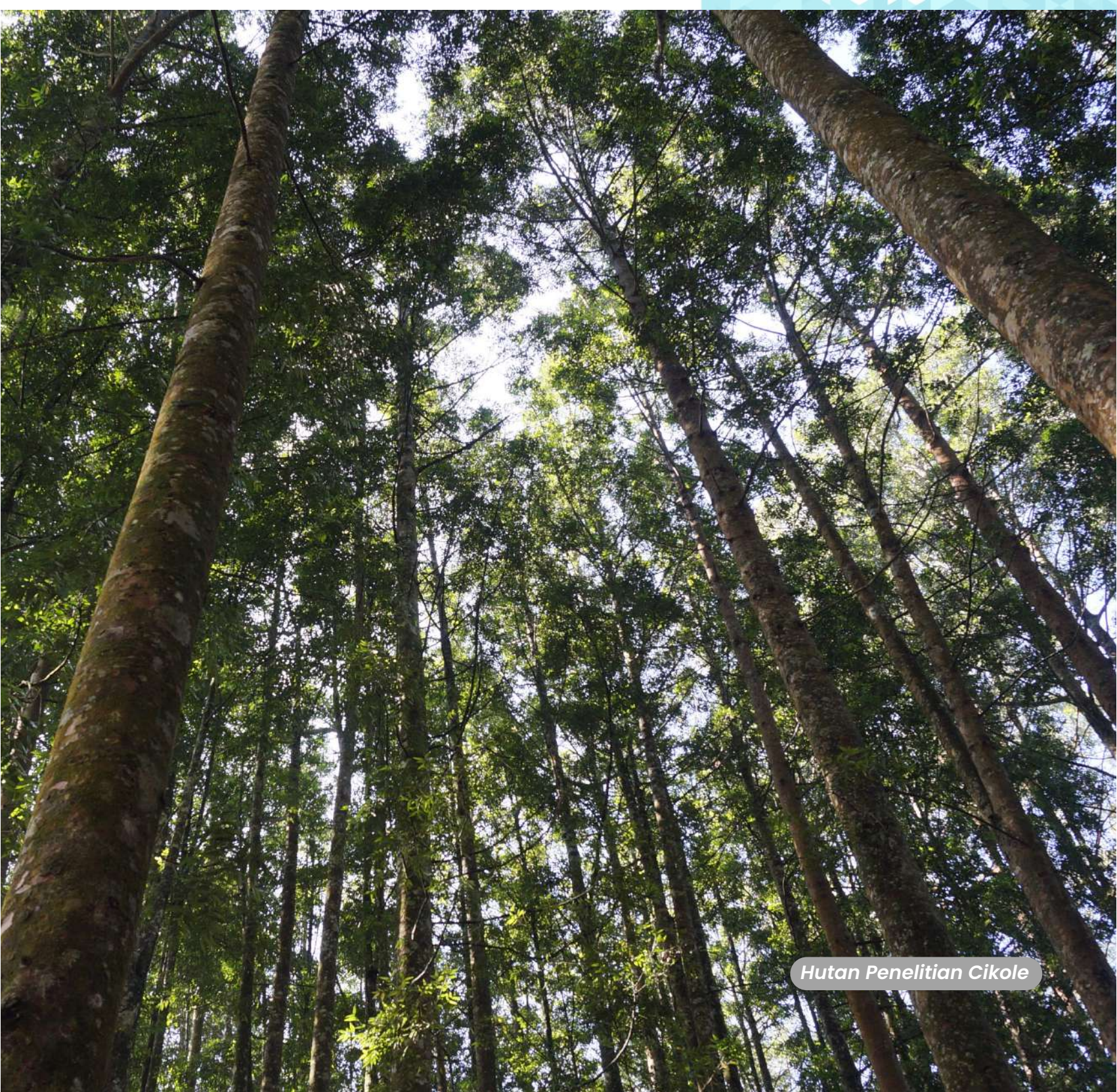
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN (x1.000)
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
IKK ; Efektifitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati			
ABV.Kebijakan Bidang Kehutanan		8 Rekomendasi	846.362
001. Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	051. Perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan	Rekomendasi	369.600
	052. Fasiitasi penerapan pengembanan hutan berkelanjutan	Rekomendasi	130.432
CDK OP. Prasana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			130.432
001. KHDTK Litbang Hutan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	051. Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian Lestari dan Mandiri	1 Produk	765.807
RDK OP.001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan		1 Layanan	481.235
001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	051. Pengelolaan Laboratorium Terpadu	1 Layanan	252.688
	053. Pengelolaan Laboratorium Lapangan	1 Produk	238.547P
Program Dukungan Manajemen			
7302.EBA.994. Layanan Perkantoran		1 Layanan	5.522.896
EBA.994. Layanan Perkantoran	002. Operasional dan Pemeliharaan kantor		5.522.896
JUMLAH			7.626.300

2.5 POHON KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pohon Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis ke sasaran unit kerja di bawahnya. Melalui pohon kinerja, diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Indikator kinerja program dan rencana Cascading indikator kinerja program P2HB tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Berdasarkan cascading kinerja, sasaran program Setjen diturunkan ke dalam sasaran kegiatan P2HB yaitu Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati.



Hutan Penelitian Cikole

“ Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB), Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, meluncurkan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan di Kampus Gunung Batu, Bogor, Jumat (19/9/2025). Kehadiran TKMH Kehutanan menjadi wadah kolaborasi peneliti, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mempercepat alih pengetahuan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.



03

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA P2HB

Capaian kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2025 merupakan capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Capaian kinerja diukur dengan melihat perbandingan antara target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

3.1.1 SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN P2HB

Sebagai organisasi baru di lingkungan Kementerian Kehutanan, P2HB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan dalam mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan dukungan tugas teknis kementerian, pelaksanaan kegiatan P2HB mengacu pada sasaran program “*Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian*” dengan Indikator Kinerja Program (IKP) “*Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional*”.

Berdasarkan Permenhut No. 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2025–2029, Renstra Kementerian Kehutanan menetapkan kerangka sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam kerangka Renstra untuk menilai efektifitas implementasi kebijakan pembangunan kehutanan adalah Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029, yang dikembangkan sebagai indikator pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Dalam kerangka Renstra Kementerian Kehutanan 2025–2029, indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, mengevaluasi keselarasan kebijakan dengan arah pembangunan nasional, serta mendukung perbaikan kebijakan dan strategi ke depan.

Hasil pengukuran IKP diperoleh melalui konversi rata-rata nilai persentase Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis pada Pusat Pengembangan di lingkungan Sekretariat Jenderal ke dalam skala nilai 1–5 poin, dengan target Tahun 2025 sebesar 1 poin. Penilaian IKK Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis Tahun 2025 dilakukan oleh Pusat Pengembangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB), Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (P2SEMH), dan Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (P2MABHK).

Penilaian IKK Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis pada Pusat Pengembangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan terhadap aspek implementasi kebijakan (45%) serta evaluasi dan

keberlanjutan kebijakan (55%) pada tiga dari lima kebijakan pembangunan kehutanan Tahun 2025–2029 yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2025–2029, yaitu: (1) perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air, (2) penguasaan hutan yang berkeadilan, dan (3) pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Adapun hasil penilaian IKK Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis pada P2HB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Rincian perhitungan IKK Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis P2HB Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025	Capaian 2025		
		Aspek Implementasi Kebijakan	Aspek Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan	Nilai IKK
1	2	3	4	(5 = 3 + 4)
Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	70%	31,95%	38,50%	70,45%
Bobot		45%	55%	100%
IKP Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional	1 poin			1 poin (nilai dalam rentang 70 - 72%)

(sumber : Olahan data P2HB 2025)

Berdasarkan tabel 7 di atas, capaian IKP P2HB telah mencapai target, yaitu sebesar 1 poin, sesuai dengan target IKP Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029. Pelaksanaan perhitungan IKK instrumen pengukuran Efektivitas penerapan kebijakan teknis Tahun 2025, P2HB melaksanakan pengukuran evaluasi kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) yang dilaksanakan P2HB dan menghasilkan rekomendasi (policy paper/policy brief) untuk pembaharuan kebijakan pengelolaan PUP pada PBPH yang diatur pada SK.237 tahun 1995. Capaian IKP tersebut diperoleh dari hasil perhitungan capaian IKK P2HB sebesar 70,45% yang berada pada rentang nilai 70–72%, sehingga setelah dikonversi ke dalam IKP Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029 menghasilkan nilai 1 poin.

A. CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN (Renja 2025)

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) P2HB Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pengembangan hutan berkelanjutan yang terkait dengan cadangan pangan, ketahanan energi, serta swasembada air dan keanekaragaman hayati. P2HB mendukung pertumbuhan investasi kehutanan melalui pengembangan model peningkatan nilai tambah kayu dan hasil hutan bukan kayu, termasuk tumbuhan dan satwa liar.

A. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Komponen Output Kegiatan

Secara keseluruhan, capaian kinerja berdasarkan Komponen Output Kegiatan (KRO) P2HB Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai tingkat ketercapaian output kegiatan serta menjadi dasar dalam analisis efektivitas pelaksanaan program. Rincian capaian tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja P2HB berdasarkan Komponen Output Kegiatan (KRO) P2HB 2025

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	2025		
			Target	Realisasi	%
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/ Meningkatkan layanan dukungan tugas teknis kementerian	Pengembangan Hutan Berkelanjutan/ Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	70%	70,45%	100%
		ABV 001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	8 rekomendasi	8 rekomendasi	100%
		CDK-OP 001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	14 unit	14 unit	100%
		RDK-OP 001. Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	7 Layanan	7 Layanan	100%
Rata-rata kinerja					100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja P2HB pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang dihitung berdasarkan capaian seluruh komponen output kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 berhasil, karena realisasi kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1) Capaian Kinerja “Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati”

Pada tingkat kegiatan Pengembangan Hutan Berkelanjutan, capaian Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) “Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati” mencapai 70,45% dari target 70%, atau setara dengan 100,6% capaian kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan teknis telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian IKK tersebut menjadi dasar penilaian dan mendukung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal, yaitu Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029, dengan nilai capaian sebesar 1 poin. Rincian perhitungan IKK Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis P2HB Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7.

Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Tahun 2025, P2HB melakukan evaluasi kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa policy paper dan policy brief sebagai dasar pembaruan kebijakan pengelolaan PUP pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 237/Kpts-II/1995. Ringkasan hasil evaluasi kebijakan Pengelolaan PUP Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 9.

“FGD Bahas Urgensi Petak Ukur Permanen dalam Pengelolaan Kinerja PBPH, 7 Juli 2025.”



Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis mencakup aspek implementasi kebijakan serta aspek evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Hasil penilaian efektivitas penerapan kebijakan teknis kegiatan P2HB tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 11. Penilaian Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis Kegiatan P2HB 2025

2) Capaian Kinerja Rekomendasi

P2HB menjalankan perannya dalam memberikan dukungan teknis kepada Kementerian. Pada Tahun 2025, capaian kinerja P2HB menghasilkan 8 (delapan) rekomendasi kebijakan yang mendukung proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Kegiatan P2HB Tahun 2025 yang menghasilkan rekomendasi (R) meliputi:

1

Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan (1 R)

2

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) (1 R)

3

Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) (1 R)

4

Kajian tentang Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor Fasilitas penerapan pengembangan kehutanan (1 R)

5

Profiling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu (1 R)

6

Keanekaragaman Sumber Pangan Hutan: Studi Awal di KHDTK Carita (1 R)

7

Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP) (1 R)

8

Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan (1 R)

8 REKOMENDASI P2HB 2025

Rekomendasi Kebijakan Penyusunan regulasi khusus mengenai laboratorium kehutanan, Efisiensi layanan dan pengelolaan, Modernisasi peralatan dan sistem manajemen laboratorium, Penguatan sistem mutu (akreditasi), Jejaring dan kolaborasi lintas sektor (shared facility, riset kolaboratif), Integrasi dalam rantai nilai kehutanan, pusat rujukan nasional, Branding layanan laboratorium unggulan

08

dalam Policy Brief "Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan"

Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan

01

dalam Policy Brief "Tata Kelola Penyediaan Bahan Baku Berkelanjutan untuk Hilirisasi Getah Pinus"

Rekomendasi Kebijakan Penetapan HP Sobang sebagai lokasi percontohan pengembangan aren; Penguatan Integrasi antara BPTH, lembaga riset, dan industri energi dalam satu rantai nilai aren; Penguatan skema kemitraan inklusif antara pengelola hutan, masyarakat lokal, dan BUMN energi; Pengembangan hilirisasi produk HHBK aren

07

dalam Policy Brief "Pengembangan Aren (Arenga pinnata) di Hutan Penelitian Sobang Penguatan Energi Terbarukan, Multisaha Kehutanan, dan Ekonomi Masyarakat"

Rekomendasi Kebijakan Penguatan basis, Integrasi data, pengetahuan lokal, transfer pengetahuan, Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk pangan hutan

06

dalam Policy Brief "Penguatan Peran Pangan Hutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Keanekaragaman Hayati Studi Awal di KHDTK Carita, Provinsi Banten"

05

Rekomendasi kebijakan Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

dalam Policy Brief "Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak"

Rekomendasi Kebijakan Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara

04

dalam Policy Brief "Penguatan Peran Pangan Hutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Keanekaragaman Hayati Studi Awal di KHDTK Carita, Provinsi Banten"

Rekomendasi revisi/pembaruan kebijakan pengelolaan PUP pada pada PBPH SK. 237 tahun 1995 tentang Pemantauan pertumbuhan dan riap tegakan hutan

02

dalam Policy Brief "Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)" pada Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)"

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Jembatan/Hub Pengetahuan dan Kerjasama

03

dalam Policy Brief "Pengembangan Hub Pengetahuan dan Kerja Sama Kehutanan sebagai Fondasi Kebijakan Berbasis Bukti"

TARGET
DAN
CAPAIAN

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

1
REKOMENDASI

Gambar 12. Capaian Rekomendasi Kebijakan pada Kegiatan P2HB tahun 2025



Sebelum penyusunan policy brief, beberapa kegiatan terlebih dahulu menghasilkan policy paper dan prosiding kegiatan. Daftar lengkap output kegiatan P2HB disajikan pada Lampiran 4. Adapun tahapan kegiatan dan capaian utama kegiatan P2HB Tahun 2025 yang menghasilkan rekomendasi (R) adalah sebagai berikut :

→ Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan

Pelaksanaan Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan menghasilkan rekomendasi yang dituangkan dalam policy brief berjudul “Tata Kelola Penyediaan Bahan Baku Berkelanjutan untuk Hilirisasi Getah Pinus.” Penguatan tata kelola getah pinus nasional bertujuan untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi getah pinus guna mendorong nilai tambah serta keberlanjutan sektor kehutanan, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 13. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Tata Kelola Getah Pinus

FGD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP pada PBPH dilaksanakan pada 5 November 2025 di Kantor P2HB dengan melibatkan narasumber dan peserta dari instansi terkait. Hasil FGD menjadi dasar penyusunan policy paper dan policy brief evaluasi kebijakan pengelolaan PUP, guna mendukung pembaruan kebijakan PUP yang lebih adaptif terhadap kondisi terkini dan mendukung pengelolaan hutan lestari. Ringkasan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. Ringkasan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) TA 2025

Tahapan Kegiatan	Output / Capaian Utama	Temuan & Hasil Penting
Desk Study	Risalah Kebijakan	Berhasil menghimpun regulasi, pedoman teknis, dan dokumen relevan sebagai dasar konfirmasi teknis dengan Ditjen PHL.
FGD (Pusat & Daerah)	Masukan Pemangku Kepentingan	Teridentifikasi urgensi PUP, masalah implementasi, ketidaksinkronan regulasi, dan kebutuhan pembaruan kebijakan.
Validasi & Verifikasi Lapangan	Data Riil Tingkat Tapak (6 PBPH Kaltim & Riau)	Gambaran variasi desain, metode pengukuran, mekanisme pelaporan, serta tantangan teknis/ kelembagaan di lapangan.
Analisis & Rekomendasi	Analisis Komprehensif & Gap Kebijakan	Perumusan rekomendasi pembaruan kebijakan yang lebih sederhana, terstandarisasi, dan adaptif.
Penyusunan Dokumen Strategis	Policy Paper & Policy Brief	Dokumen dasar untuk revisi SK Menhut No. 237/ Kpts-II/1995 agar sesuai dengan perkembangan terkini.

➔ **Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH)**

Tahun 2025, P2HB melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pembangunan dan penguatan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan sebagai sistem pengelolaan pengetahuan kehutanan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ringkasan Pelaksanaan & Capaian TKMH Kehutanan 2025 disajikan pada Tabel 12, dan proses pelaksanaan kegiatan TKMH disajikan pada gambar di bawah (gambar 15).

FGD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP pada PBPH dilaksanakan pada 5 November 2025 di Kantor P2HB dengan melibatkan narasumber dan peserta dari instansi terkait. Hasil FGD menjadi dasar penyusunan policy paper dan policy brief evaluasi kebijakan pengelolaan PUP, guna mendukung pembaruan kebijakan PUP yang lebih adaptif terhadap kondisi terkini dan mendukung pengelolaan hutan lestari. Ringkasan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Ringkasan Pelaksanaan & Capaian TKMH Kehutanan 2025

Tahapan Kegiatan	Deskripsi Pelaksanaan	Hasil & Capaian Utama
Identifikasi & Inisiasi Mitra	Audiensi dengan 10 lembaga (BRIN, PT, Swasta) & pelaksanaan FGD strategis.	Komitmen kontribusi data ilmiah, riset/studi, fasilitas, dan keselarasan agenda nasional.
Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan platform digital dan pembentukan Sekretariat TKMH Kehutanan.	Tersedianya fitur kurasi, pengelolaan konten, ruang kolaborasi, dan unit operasional.
Formalisasi Kerja Sama	Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).	7 PKS ditandatangani; lainnya dalam proses harmonisasi administrasi.
Implementasi Kolaborasi	Program sit-in, uji banding lab, pelatihan, studi bersama dan penggunaan KHDTK bersama.	Pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan basis teknis.
Peresmian & Publikasi	<i>Launching resmi</i> dan <i>Joint Declaration</i> (19 September 2025).	Komitmen publik bersama mitra dan pengisian konten awal (kajian teknis & best practices).
Evaluasi & Tindak Lanjut	Penilaian ketercapaian target tahunan.	Fondasi digital & lembaga terbentuk; fokus kedepan pada standardisasi dan optimalisasi platform.





Berdasarkan data di atas, berikut adalah indikator utama yang berhasil dicapai oleh TKMH :

- **Aspek Hukum:** 7 Dokumen PKS berhasil difinalisasi, dan Aspek Digital: Platform berfungsi dengan fitur kurasi dan kolaborasi lintas lembaga.
- **Aspek Operasional:** Sekretariat TKMH telah aktif sebagai unit koordinasi.
- **Aspek Kolaborasi:** Melibatkan ekosistem luas mulai dari peneliti (BRIN), akademisi, hingga sektor swasta.

Rekomendasi pengembangan mendatang, langkah strategis berikutnya adalah:

- **Standardisasi:** Penyeragaman format dokumen pengetahuan agar mudah diakses.
- **Kurasi Konten:** Memperketat kualitas informasi yang masuk ke dalam sistem.
- **Optimalisasi:** Mendorong pemanfaatan platform untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Gambar 15. Proses Pelaksanaan Kegiatan TKMH Kehutanan Tahun 2025

→ **Kajian tentang Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor Fasilitas penerapan pengembangan kehutanan**

Pelaksanaan Kajian Kebijakan Identifikasi Jenis Kayu dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan Berorientasi Ekspor sebagai fasilitas penerapan pengembangan kehutanan menghasilkan dua luaran, yaitu: (1) kajian kesesuaian nama dagang sesuai dengan jenis dan peruntukannya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, yang disajikan dalam bentuk policy paper, policy brief, dan prosiding hasil FGD; serta (2) advokasi revisi Keputusan Menteri Kehutanan No.163/Kpts-II/2003 dalam rangka mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Penyampaian rumusan hasil FGD dan policy brief kepada para pihak terkait, khususnya pembuat kebijakan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Hasil akhir kegiatan ini merupakan upaya pengerucutan rekomendasi agar lebih terarah pada optimalisasi pendapatan negara dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Kajian tentang Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12b. Ringkasan Pelaksanaan & Capaian TKMH Kehutanan 2025

Tahapan Kegiatan	Entitas / Pihak Terkait	Poin Utama & Hasil Koordinasi
Koordinasi Ekspor- Impor	Dit. Bina Pengolahan & Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kayu sebelum ekspor sulit karena kendala waktu/biaya. • Urgensi revisi Permenhut 2/2025 untuk optimalisasi pendapatan negara dengan penyesuaian nama dagang/lokal.
Koordinasi Penatausahaan	Dit. Iuran & Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan nama lokal/dagang untuk mengakomodasi spesies dalam open list Kepmenhut 163/2003. • Fokus pada penyesuaian harga patokan untuk spesies sama yang memiliki harga berbeda.
Uji Petik Lapangan	KPH Cianjur, Perum Perhutani	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi fokus pada 3 jenis (Jati, Mahoni, Pinus) hasil budidaya. • • Sistem lacak balak menggunakan barcode mulai dari tunggak hingga ke TPK. • • Identifikasi oleh Tenaga Teknis (Ganis) berbasis ciri anatomi.
Konsultasi Pakar	Akademisi (IPB) & Pakar Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya sinkronisasi nama dagang dengan nama ilmiah. • Definisi “Kayu Komersial”: minimal dibutuhkan oleh 5 asosiasi industri. • Implementasi sistem SIPATOK untuk harga real-time berbasis pasar.

Tahapan Kegiatan	Entitas / Pihak Terkait	Poin Utama & Hasil Koordinasi
Focus Group Discussion (FGD)	Pusjakstra, BRIN, Akademisi, & Sektor Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi jenis adalah langkah fundamental. Ketidaksesuaian nama dagang berimplikasi pada kesalahan hitung PNBP. Rekomendasi peningkatan SDM Ganis (materi dendrologi).
Penyusunan Output	Tim P2HB	<ul style="list-style-type: none"> Output Dokumen: Policy Paper, Policy Brief, Prosiding FGD, dan Laporan Akhir. Fokus: Analisis kesesuaian nama dagang untuk optimalisasi PNBP.



Gambar 16. Proses Pelaksanaan dan Hasil Pengkajian Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor

→ Profilling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu



Gambar 17. Proses Pelaksanaan Kegiatan Profilling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu pada studi kasus Supply Demand Gaharu

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan komponen penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan karena memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis, serta berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perhutanan Sosial.

Kebijakan HHBK yang diatur dalam Permenhut P.35 Tahun 2007 dinilai perlu dilakukan review dan updating karena belum mengakomodasi perkembangan jenis dan pemanfaatan HHBK terkini, serta belum selaras dengan Permenhut P.2 Tahun 2025, PP Nomor 36 Tahun 2024, dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan perkembangan jenis, produk, dan pemanfaatan HHBK.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi HHBK, kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta peninjauan lapangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk melihat implementasi HHBK di tingkat tapak. Proses Pelaksanaan Kegiatan Profilling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu pada studi kasus Supply Demand Gaharu disajikan pada gambar berikut.



Sementara itu, untuk menjamin pengelolaan hutan berkelanjutan, dibutuhkan instrumen pendukung yang memastikan kualitas dan validitas data melalui Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan yang telah disusun di dalam Policy Brief “Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan”. Selain itu, pada Pengelolaan KHDTK dan HP dilakukan penelitian Pengembangan tanaman lokal Aren (*Arenga pinnata*) di Hutan Penelitian Sobang Penguatan Energi Terbarukan, serta penelitian pangan hutan di KHDTK Carita untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional dan sektoral kehutanan 2025-2029 untuk mendukung ketahanan pangan, energi, serta hilirisasi produk hasil hutan.

➔ **Keanekaragaman Sumber Pangan Hutan: Studi Awal di KHDTK Carita**

Kebijakan nasional mengakui potensi pangan hutan sebagai bagian dari sistem pangan nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Kebijakan tersebut memberikan landasan bagi integrasi pangan hutan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pengembangan kebijakan dan program pangan hutan, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk menyepakati definisi, ruang lingkup, metodologi, kriteria dan indikator ketersediaan pangan hutan, tipologi lokasi studi, serta strategi pengelolaan hutan penyedia pangan.

KHDTK Carita memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai sumber pangan hutan, namun belum didukung oleh data identifikasi jenis, pola pemanfaatan, dan nilai ekonomi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya dukungan kebijakan pengelolaan hutan multifungsi. Melalui studi dan FGD validasi bersama para pemangku kepentingan, dihimpun masukan teknis dan klarifikasi data untuk memperkuat rekomendasi pengelolaan dan pengembangan pangan hutan di KHDTK Carita, disajikan pada gambar berikut.





Gambar 18. Proses Pelaksanaan Kegiatan Studi Pangan Hutan 2025

3) Capaian Kinerja Unit dan Layanan

Target output kegiatan P2HB berupa Unit adalah kegiatan pada KHDTK dan HP Litbang Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan dan target berupa Layanan adalah kegiatan Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan.

a. Capaian Kinerja Unit

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mengelola 14 (empat belas) unit kawasan hutan yang terdiri dari 9 (sembilan) unit KHDTK total luas 11.623,66 Ha dan 5 (lima) unit Hutan Penelitian total luas 435,7 Ha yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan NTT. KHDTK dan HP ini mewakili berbagai kondisi lingkungan yang berbeda dan di dalamnya telah diintroduksi berbagai jenis pohon baik jenis pohon asli Indonesia maupun jenis-jenis pohon eksotik.

(sumber : Renstra P2HB 2025)



Gambar 19. KHDTK dan HP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

(sumber : Renstra P2HB 2025)

Sementara itu, salah satu KHDTK khususnya HP Dramaga menyediakan jasa pelayanan pendukung dalam pemanfaatan kawasan dan layanan teknis kehutanan. Layanan tersebut berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024, dengan cakupan kegiatan meliputi : kegiatan Penelitian; Praktek Lapangan dan Pendidikan; Kunjungan Wisata/Rekreasi; Pembuatan Shooting/pembuatan iklan komersil/video komersil; Pengambilan bahan materi genetik dalam KHDTK dan HP. Tahun 2025, HP Dramaga telah berkontribusi pada PNBP sebesar Rp 20.385.000,- (data per 31 Desember 2025).

2024

Rp.32.350.000
Terdiri dari kegiatan

- Camping Ground
- Pemotretan
- Izin Shooting
- Outbond Training Lokasi HP Dramaga

**PENERIMAAN
PNBP**

2025

Rp.20.385.000
Terdiri dari

- Camping Ground
- Pemotretan
- Izin Shooting
- Outbond Training
- Lokasi HP Dramaga

Gambar 20. Penerimaan PNBP Tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Penerimaan PNBP Tahun 2025 dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan nama instansi yang berdampak pada keterlambatan proses administrasi perizinan, sehingga pelayanan di HP Dramaga menjadi terhambat karena pihak pengguna harus menunggu waktu penyelesaian yang ditetapkan.

Selain itu, penurunan PNBP juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pengunjung, baik untuk kegiatan edukasi, penelitian, maupun wisata terbatas. Penurunan jumlah kunjungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penyesuaian kebijakan pemanfaatan HP Dramaga;
- Pembatasan kunjungan untuk menjaga fungsi konservasi dan keamanan HP Dramaga;
- Penurunan kegiatan kunjungan institusi (sekolah, perguruan tinggi, atau mitra).
- Perlunya penambahan object pungutan yang sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam PNBP

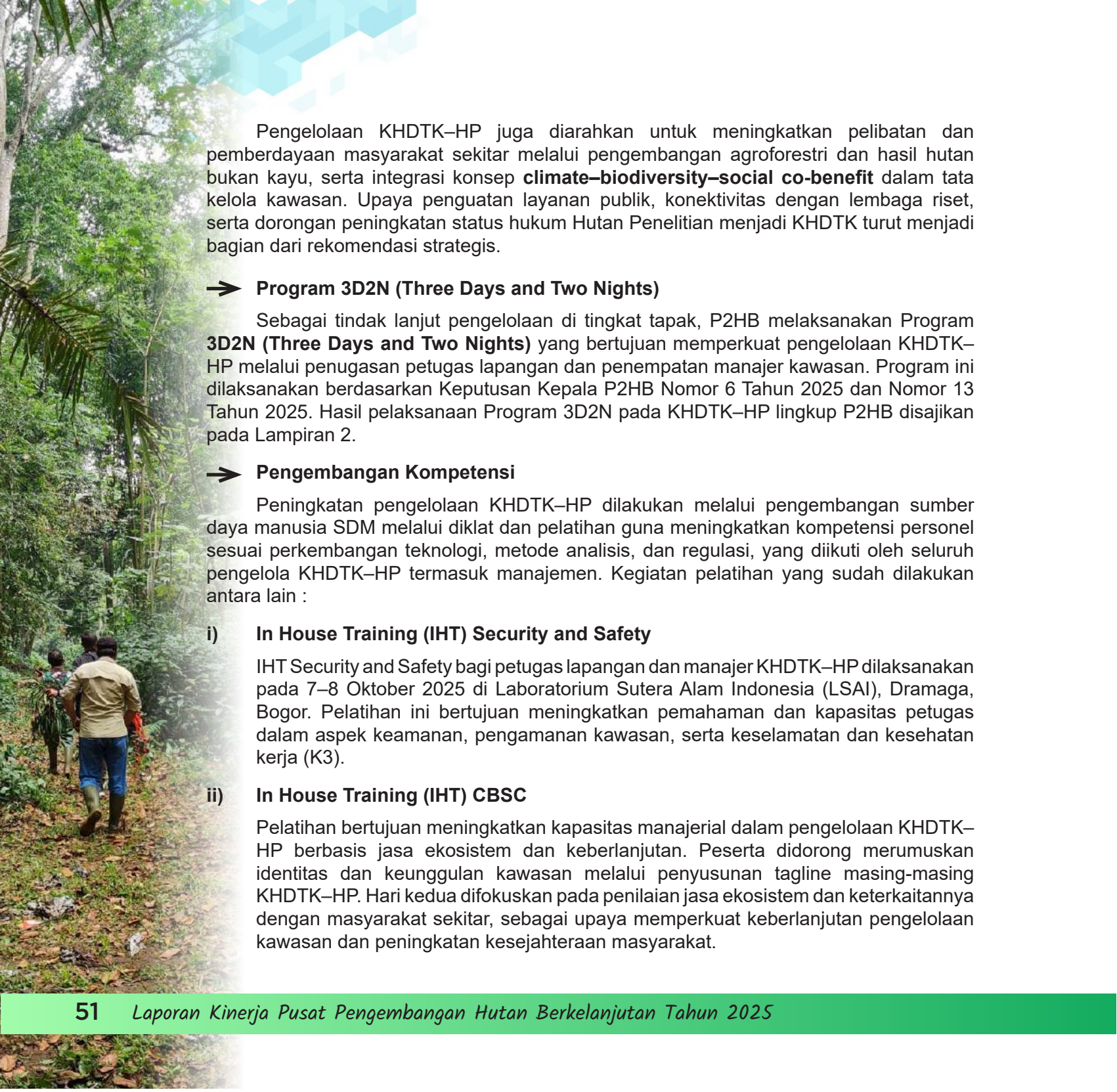
Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis biodiesel, Kementerian Kehutanan menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan Hutan Penelitian (KHDTK-HP) sebagai salah satu lokus uji coba pelaksanaan program tersebut. Dalam konteks ini, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) melaksanakan pengelolaan KHDTK- HP sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pembangunan kehutanan. Kegiatan pengelolaan KHDTK-HP P2HB tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Kegiatan pengelolaan KHDTK-HP P2HB tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Waktu & Lokasi	Peserta/ Stakeholder	Fokus Utama dan Hasil
1	Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK-HP	10 Juli 2025, Kampus Gunung Batu	BRIN, IPB, Kementan, Perum Perhutani	Membahas 10 unit KHDTK-HP; merumuskan arah strategis (ekowisata, konservasi genetik, metadata terintegrasi, dan pemberdayaan masyarakat).
2	Program 3D2N (Three Days and Two Nights)	Tahun 2025 (Tingkat Tapak)	Petugas Lapangan & Manajer Kawasan	Penguatan pengelolaan lapangan melalui penugasan resmi berdasarkan SK Kepala P2HB No.6 & 13 Tahun 2025.
3	IHT Security and Safety	7–8 Oktober 2025, LSAI Dramaga, Bogor	Petugas Lapangan & Manajer KHDTK-HP	Peningkatan kapasitas dalam aspek keamanan kawasan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4	IHT CBSC (Climate-Biodiversity-Social Co-benefit)	Tahun 2025	Seluruh Pengelola & Manajemen	Pengelolaan berbasis jasa ekosistem; ; penilaian dampak sosial dan keberlanjutan.
5	FGD Pengelolaan KHDTK Benakat	Tahun 2025 (Tindak lanjut Permenhut 403/2025)	Balai PS Palembang, BPDAS Musi, BKSDA Sumsel, PT Musi Hutan Persada	Penyelarasan arah KHDTK Benakat sebagai Green Corridor Gajah Sumatera dan pembentukan Forum Komunikasi Semangus-Benakat.
6	Ekspose Tahunan Pengelolaan KHDTK dan HP	Akhir Tahun 2025	Lingkup internal P2HB & Stakeholder terkait	Evaluasi capaian 9 KHDTK & 5 HP; pengembangan kawasan menuju Center of Excellence dan penguatan aspek legalitas/PNBP.

➔ **Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK-HP**

Hasil rapat menghasilkan sejumlah arah strategis pengelolaan KHDTK-HP, antara lain pemantapan tujuan dan sasaran jangka menengah dan panjang, penguatan keunikan dan potensi masing-masing kawasan, serta penetapan prioritas pengelolaan yang mencakup pengembangan ekowisata edukatif, konservasi sumber daya genetik, serta dukungan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, dirumuskan pula strategi pemanfaatan metadata kawasan dalam sistem informasi terintegrasi, penguatan transparansi dan evaluasi berbasis data, serta perluasan jejaring kolaborasi dan pendanaan multipihak.



Pengelolaan KHDTK–HP juga diarahkan untuk meningkatkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pengembangan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu, serta integrasi konsep **climate–biodiversity–social co-benefit** dalam tata kelola kawasan. Upaya penguatan layanan publik, konektivitas dengan lembaga riset, serta dorongan peningkatan status hukum Hutan Penelitian menjadi KHDTK turut menjadi bagian dari rekomendasi strategis.

➔ **Program 3D2N (Three Days and Two Nights)**

Sebagai tindak lanjut pengelolaan di tingkat tapak, P2HB melaksanakan Program **3D2N (Three Days and Two Nights)** yang bertujuan memperkuat pengelolaan KHDTK–HP melalui penugasan petugas lapangan dan penempatan manajer kawasan. Program ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala P2HB Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 13 Tahun 2025. Hasil pelaksanaan Program 3D2N pada KHDTK–HP lingkup P2HB disajikan pada Lampiran 2.

➔ **Pengembangan Kompetensi**

Peningkatan pengelolaan KHDTK–HP dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia SDM melalui diklat dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi personel sesuai perkembangan teknologi, metode analisis, dan regulasi, yang diikuti oleh seluruh pengelola KHDTK–HP termasuk manajemen. Kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan antara lain :

i) **In House Training (IHT) Security and Safety**

IHT Security and Safety bagi petugas lapangan dan manajer KHDTK–HP dilaksanakan pada 7–8 Oktober 2025 di Laboratorium Sutera Alam Indonesia (LSAI), Dramaga, Bogor. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas dalam aspek keamanan, pengamanan kawasan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

ii) **In House Training (IHT) CBSC**

Pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan KHDTK–HP berbasis jasa ekosistem dan keberlanjutan. Peserta didorong merumuskan identitas dan keunggulan kawasan melalui penyusunan tagline masing-masing KHDTK–HP. Hari kedua difokuskan pada penilaian jasa ekosistem dan keterkaitannya dengan masyarakat sekitar, sebagai upaya memperkuat keberlanjutan pengelolaan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

➔ **Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan KHDTK Benakat**

FGD Pengelolaan KHDTK Benakat dilaksanakan sebagai tindak lanjut Permenhut Nomor 403 Tahun 2025 yang menetapkan P2HB sebagai pengampu KHDTK Benakat. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan arah dan perkembangan pengelolaan kawasan.



FGD melibatkan pemangku kepentingan terkait dan menghasilkan kesepakatan pengelolaan KHDTK Benakat sebagai green corridor Gajah Sumatera dengan pendekatan kolaboratif, mencakup penguatan kelembagaan, penataan ekologis, rehabilitasi DAS, serta pemulihan ekosistem. Tindak lanjut diarahkan pada penguatan koordinasi lintas pihak, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan Forum Komunikasi Semangus-Benakat.

➔ **Ekspose Tahunan Pengelolaan KHDTK dan HP**

Ekspose Tahunan Pengelolaan KHDTK dan HP lingkup P2HB dilaksanakan sebagai forum evaluasi capaian pengelolaan, pembelajaran praktik baik, serta perumusan arah pengelolaan tahun berjalan dan perencanaan tahun berikutnya. Ekspose memaparkan hasil pengelolaan 9 KHDTK dan 5 HP sepanjang tahun 2025.

Hasil ekspose menunjukkan penguatan peran KHDTK dan HP sebagai living laboratory yang mendukung riset, pendidikan, pelatihan, inovasi, serta pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan.

Gambar 21. Pengelolaan KHDTK - HP P2HB Tahun 2025

Fokus pengelolaan diarahkan pada pematapan rencana pengelolaan, pemetaan potensi dan keunggulan kawasan, serta pengembangan fungsi kawasan menuju Center of Excellence.

Ekspose juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengelola melalui kejelasan mandat, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan kolaborasi multipihak.

Sebagai tindak lanjut, dirumuskan rekomendasi teknis, kelembagaan, dan legalitas yang meliputi pemutakhiran dokumen rencana pengelolaan, optimalisasi pengamanan dan pemanfaatan kawasan berbasis teknologi, penguatan basis data, pengembangan model pengelolaan berkelanjutan, peningkatan layanan dan PNBP, serta penguatan kepastian hukum pengelolaan KHDTK dan HP.

b. Capaian Kinerja Layanan

Untuk capaian kinerja layanan, antara lain pada Laboratorium. P2HB mengelola 7 (tujuh) layanan laboratorium kehutanan yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu : Laboratorium Terpadu terdiri dari 4 layanan laboratorium dan Laboratorium Lapangan terdiri dari 3 layanan laboratorium. Kegiatan utama laboratorium memberikan layanan pengujian laboratorium yang telah menghasilkan pemasukan PNBP. Berdasarkan survei pelanggan yang dilakukan telah mencapai predikat sangat baik dengan nilai 95.

Tabel 14. Ringkasan Struktur dan Kegiatan Layanan Laboratorium P2HB TA 2025

Aspek Pengelolaan	Kelompok / Jenis	Detail Komponen	Deskripsi & Tujuan
Struktur Layanan	1. Laboratorium Terpadu	4 Layanan Laboratorium	Fokus pada pengujian sampel terstandarisasi (Kimia, Anatomi, Fisik, Mekanik).
	2. Laboratorium Lapangan	3 Layanan Laboratorium	Fokus pada teknologi terapan (Sutera Alam/LSAI, Introf-CC, Penangkaran Rusa).
Kelompok Kegiatan Utama	1. Rapat Koordinasi	Koordinasi Stakeholder	Tahun 2025 Memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi (IPB, UNB), riset (BRIN), dan pelaku usaha.
	2. Proses Layanan	Operasional & Mutu	Pelaksanaan uji sampel, pencapaian PNBP, sertifikasi KAN terakreditasi ISO 17025/2017, dan survei kepuasan pelanggan (IKM).
	3. Expose Tahunan	Akuntabilitas & Evaluasi	Penyampaian capaian kinerja, transparansi, dan perumusan rekomendasi transformasi strategis

➔ Rapat Koordinasi Laboratorium Kehutanan

Rapat Koordinasi Laboratorium Kehutanan P2HB melibatkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan pelaku usaha guna memperkuat sinergi serta komitmen dalam tata kelola laboratorium yang efisien, akuntabel, dan mendukung tugas dan fungsi organisasi. Dari Kementerian Kehutanan, hadir BP2SDM, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, dan Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan. Dukungan akademik datang dari Fakultas Kehutanan IPB dan Fakultas Kehutanan UNB yang berkontribusi melalui kajian ilmiah dan pengembangan pengetahuan. Sementara itu, BRIN menghadirkan jajaran pusat riset yang relevan, meliputi Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk; Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani; Pusat Riset Mikrobiologi Terapan; Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi dan Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah yang memperkuat aspek repositori dan integrasi data ilmiah.



Gambar 22. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Kehutanan

➔ Proses Layanan Laboratorium

Laboratorium Terpadu P2HB menyelenggarakan layanan pengujian terstandarisasi, meliputi identifikasi kayu dan koleksi, uji keawetan, analisis fisik, mekanik, dan kimia produk hasil hutan. Laboratorium Kimia Hasil Hutan dan Laboratorium Anatomi telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, serta secara berkala melaksanakan uji banding dan surveilans KAN sebagai bagian dari penjaminan mutu.

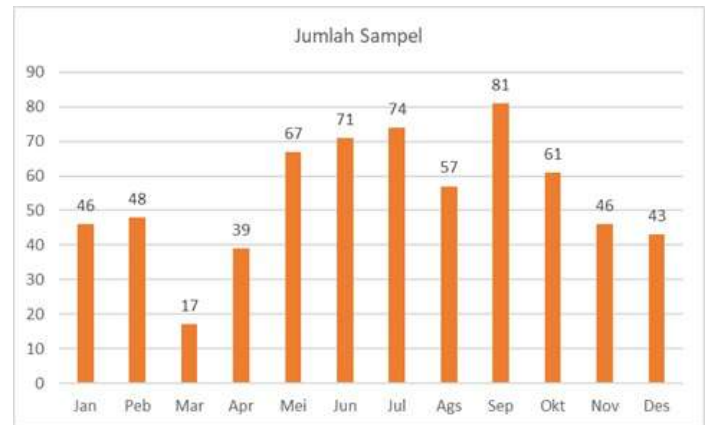
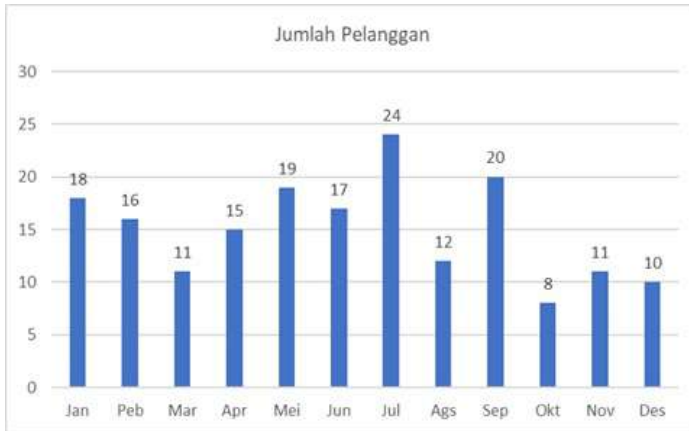


Gambar 24. Sertifikat Akreditasi (KAN) Laboratorium Terpadu - P2HB

Gambar 23. Kegiatan Layanan Laboratorium

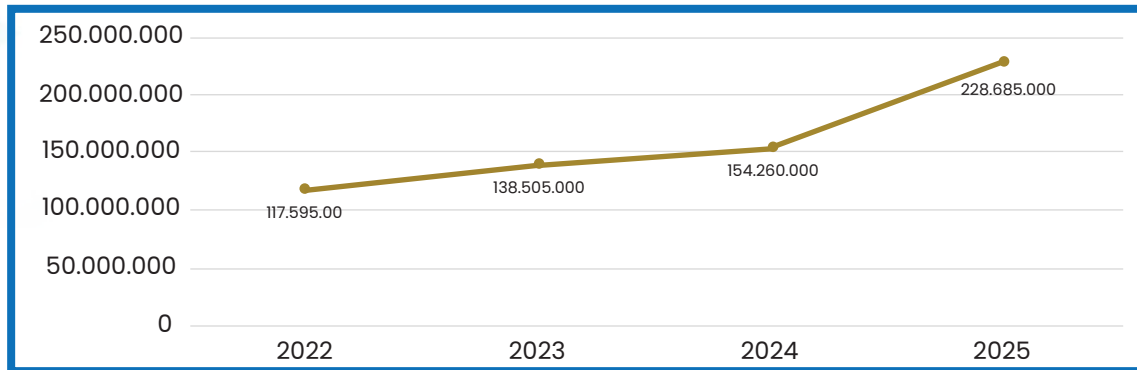
Sementara itu, Laboratorium Lapangan mendukung pengembangan teknologi terapan melalui Laboratorium Sutera Alam Indonesia (LSAI) yang berkontribusi pada PNBP antara lain menyediakan layanan berupa penjualan kokon segar dan telur ulat sutera, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan industri persuteraan tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh bahan baku berkualitas; Laboratorium Indonesian Tropical Forest Culture Collection (Introf-CC) sebagai bank genetik mikroorganisme hutan tropis dengan koleksi ±4.773 isolat (bakteri, khamir, jamur) berpotensi untuk bio-inovasi seperti bioremediasi, bioetanol, dan pupuk hayati; serta Penangkaran Rusa HP Dramaga untuk penelitian satwa dilindungi (Rusa Timor, Rusa Sambar, dan Rusa Bawean).

Laboratorium terpadu berperan sebagai unit pelayanan publik dengan menyelenggarakan layanan pengujian sampel melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang tahun 2025, Laboratorium Terpadu melayani 181 pelanggan dengan 650 sampel uji, didominasi pengujian proksimat dan nilai kalor, dengan mayoritas pengguna berasal dari kalangan mahasiswa. Data layanan pengujian pada tahun 2025 disajikan pada gambar 24.



Gambar 25. Data Layanan Uji Laboratorium Terpadu T.A 2025

Layanan ini menghasilkan PNBP sebesar Rp. 228.685.000, melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Gambar 25.



Gambar 26. PNPB Laboratorium Terpadu Tahun 2022 – 2025

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, layanan uji laboratorium memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 93,76 dengan kategori A (Sangat Baik / 4 poin), yang menunjukkan bahwa pelayanan telah memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek digitalisasi layanan dan percepatan waktu pelayanan.

Melalui penyelenggaraan layanan uji produk kehutanan, P2HB berkontribusi dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan hutan berkelanjutan. Layanan laboratorium berperan dalam menjamin mutu, keamanan, dan kesesuaian standar produk kehutanan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta mendukung sertifikasi, audit, dan perumusan kebijakan pengelolaan hutan. Dengan demikian, layanan ini turut memperkuat tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, transparan, dan berdaya saing.

Gambar 27. Kegiatan Pengujian Laboratorium Terpadu



➔ Peningkatan Kapasitas Laboratorium dan Sistem Mutu

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan sistem mutu, P2HB melaksanakan pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017, surveilans akreditasi, kalibrasi peralatan, dan pemeliharaan fasilitas. Secara keseluruhan, layanan laboratorium P2HB berkontribusi signifikan dalam menjamin mutu produk kehutanan, mendukung sertifikasi, penegakan hukum, serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Upaya peningkatan dan penjaminan mutu laboratorium juga didukung melalui kalibrasi peralatan serta pemeliharaan fasilitas laboratorium secara berkelanjutan guna memastikan keandalan hasil pengujian dan keberlanjutan layanan laboratorium.



Gambar 28. Kegiatan Pelatihan Dasar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025/2017

➔ Expose Tahunan Layanan Laboratorium Kehutanan

Expose Tahunan Layanan Laboratorium Kehutanan diselenggarakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja laboratorium. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan capaian kinerja kepada pemangku kepentingan serta menjangkau masukan guna meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan laboratorium, dan sinergi dalam mendukung pengembangan hutan berkelanjutan. Expose dihadiri oleh unsur pemerintah, lembaga riset, akademisi, mitra swasta, dan internal P2HB. Pada kegiatan tersebut, Kepala Laboratorium P2HB memaparkan capaian kinerja dengan tema “Laboratorium P2HB – Menuju Pengelolaan yang Efisien serta Optimalisasi Manfaat”, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Rekomendasi Strategis Transformasi Laboratorium P2HB

Program Prioritas	Fokus Utama & Strategi	Target Output/ Hasil
Peningkatan Layanan & SDM	Efisiensi layanan, penambahan jumlah laboran sesuai kompetensi, uji banding, legalitas rusa, dan digitalisasi layanan.	Kecepatan layanan, SOP Introf-CC, pembangunan demplot murbei, dan pembuatan e-Flyer/website SIMORI.
Modernisasi & Fasilitas	Modernisasi alat laboratorium, perluasan ruang lingkup akreditasi, skema shared facility, dan riset kolaboratif.	Penambahan parameter akreditasi dan pengadaan instrumen laboratorium yang kritis.
Pusat Rujukan Nasional	Integrasi penuh rantai nilai kehutanan agar menjadi pusat rujukan di tingkat nasional.	Terwujudnya laboratorium rujukan untuk kayu, karbon, dan biomaterial, serta peningkatan PNBPNP.
Branding Layanan	Membangun citra (branding) layanan laboratorium unggulan P2HB sebagai laboratorium rujukan utama.	Terciptanya loyalitas dan kepuasan pengguna layanan laboratorium.
Penguatan Regulasi	Penyusunan landasan hukum yang kuat sebagai dasar tata kelola laboratorium.	Terbitnya Permen atau SK Setjen yang mengatur secara khusus tentang Laboratorium Kehutanan.

Expose Tahunan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan menegaskan peran strategis laboratorium dalam mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi produk dan layanan laboratorium menjadi kunci dalam mendukung kebijakan teknis, pemenuhan standar, dan kebutuhan industri. Melalui kolaborasi, digitalisasi layanan, dan penguatan branding, P2HB diarahkan menjadi pusat rujukan nasional berbasis bukti ilmiah yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.

B. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja P2HB Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Pusat. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja P2HB Tahun 2025, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 (satu) IKK dengan sistematika pembahasan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja P2HB berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian/ Realisasi	% Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1. Stakeholder Perspective						
1	Pengembangan Hutan Berkelanjutan untuk mendukung Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat	1.1	Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	70%	70,45%	100,6%
2. Customer Perspective						
2	Perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang spesifik	2.1	Persentase keselarasan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang dihasilkan	85%	86,36%	101,6%
3	Fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	3.1	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
		3.2	Tingkat Pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan yang digunakan	80%	96,66%	120,8%
3. Internal Process						
4	Pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus dalam rangka penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	4.1	Tingkat kualitas pengelolaan laboratorium dan KHDTK	80%	80%	100%
5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hutan berkelanjutan	5.1	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan pengembangan hutan berkelanjutan	4 Poin	4 Poin	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian/ Realisasi	% Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4. Learning and Growth						
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif	6.1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	4 poin	3	75%
7	Penguatan akuntabilitas kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif, efisien dan akuntabel	7.1	Nilai SAKIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	90-100 (Sangat Baik)	87,83%	97,6%
		7.2	Nilai Maturitas SPIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	3,8 poin	3,7 poin	97,4%
		7.3	Persentase penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	100%	99,98%	99,98%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat, baik dengan sebagian besar indikator tercapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan satu indikator masih memerlukan penguatan pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Capaian kinerja tersebut mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan hutan berkelanjutan melalui pendekatan Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process, serta Learning and Growth. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut :

a. Stakeholder Perspective

Pada Stakeholder Perspective, sasaran strategis Pengembangan Hutan Berkelanjutan diukur melalui indikator Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis. Target sebesar 70% berhasil

dicapai dengan realisasi **70,45%**, yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan teknis telah efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati

Pengukuran kinerja dilakukan melalui evaluasi kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) yang menghasilkan rekomendasi pembaruan kebijakan pengelolaan PUP pada PBPH sebagaimana diatur dalam SK.237 Tahun 1995. Rincian perhitungan IKK Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis P2HB Tahun 2025 disajikan pada tabel 7.

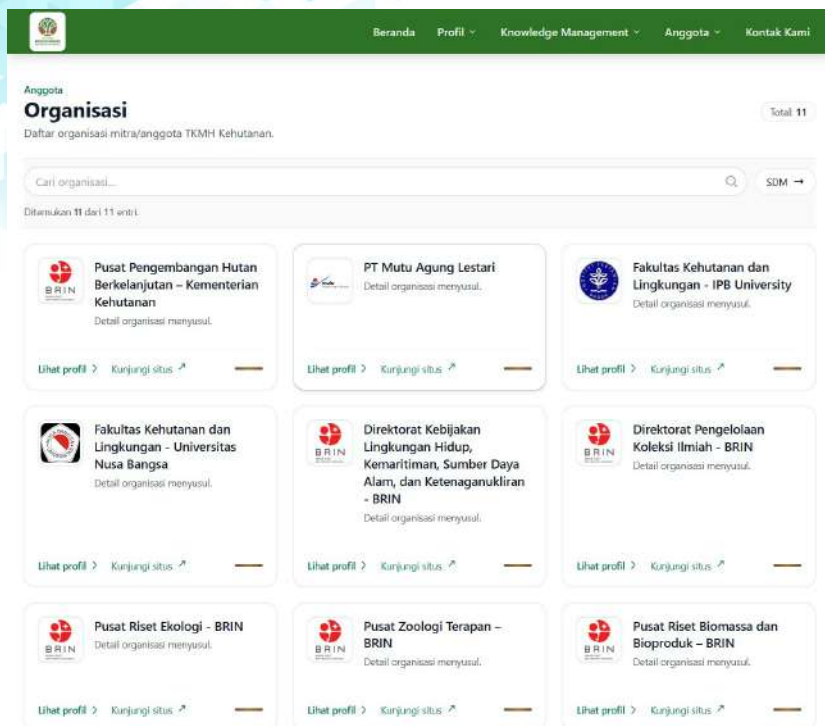
b. Customer Perspective

Pada Customer Perspective, sasaran perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang spesifik diukur melalui indikator **Persentase Keselarasan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang Dihasilkan**, khususnya pada kegiatan Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan. Capaian indikator tersebut mencapai **86,36%** dari target **85%**, yang menunjukkan bahwa formulasi kebijakan yang dihasilkan telah selaras dengan kebutuhan dan sasaran pengembangan hutan berkelanjutan. Uraian lebih lengkap disajikan pada Gambar 13.

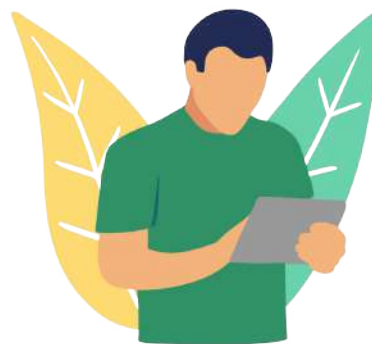
Selain itu, pada sasaran **Fasilitas Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan**, indikator **Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Fasilitas** terealisasi sebanyak **142 lembaga**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **5 lembaga**. Indikator **Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Rekomendasi Kebijakan**, yang mencakup *Technical Knowledge Management Hub* (TKMH), juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu sebesar **96,66 persen**, melampaui target **80 persen**. Penjelasan mengenai TKMH disajikan pada Gambar 15.

Sepanjang Tahun 2025, P2HB melayani 142 lembaga yang mendapatkan fasilitas penerapan pengembangan hutan berkelanjutan, yang rinciannya disajikan pada **Lampiran 6**. Adapun dokumentasi beberapa organisasi pengguna fasilitas penerapan PHB melalui laman TKMH P2HB disajikan pada gambar berikut.





“Pada gambar disamping bisa diakses di website TKMH Kehutanan (p2hb.kehutanan.go.id/tkmh-kehutanan)”



Gambar 29. Organisasi Pengguna Fasilitas Penerapan PHB melalui website TKMH P2HB

c. Internal Process

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik karena menyediakan pelayanan jasa dan pelayanan administratif yang didukung oleh laboratorium pengujian serta pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK/HP).

Pelayanan publik P2HB meliputi **pelayanan laboratorium kehutanan, pelayanan pemanfaatan KHDTK/HP, dan pelayanan administrasi pendukung**. Pada perspektif Internal Process, sasaran Pengelolaan Laboratorium dan KHDTK diukur melalui indikator Tingkat Kualitas Pengelolaan Laboratorium dan KHDTK dengan capaian sebesar 80 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan (selengkapnya disajikan pada **Lampiran 2**). Selanjutnya, indikator Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan pengembangan hutan berkelanjutan yang diukur melalui nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 4 poin, sesuai dengan target kinerja.

Pelaksanaan SKM dilakukan pada periode Januari hingga Oktober 2025 terhadap pengguna fasilitas P2HB, khususnya pengguna fasilitas pengujian sampel Laboratorium Terpadu. Pada Tahun 2025, SKM baru dilaksanakan terhadap pelayanan laboratorium kehutanan khususnya Laboratorium Terpadu, sedangkan SKM terhadap pelayanan pemanfaatan KHDTK/HP dan pelayanan administrasi pendukung belum dilaksanakan karena P2HB merupakan unit kerja yang relatif baru dan sebagian kegiatan pelayanan masih dalam tahap awal. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) selaku pengelola Pelayanan Publik (Yanlik), pelaksanaan SKM terhadap seluruh jenis pelayanan P2HB akan dilengkapi dan diintegrasikan dalam penerapan standar pelayanan publik pada Tahun 2026.

d. Learning and Growth

Pada **Learning and Growth**, sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN. Indikator ini mensyaratkan nilai IP ASN berada pada angka 91 ke atas dengan nilai **4 Poin**. Adapun nilai IP ASN P2HB masih berada pada rentang 81–90 sehingga berada pada **Poin 3** dengan kategori **Baik**. Belum tercapainya target indikator tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah ASN serta penyesuaian kebijakan organisasi seiring dengan perubahan nomenklatur.

Sementara itu, sasaran **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) pada tahun berjalan masih mengacu pada capaian Sekretariat Jenderal, mengingat P2HB merupakan unit organisasi yang baru dibentuk. Capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa nilai SAKIP P2HB mencapai **87,83**, mendekati rentang target **90–100 (kategori Sangat Baik)**. Selanjutnya, nilai Maturitas SPIP mencapai **3,7 poin** dari target **3,8 poin**, serta persentase penyerapan anggaran sebesar **99,98 persen**, yang mencerminkan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil di atas, penilaian efektivitas kebijakan teknis menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan. Sebagian besar indikator menunjukkan capaian di atas 90%, dengan capaian tertinggi sebesar 120,8% pada indikator Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Rekomendasi Kebijakan yang Digunakan. Capaian yang melebihi target tersebut disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang menjangkau lebih banyak output dibandingkan dengan rencana awal.

B. CAPAIAN TARGET KINERJA LIMA TAHUNAN (Renstra 2025-2029)

Capaian Target Kinerja Lima Tahunan (Renstra 2025–2029) merupakan ringkasan capaian kinerja P2HB pada tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir Renstra dan indikator awal yang menunjukkan tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan P2HB dalam mencapai sasaran strategis secara bertahap. Capaian Target Kinerja Lima Tahunan (Renstra 2025-2029), disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Capaian Target Kinerja Lima Tahunan (Renstra 2025-2029)

SASARAN	IKK/ KRO	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Layanan Dukungan Tugas Teknis Kementerian	Indeks implementasi kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional	5 poin	1 poin	20%
Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	78%	70,45%	90,32
	ABV 001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	13 rekomendasi	8 rekomendasi	61,54%
	CDK-OP 001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	14 unit	14 unit	100%
	RDK-OP 001. Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	7 layanan	7 layanan	100%
Rata-rata kinerja				74,37%

Tabel tersebut menunjukkan capaian kinerja P2HB Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029. Pada sasaran *Meningkatnya Layanan Dukungan Tugas Teknis Kementerian*, capaian **Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029** mencapai **1 poin** dari target akhir **5 poin**, atau **20%**, yang mencerminkan progres awal yang sesuai dengan tahapan pencapaian target lima tahunan.

Pada sasaran Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, capaian **Efektivitas penerapan kebijakan teknis** mencapai **70,45%** dari target akhir Renstra **78%**, atau setara **90,32%**. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan teknis telah berjalan cukup efektif pada tahun pertama Renstra, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada periode perencanaan berikutnya.

Dari sisi komponen output, **Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan (ABV 001)** terealisasi sebanyak **8 rekomendasi** dari target akhir **13 rekomendasi** (61,54%). Capaian ini menggambarkan bahwa sebagian target output telah dipenuhi dan akan dilanjutkan secara bertahap hingga akhir periode Renstra. Sementara itu, **KHDTK Litbang Kehutanan Lestari (CDK-OP 001)** dan **Layanan Laboratorium Kehutanan (RDK-OP 001)** masing-masing telah mencapai **100%**, menunjukkan konsistensi kinerja pada output yang bersifat operasional dan layanan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Renstra hingga Tahun 2025 mencapai **74,37%**, yang menunjukkan bahwa kinerja P2HB berada pada jalur yang **on the track** sebagai fondasi pencapaian target akhir Renstra 2025–2029, dengan fokus penguatan pada peningkatan efektivitas kebijakan dan percepatan pemenuhan rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan.

C. CAPAIAN TARGET KINERJA TERHADAP TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Target akhir IKK “Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati” dalam Renstra P2HB 2025–2029 adalah 5 poin pada tahun 2029. Capaian tahun 2025 sebesar 1 poin menunjukkan masih terdapat gap 4 poin menuju target akhir Renstra. Namun demikian, capaian tersebut masih on the track karena telah sesuai dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 1 poin. Ke depan, perhatian perlu difokuskan pada penguatan aspek implementasi kebijakan, khususnya melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, pelaksanaan di lapangan, serta mekanisme pengawasan.

P2HB merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan yang melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran program

“Meningkatnya Layanan Dukungan Tugas Teknis Kementerian.” Pada periode 2025–2029, sasaran kegiatan diukur melalui IKK tersebut, yang merupakan indikator baru, sehingga belum tersedia data pembandingan dari tahun sebelumnya.

D. BENCHMARKING KINERJA

P2HB melaksanakan benchmarking dengan Pusat Pengembangan (Pusbang) lingkup Setjen, untuk mendapatkan gambaran capaian indikator pelaksanaan anggaran dan capaian indikator kegiatan. Masing-masing instansi memiliki karakteristik yang berbeda dalam pencapaian target kinerja.

Perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian IKK “Indikator Kinerja Kegiatan” antar Pusbang dan Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis, dengan indikator penilaian Implementasi Kebijakan dan Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan yang merupakan bagian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional” dengan IKP “Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)”. Hasil Benchmarking Capaian Kinerja dengan Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (P2SEMH), Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (P2MABHK), dan Pusat Kebijakan Strategis (Pusjakstra), disajikan pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan	Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi	Pusat Kebijakan Strategis
1	Indeks implementasi kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati Hidup Target:70% Realisasi: 70,45% Persentase: 100,6%	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan termasuk cadangan pangan, energi, dan peningkatan kemandirian desa Target: 70% Realisasi: 70,3% Pesentase: 100,4%	Efektivitas penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan Target:70% Realisasi: 70,1% Persentase: 100,1%	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kehutanan Target: 74 Poin Realisasi: 92,62 Poin Persentase: 125%

No	Indikator Kinerja	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan	Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi	Pusat Kebijakan Strategis
2	Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (BAB)	Tidak memiliki indikator tersebut	Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Target: 5 Lembaga Realisasi: 5 Lembaga Persentase: 100%	Tidak memiliki indikator tersebut	Tidak memiliki indikator tersebut
3	Rancangan kebijakan teknis untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan (ABV)	Rancangan kebijakan teknis untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan (ABV) Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan Target: 8 Rekomendasi Kebijakan Realisasi: 8 Rekomendasi Kebijakan Persentase: 100%	Rancangan kebijakan teknis untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan Target: 6 Rekomendasi Kebijakan Realisasi: 8 Rekomendasi Kebijakan Persentase: 133,3%	Rekomendasi dan Model Untuk Peningkatan Ketahanan Bencana Hidrometeorologi Kehutanan dan Iklim Target: 8 Rekomendasi/Model Realisasi: 8 Rekomendasi/Model Persentase: 100%	Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan Target: 6 Rekomendasi Kebijakan Realisasi: 6 Rekomendasi Kebijakan Persentase: 100%
4	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (CDK)	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan Target: 14 unit Realisasi: 14 Unit Persentase: 100%	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Target: 8 Unit Realisasi: 8 Unit Persentase: 100%	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari dan Mandiri Bidang Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Target: 7 Unit Realisasi: 7 Unit Persentase: 100%	Tidak memiliki indikator tersebut

No	Indikator Kinerja	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan	Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi	Pusat Kebijakan Strategis
5	Layanan Laboratorium Kehutanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (RDK)	Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan Target: 7 Unit Realisasi: 7 Unit Persentase: 100%	Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Target: 1 Unit Realisasi: 1 Unit Persentase: 100%	Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan Target: 1 Unit Realisasi: 1 Unit Persentase: 100%	Tidak memiliki indikator tersebut

(sumber : Olahan data dari P2HB, P2SEMH, P2MABHK, Pusjakstra (2025))

Tabel 18. Benchmarking Capaian Kinerja dengan P2SEMH, P2MABHK, dan Pusjakstra

Berdasarkan tabel di atas, hasil benchmarking capaian kinerja menunjukkan bahwa secara umum seluruh pusat pengembangan di lingkungan Sekretariat Jenderal telah mencapai target indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2025. Pada **indikator Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025–2029**, seluruh unit mencatat realisasi di atas target 70 persen, dengan capaian berkisar antara 100,1 persen hingga 125 persen.

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) mencatat realisasi sebesar **70,45 persen** atau **100,6 persen dari target**, yang menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kebijakan teknis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati telah berjalan sesuai rencana. Capaian ini relatif sebanding dengan Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (100,4 persen) serta Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (100,1 persen). Sementara itu, Pusat Kebijakan Strategis mencatat capaian tertinggi dengan persentase **125 persen**, yang didorong oleh tingginya nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kehutanan.

Pada indikator output kebijakan (ABV), seluruh unit menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian minimal 100 persen. P2HB berhasil merealisasikan **8 rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan** sesuai target, sedangkan Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan bahkan melampaui target dengan capaian 133,3 persen. Hal ini mencerminkan produktivitas perumusan kebijakan teknis yang relatif merata antar unit kerja.

Untuk indikator pengelolaan **KHDTK Litbang Kehutanan**, seluruh unit yang memiliki indikator tersebut mencapai realisasi **100 persen**, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan

kawasan sebagai laboratorium lapangan pendukung riset dan pengembangan. P2HB mengelola **14 unit KHDTK** sesuai target, lebih banyak dibandingkan unit lain, yang menunjukkan cakupan pengelolaan kawasan yang relatif luas.

Pada indikator **layanan laboratorium kehutanan**, seluruh unit yang memiliki indikator juga mencapai target secara penuh. P2HB berhasil merealisasikan **7 layanan laboratorium kehutanan**, yang menunjukkan kapasitas layanan teknis yang lebih beragam dibandingkan unit lain.

Secara keseluruhan, hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kinerja P2HB berada pada tingkat yang **setara dan kompetitif** dibandingkan pusat pengembangan lainnya, khususnya dalam implementasi kebijakan teknis, pengelolaan KHDTK, serta penyediaan layanan laboratorium. Perbedaan capaian antar unit lebih disebabkan oleh karakteristik mandat, ruang lingkup tugas, dan jenis indikator kinerja yang dimiliki masing-masing unit kerja.

E. UPAYA DAN KENDALA



Dalam pencapaian sasaran meningkatkan dukungan layanan teknis dan IKK “Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Upaya

Dalam pelaksanaan kegiatan P2HB Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain penyesuaian kebijakan akibat perubahan kelembagaan dan tugas serta fungsi, keterbatasan fleksibilitas anggaran pasca kebijakan efisiensi, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya dan sarana pendukung. Kendala tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian pelaksanaan sebagian kegiatan, namun tidak menghambat pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

b. Kendala

Kendala utama yang dihadapi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) pada tahun 2025 berkaitan dengan proses restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan pasca pembentukan Kementerian Kehutanan. Sebagai unit kerja baru di bawah Sekretariat

Jenderal dengan tugas dan fungsi yang baru, P2HB pada awal tahun masih berfokus pada penataan organisasi, SDM, serta inventarisasi aset, termasuk KHDTK dan laboratorium, sehingga pelaksanaan tugas secara optimal baru berjalan efektif sejak pertengahan tahun 2025.

Pelaksanaan dukungan teknis pengelolaan KHDTK juga menghadapi kendala akibat sebaran lokasi yang luas serta tidak adanya unit kerja teknis vertikal di daerah pasca perubahan kelembagaan. Kondisi ini diperkuat dengan keterbatasan SDM dan sarana prasarana, baik dalam pengelolaan KHDTK maupun layanan laboratorium kehutanan, yang masih dipenuhi secara bertahap sesuai dengan peta jalan pengembangan yang ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan non operasional P2HB baru dapat dilakukan secara optimal pada Semester II Tahun 2025, seiring dengan terbukanya anggaran setelah penataan organisasi selesai. Kendala lainnya adalah keterlambatan pelaksanaan pengukuran Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2025, mengingat indikator tersebut merupakan indikator baru yang memerlukan penyepakatan metodologi, aspek, dan bobot penilaian terlebih dahulu.

F. OUTCOME

Pelaksanaan kegiatan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun Anggaran 2025 menghasilkan outcome berupa meningkatnya efektivitas penerapan kebijakan teknis pembangunan kehutanan melalui penguatan pengelolaan KHDTK, peningkatan kualitas dukungan teknis laboratorium kehutanan, serta penguatan kerangka kebijakan teknis di tingkat nasional dan daerah. Secara khusus, outcome yang dicapai meliputi:

01

Meningkatnya efektivitas pengelolaan KHDTK Litbang Kehutanan lingkup P2HB, tercermin dari dukungan teknis pengelolaan kawasan, penugasan petugas lapangan, serta penguatan tata kelola di tingkat tapak.

02

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan teknis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi hasil hutan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

03

Meningkatnya kualitas layanan laboratorium kehutanan, yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan eviden ilmiah.

04

Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan kehutanan.

G. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus :

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Persentase Capaian Keuangan Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Capaian Kinerja Tahun Berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Berdasarkan rumus diatas, maka perbandingan persentase capaian efisiensi penggunaan sumber daya pada P2HB disajikan pada tabel berikut.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(5)
Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati Hidup	8 R	8 R	100%	Rp. 1.239.800.000	Rp. 1.238.876.016	99,93%	0,9993
		14 unit KDTK	14 unit KHDTK	100%	Rp. 765.807.000	Rp. 765.613.705	99,97%	0,9997
		7 Layanan Lab.	7 Layanan Lab.	100%	Rp. 491.235.000	Rp. 491.187.006	99,99%	0,9999
		1 Layanan Perkantoran	1 Layanan Perkantoran	100%	Rp. 5.522.896.000	Rp. 5.522.457.677	99,99%	0,9999

Catatan: Keterangan: < 1=efisien, >1 = tidak efisien, R = Rekomendasi

Tabel 19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel diatas jumlah rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya adalah 0,9998 = 1 (satu). Karena penggunaan sumber daya = 1 (satu), maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien.

H. REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN

Berdasarkan hasil penilaian IKK Tahun 2025, rekomendasi perbaikan ke depan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat” antara lain :

1. Penguatan kualitas rekomendasi kebijakan teknis

Meningkatkan kualitas dan ketajaman rekomendasi kebijakan teknis yang disusun P2HB agar lebih aplikatif, berbasis bukti, dan relevan dengan kebutuhan implementasi di tingkat tapak.



2. Peningkatan efektivitas diseminasi hasil kajian

Model yang digunakan adalah menyesuaikan dengan fungsi ekosistem KHDTK Haurbentes sebagai jasa penyedia barang (provisioning) dan fungsi ekosistem sebagai jasa budaya dengan menggunakan SNI 8014:2015 tentang Metode penilaian jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati.



3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan

Mendorong koordinasi yang lebih efektif antara P2HB dengan unit kerja Eselon I, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penerapan kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan.



4. Pengembangan mekanisme pemantauan dan umpan balik kebijakan

Model yang digunakan adalah menyesuaikan dengan fungsi ekosistem KHDTK Haurbentes sebagai jasa penyedia barang (provisioning) dan fungsi ekosistem sebagai jasa budaya dengan menggunakan SNI 8014:2015 tentang Metode penilaian jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati.



5. Pemanfaatan KHDTK dan laboratorium kehutanan sebagai wahana dukungan teknis

Mengoptimalkan pemanfaatan KHDTK dan laboratorium kehutanan sebagai sarana uji kebijakan, pembelajaran, dan penguatan dukungan teknis bagi pengembangan hutan berkelanjutan.



3.2 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARA

3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Dokumen penganggaran tahun 2025 terdiri dari dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Berdasarkan Pagu Indikatif tahun 2025, P2HB mendapat anggaran sebesar Rp.50.837.652.000 (Lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dimana di dalamnya mencakup anggaran balai-balai eks BSILHK. Sehubungan dengan perubahan instansi dan tusi P2HB, sesuai dengan Memorandum Sekretaris Jenderal No. M.10/Sekjen/Rocan/Ren.1/5/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Penataan Anggaran lingkup Sekretaris Jenderal Tahun 2025 Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.14.320.979.000,- dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp.6.698.853.000,- sehingga pagu efektif P2HB adalah sebesar Rp.7.622.126.000,-.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan didukung oleh sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Dalam Negeri. Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Kantor Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Nomor: SP DIPA-143.01.1.693521/2025, pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 14.718.591.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tabel 20. Kemajuan pelaksanaan anggaran tahun 2025

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	RM	5.946.708.000	5.945.871.422	99,99	836.578	0,01
2	PNBP	8.378.445.000	1.678.954.322	20,04	6.699.490.678	79,96
3	HLN	393.438.000	393.308.660	99,97	129.340	0,03
JUMLAH		14.718.591.000	8.018.134.404	54,48	6.700.456.596	45,52

Tabel 21. Kemajuan pelaksanaan anggaran setelah Efisiensi Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	RM	5.946.708.000	5.945.871.422	99,99	836.578	0,01
2	PNBP	1.679.592.000	1.678.954.322	99,96	637.678	0,04
3	HLN	393.438.000	393.308.660	99,97	129.340	0,03
JUMLAH		8.019.738.000	8.018.134.404	99,98	1.603.596	0,02

Selain melaksanakan mandat kegiatan dibawah program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, P2HB juga melaksanakan program Dukungan Manajemen. Dalam hal ini P2HB mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal (terlampir pada tabel 22).

Tabel 22. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2025

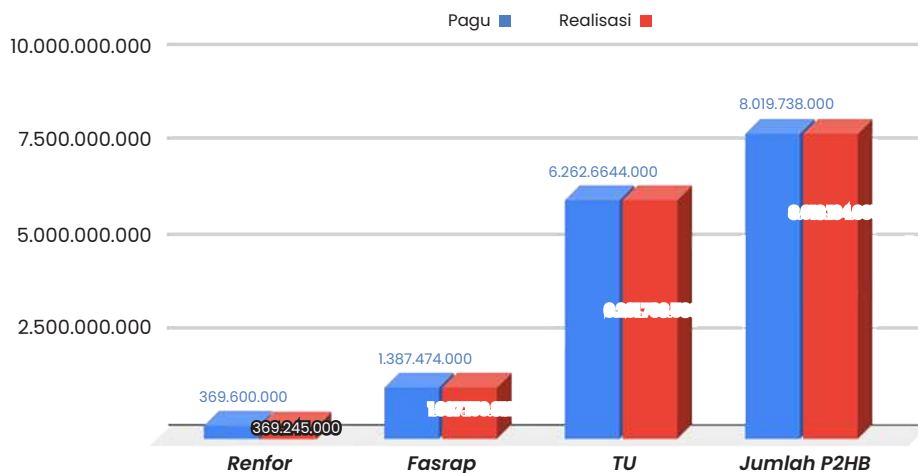
KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp)	PAGU SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	%
7259. ABV.001	Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.782.120.000	1.239.800.000	1.238.876.016	44,53	99,93
051	Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	873.320.000	369.600.000	369.245.009	42,28	99,90
A	Kajian Produk Derivat Getah Pinus Hilirisasi Industri Kehutanan	138.800.000	15.000.000	14.780.000	10,65	98,53
AA	Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan	71.927.000	71.927.000	71.906.340	99,97	99,97

KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp)	PAGU SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	%
B	Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen	213.598.000	85.598.000	85.563.669	40,06	99,96
C	Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH)	240.722.000	123.802.000	123.722.000	51,40	99,94
D	Kajian tentang Kebijakan Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor	208.273.000	73.273.000	73.273.000	35,18	100
052	Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan	621.232.000	130.432.000	130.350.101	20,98	99,94
A	Profiling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu	161.432.000	43.432.000	43.426.101	26,90	99,99
B	Kontribusi Kawasan Hutan terhadap Kecukupan Pangan	227.200.000	87.000.000	86.924.000	38,26	99,91
C	Efisiensi belanja sesuai Inpres No.1/2025	127.100.000	0	0	00,0	00,0
D	Efisiensi belanja sesuai Inpres No.1/2025	105.500.000	0	0	00,0	00,0

KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp)	PAGU SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	%
053	Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	1.287.568.000	739.768.000	739.280.906	57,42	99,93
A	Pelaksanaan Data dan Informasi	224.792.000	73.492.000	73.365.900	32,64	99,83
B	Pelaksanaan Kepegawaian	500.354.000	264.554.000	264.322.346	52,83	99,91
C	Pelaksanaan Kerjasama	168.984.000	8.284.000	8.284.000	4,90	100
D	Kerjasama PT Komatsu Marketing and support	393.438.000	393.438.000	393.308.660	99,97	99,97
7259. CDK.001	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	4.012.587.000	765.807.000	765.613.705	19,08	99,97
051	Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian Lestari dan Mandiri	4.012.587.000	765.807.000	765.613.705	19,08	99,97
A	Pengelolaan KHDTK Lestari dan Mandiri	3.244.787.000	554.607.000	554.457.905	17,09	99,97
B	Pengelolaan Hutan Penelitian Lestari dan Mandiri	767.800.000	211.200.000	211.155.800	27,50	99,98
7259. RDK.001	Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.400.988.000	491.235.000	491.187.006	20,46	99,99

KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp)	PAGU SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	%
051	Pengelolaan Laboratorium Terpadu	1.585.188.000	252.688.000	252.661.804	15,94	99,99
052	Pengelolaan Laboratorium Lapangan	815.800.000	238.547.000	238.525.202	29,24	99,99
7302. EBA.994	Layanan Perkantoran	5.522.896.000	5.522.896.000	5.522.457.677	99,99	99,99
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.522.896.000	5.522.896.000	5.522.457.677	99,99	99,99
JUMLAH		14.718.591.000	8.019.738.000	8.018.134.404	54,48	99,98

Pagu dan realisasi anggaran bidang kerja P2HB yang terdiri dari bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan, bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan, dan Dukungan Manajemen yaitu pada bidang Tata Usaha (Anggaran Layanan Perkantoran) disajikan pada gambar berikut.



Gambar 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Kerja P2HB 2025

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi tiap bidang di P2HB secara keseluruhan adalah Rp 8.018.134.395 (99,98%). Efisiensi penggunaan anggaran P2HB menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran kinerja.

3.2.2 NILAI KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I lingkup KLHK Tahun Anggaran 2024, capaian NKA berada pada rentang 77,08–98,62 poin. Capaian tertinggi diraih oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (98,62 poin), diikuti Inspektorat Jenderal (97,22 poin), yang didukung oleh kinerja perencanaan (NKPA) dan pelaksanaan anggaran (IKPA) pada kategori sangat baik.

Sekretariat Jenderal mencatatkan NKA sebesar 96,34 poin dengan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang seimbang, sehingga berada pada kelompok kinerja tinggi dan menjadi rujukan bagi satuan kerja di bawahnya, termasuk P2HB.

Sementara itu, beberapa Unit Eselon I lainnya menunjukkan ketidakseimbangan antara IKPA yang tinggi dan NKPA yang relatif rendah, yang berdampak pada capaian NKA lebih rendah serta mengindikasikan perlunya penguatan kualitas perencanaan anggaran, khususnya pada aspek efektivitas perencanaan dan penerapan Standar Biaya Keluaran.

Tabel 23. Peringkat NKA Per Eselon I Kementerian Kehutanan

No	Unit Eselon 1	NKPA	IKPA	NKA
1	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	99,9	97,29	98,62
2	INSPEKTORAT JENDERAL	100	94,43	97,22
3	SEKRETARIAT JENDERAL	96,2	96,47	96,34
4	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL	95,11	95,56	95,34
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	88,74	95,4	92,07
6	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	69,07	93,03	81,05
7	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	61,32	95,83	78,58
8	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN	61,13	95,98	78,56
9	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	65,04	89,11	77,08

3.3 CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Renja P2HB 2025, kegiatan Tahun 2025 Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang mendukung prioritas nasional adalah Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan (RDK.OP) yang masuk dalam PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.

Kementerian Kehutanan secara aktif mendukung dan memosisikan diri dalam kerangka Asta Cita Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029. Khususnya pada Prioritas Nasional 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dukungan ini diwujudkan melalui Prioritas 6, yaitu terwujudnya transformasi ekonomi hijau.

Kegiatan layanan laboratorium kehutanan bidang pengembangan hutan berkelanjutan bertujuan menyediakan fasilitas pengujian, data, dan informasi yang akurat, sekaligus mendukung inovasi teknologi, konservasi, dan pengembangan produk kehutanan. Evaluasi capaian tahun 2025 dilakukan untuk menilai kinerja layanan laboratorium terpadu dan lapangan terhadap standar mutu, pemeliharaan sarana prasarana, pencapaian PNBK, serta pelaksanaan program konservasi dan rekomendasi kebijakan.

Pada aspek **pengujian laboratorium**, sebanyak **182 pelanggan** dengan lebih dari **600 sampel** telah dilayani dan seluruh pengujian diselesaikan dengan baik. Hasil survei menunjukkan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,76 (sangat baik)**, meskipun masih terdapat ruang perbaikan mutu layanan berdasarkan masukan pelanggan. Dari sisi **sarana prasarana dan SDM**, kondisi laboratorium secara umum terpelihara dengan baik, target kalibrasi dan pemeliharaan tercapai, serta pelatihan SDM terlaksana, meskipun ke depan diperlukan peningkatan jumlah pelatihan dan pembaruan peralatan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Misi RPJMN 2020-2029

Asta Cita

Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pada aspek **PNBP**, capaian dari jasa pengujian dan penjualan produk laboratorium melampaui target dengan total lebih dari **Rp200 juta**, menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan signifikan juga terjadi pada penjualan produk persuteraan alam dan inokulan gaharu, meskipun pola penjualan beberapa produk masih fluktuatif sehingga memerlukan strategi perluasan pasar agar lebih konsisten.

Dalam bidang **konservasi dan riset**, pengembangan persuteraan alam menunjukkan capaian melalui penanaman demplot murbei di tiga lokasi serta peningkatan produksi telur dan kokon, meskipun pemeliharaan lanjutan perlu

diperkuat. Aplikasi mikoriza telah diuji pada tanaman murbei dan rumput gajah, namun hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan sehingga diperlukan penelitian lanjutan dan penguatan kolaborasi riset. Kegiatan **penangkaran rusa** berjalan baik dengan manajemen pemeliharaan rutin, pengendalian populasi, serta pengembangan fungsi ekowisata, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana, proses perizinan, dan kebutuhan anggaran tambahan.

Jejaring dan kolaborasi laboratorium terus diperkuat melalui uji banding, studi banding, serta pemanfaatan jejaring **TKMH** sebagai simpul sinergi riset dan kebijakan. Integrasi fungsi laboratorium dengan kebijakan kehutanan diwujudkan melalui dukungan rekomendasi teknis, diversifikasi hasil hutan, pengembangan bioenergi, serta peran laboratorium sebagai **pusat rujukan kehutanan** dalam penegakan hukum dan kebencanaan. Upaya **digitalisasi dan efisiensi pengelolaan** telah dimulai, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem manajemen laboratorium terintegrasi dan operasional lebih efektif.

Secara keseluruhan, capaian layanan laboratorium kehutanan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **cukup baik dan cenderung meningkat**, terutama pada mutu layanan, kontribusi PNBP, integrasi kebijakan, dan peran sebagai laboratorium rujukan. Namun demikian, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan, khususnya pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan konservasi, konsistensi layanan, digitalisasi, dan efisiensi tata kerja, agar **kontribusi laboratorium terhadap pengembangan hutan berkelanjutan semakin optimal**.



3.4 CAPAIAN PROGRAM TEMATIK

Capaian Program Tematik P2HB dalam penguatan implementasi kebijakan kehutanan berkelanjutan melalui rekomendasi berbasis kajian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan keberlanjutan sumber daya hutan mencakup empat klaster tematik sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas diseminasi hasil kajian

- Pelaksanaan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Advokasi pembaruan regulasi kehutanan, termasuk revisi Surat Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan
- Penyusunan policy paper dan policy brief berbasis kajian dan bukti empiris

2. Dukungan terhadap Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Kehutanan

- Optimalisasi peningkatan produksi getah pinus nasional untuk mendukung hilirisasi industri kehutanan
- Kajian identifikasi jenis kayu dalam rangka mendukung pemasaran produk hasil hutan berorientasi ekspor
- Penguatan rantai nilai kehutanan dan pengelolaan laboratorium kehutanan

3. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dan Multifungsi

- Penguatan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan hutan penelitian
- Pengembangan dan pemetaan keanekaragaman pangan hutan
- Profiling dan pemutakhiran data Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

4. Penguatan Sistem Pengetahuan dan Akuntabilitas Kebijakan

- Pengelolaan dan pengembangan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan
- Peningkatan efektivitas penerapan kebijakan teknis melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebesar 70,45 persen
- Kontribusi terhadap capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal dengan nilai capaian 1 poin

3.5 CAPAIAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs), dan PUG

Sebagai unit kerja yang berperan strategis dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) turut berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip pengarusutamaan dalam setiap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pengarusutamaan di P2HB diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman, dengan fokus pada empat pilar utama, antara lain :

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender (PUG)

P2HB berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kegiatan, baik dalam pengembangan, maupun pengelolaan laboratorium. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ilmiah, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya hutan. Program pelatihan dan capacity building diarahkan agar seluruh pegawai memahami prinsip keadilan gender dan mampu menerapkannya dalam perencanaan kegiatan, seperti pada pengelolaan KHDTK, layanan laboratorium, dan penyusunan rekomendasi kebijakan kehutanan. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat).

Pengarus Utama Gender (PUG) di P2HB dilaksanakan pada Pengelolaan Laboratorium Sutera Alam Indonesia (LSAI) yang merupakan Laboratorium Lapangan di P2HB.

Kegiatan PUG ini merupakan kegiatan dimana terdapat pembagian peran jelas antara Pria dan Wanita dalam melakukan pekerjaan pada pengelolaan LSAI. Kegiatan yang dapat dilakukan di LSAI antara lain :

- Pengolahan Kebun Murbei yang merupakan sumber pakan ulat sutera, dapat dilakukan oleh para bapak baik itu ASN maupun Tenaga Upah lapangan.
- Pemeliharaan ulat sutera dan kegiatan pasca panen dapat dilakukan oleh para ibu karyawan karena dalam pemeliharaan ulat sutera, tidak memerlukan tenaga besar dan ketelitian.



Gambar 31. Pemeliharaan ulat sutera dilakukan oleh para ibu karyawan

Kendala Pelaksanaan PUG :

- a. Kurangnya pelatihan ketrampilan bagi para wanita/karyawati dalam kegiatan Pengelolaan pasca panen ulat sutera
- b. Kurangnya studi bagi para karyawan dan Karyawati dalam ilmu budidaya ulat sutera, terutama dalam menghasilkan bibit unggul murbei, penanganan pasca panen dan penghasilan bibit unggul ulat sutera.

2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)



Dalam rangka mewujudkan good governance, P2HB memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi di seluruh lini kegiatan. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian dari strategi reformasi

birokrasi di lingkup pusat. Selain itu, sistem pengelolaan laboratorium dan pelayanan publik dikembangkan agar memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sejalan dengan sasaran RPJMN 2025–2029 dalam bidang tata kelola pemerintahan.

3. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagai lembaga yang fokus pada pengelolaan hutan lestari, seluruh kegiatan P2HB dirancang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Program seperti pemanfaatan KHDTK Litbang Kehutanan Lestari, pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis data ilmiah serta layanan laboratorium kehutanan diarahkan untuk memperkuat daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berkontribusi terhadap pencapaian SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Darat).

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital



Untuk mendukung efektivitas kerja dan layanan publik, P2HB melaksanakan transformasi digital melalui penguatan sistem informasi, digitalisasi data hasil penelitian dan laboratorium, serta penerapan teknologi dalam pemantauan KHDTK. Transformasi digital juga digunakan untuk memperluas akses publik terhadap informasi hasil pengembangan dan inovasi kehutanan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan transparansi informasi, sejalan dengan arah kebijakan SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur) serta SDG 16 (Institusi yang Tangguh).

Melalui penerapan prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebut, P2HB berupaya membangun lembaga yang adaptif, inklusif, dan berintegritas tinggi. Pengarusutamaan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi landasan nilai yang memperkuat posisi P2HB dalam mewujudkan hutan lestari dan pembangunan kehutanan yang berdaya saing di era transformasi global.

3.6 CAPAIAN KINERJA LAIN

Pada sub bab ini diuraikan beberapa kegiatan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025 yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri, serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan. Capaian Kinerja lainnya terdiri dari :

1. Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Pokja Kerja Sama memperhatikan tahapan dan prosedur kerja sama yaitu:

a) Inisiasi dan identifikasi mitra potensial

Kegiatan awal dari suatu kerja sama adalah melakukan audiensi dengan calon mitra. Pada proses ini dilakukan identifikasi kebutuhan sumber daya, sarana prasarana dan pengetahuan calon mitra. Tahap ini menggali potensi kolaborasi yang dapat dijalin secara formal melalui Perjanjian Kerja Sama.

b) Perencanaan dan perumusan naskah kerja sama

Setelah tahap audiensi, dilakukan tahap penyusunan rencana dan naskah kerangka kerja formal berupa perjanjian kerja sama. Substansi isi kerja sama dituangkan dalam draf konsep PKS yang akan didiskusikan dengan calon mitra. Waktu pembahasan bervariasi hingga konsep kerja sama disetujui kedua belah pihak.

c) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dibuat rangkap dua

masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Kepala Pusat dan mitra kerja. Penandatanganan dapat dilakukan langsung antara kedua belah pihak atau bila tidak memungkinkan dapat dikirimkan ke pihak mitra.

d) Implementasi kerja sama

Pelaksanaan kerja sama teknis diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Dokumen pelaksanaan kerja sama dalam negeri berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menyertakan detail kesepakatan dengan mitra, yaitu tujuan kerja sama, ruang lingkup kegiatan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahun 2025, pelaksanaan kerja sama yang telah diimplementasikan dengan mitra sebagai berikut:

a. Mitra Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan

TKMH kehutanan merupakan wahana pertukaran dan pengelolaan pengetahuan teknis kehutanan yang dirancang untuk menjembatani penyedia pengetahuan dan pengguna pengetahuan, sehingga alur informasi dan rekomendasi teknis dapat berlangsung cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Sebanyak **10 konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS)** telah diinisiasi dan disusun bersama berbagai institusi, meliputi lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Dari jumlah tersebut, **7 PKS telah ditandatangani**, sementara **4 inisiasi PKS masih dalam proses** di pihak mitra. **Daftar kerja sama TKMH–BRIN**, baik yang telah berjalan maupun yang masih berproses sebagai mitra P2HB, **disajikan pada Lampiran 5.**

b. PT. Komatsu Marketing and Support Indonesia (KMSI)

Sehubungan dengan restrukturisasi organisasi menjadi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, saat ini PKS dengan Komatsu telah diperbarui dan disesuaikan ruang lingkupnya, yaitu dengan PKS antara P2HB dengan PT Komatsu Marketing and Support Indonesia Nomor PKS.01/P2HB/PFPHB/KLN.03.03/B/07/2025 tentang Pengembangan Hutan Berkelanjutan. Saat ini fokus kegiatan rutin seperti produksi dan distribusi bibit serta pemeliharaan bibit di persemaian.

c. Perhutani Forestry Institute (PeFI)

Perjanjian Kerja Sama dengan PeFI berdasarkan PKS nomor PKS.6/PUSTARHUT/PSIPLK/REN.3/9/2023 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Cikole, Gunung Dahu dan Sobang untuk Perumusan dan Pengembangan Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. PKS ini telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025, dan akan diperpanjang sesuai dengan tugas dan fungsi P2HB. Penyusunan konsep PKS baru telah dilakukan dan saat ini sedang dilakukan luasan HP Sobang dan HP Gunung Dahu sebelum pembahasan finalisasi PKS.

Selain kerja sama yang sudah berjalan, inisiasi kerja sama yang sedang berproses antara lain mitra dengan Yayasan Jejak Pulang, OIKN Polda Kaltim, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Forum Pohon Langka Indonesia, dan FKPDAS (Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), disajikan pada **Lampiran 7.**

2. Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri / Internasional

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri, Pokja Kerja Sama memperhatikan tahapan dan prosedur kerja sama yaitu:

a. Keikutsertaan Indonesia pada kegiatan ASEAN

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) sebagai **Focal Point ASEAN Working Group on Forest Product Development (AWG-FPD)** mengoordinasikan keikutsertaan Delegasi Republik Indonesia pada **The 28th AWG-FPD** yang diselenggarakan pada 4–5 Agustus 2025 di Lao PDR. Kegiatan ini melibatkan Direktorat BPPHH sebagai Alternate Focal Point serta Biro HKLN. P2HB menyiapkan berbagai dokumen persidangan, antara lain country report dan intervensi Indonesia terkait pengembangan produk hasil hutan, FLEG, NTFP, harmonisasi standar, serta peningkatan kerja sama sumber daya manusia.

Sidang pleno dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN (kecuali Singapura), Sekretariat ASEAN, Timor-Leste sebagai observer, serta mitra internasional seperti EFI, AFoCO, GIZ, ITTO, EU TAF-GTEI, dan UK FCDO.

Selain itu, P2HB berpartisipasi aktif dalam **The 32nd Joint Committee on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme** yang diselenggarakan secara daring pada 12 Agustus 2025. Pada forum ini, P2HB menyampaikan pembaruan perkembangan produk hasil hutan Indonesia berdasarkan hasil The 28th AWG-FPD, sebagai bentuk **dukungan terhadap harmonisasi kebijakan ASEAN**.

b. Implementasi FoLU Net Sink 2030 Kerja Sama Indonesia–Norwegia

Pada tahun 2025, P2HB ditetapkan sebagai **Implementing Partner FoLU Net Sink 2030** berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 57 Tahun 2025, dengan sumber pendanaan kerja sama Indonesia–Norwegia Tahap Kedua dan Ketiga. Tim pelaksana proyek ditetapkan pada Oktober 2025, dengan fokus pada peningkatan tutupan hutan dan pengelolaan KHDTK Carita secara berkelanjutan.

c. Keikutsertaan dalam Asian Forest Cooperation Organisation (AFoCO)

Sebagai **National Focal Point AFoCO**, P2HB berpartisipasi aktif dalam agenda AFoCO tahun 2025 untuk memperkuat diplomasi kehutanan Indonesia. Pada **Annual Technical Workshop (ATW) 2025** di Seoul (15–16 September 2025), P2HB memaparkan capaian dan praktik terbaik proyek AFoCO Project 023/2021 berupa pembangunan demonstration plot pada tiga KPH dengan ekosistem mangrove, karst, dan gambut, serta berbagai kegiatan transfer pengetahuan.

P2HB juga berpartisipasi dalam **The 13th AFoCO Assembly Meeting** (27–30 Oktober 2025) dan FAAF Forum 2025, dengan memaparkan pengalaman mobilisasi sumber daya melalui platform kolaboratif untuk penanaman dan restorasi hutan. Partisipasi ini mendukung pengarusutamaan kepentingan nasional dalam kebijakan dan program AFoCO.

d. Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 571 Tahun 2025, **Sekretariat Interim ITPC Bidang Kehutanan** ditetapkan sebagai bagian dari P2HB. Tindak lanjut penetapan tersebut dilakukan melalui pembahasan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang ITPC, baik pada skala nasional maupun internasional.

e. Kegiatan pendukung lainnya

Dalam rangka mendukung pengelolaan kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas SDM, P2HB berperan sebagai **anggota tim penilai proposal kerja sama luar negeri** pada Biro HKLN. Keterlibatan ini memberikan pemahaman strategis terkait tren kerja sama global, kebijakan kehutanan, dan skema pendanaan internasional.

Selain itu, perwakilan P2HB mengikuti **Pelatihan Komunikasi Diplomatik dan Negosiasi Internasional** untuk memperkuat kapasitas SDM dalam mendukung peran P2HB pada forum internasional.

Evaluasi Capaian Kegiatan Kerja Sama

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang telah dilakukan, evaluasi capaian kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama telah mencapai hasil yang baik, yang ditandai dengan :

1. Terbentuknya inisiasi kerja sama untuk mendukung pengembangan hutan berkelanjutan



2. Penguatan jejaring kemitraan di tingkat nasional dan internasional



3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan program kolaboratif.



Adapun tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan alur proses dokumen kerja sama antar-mitra, keterbatasan sumber daya, serta penyelarasan waktu agenda lintas institusi.

“

P2HB turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon bertajuk: “Sinergi Hebat Sekretariat Jenderal: Penanaman Kompensasi Jejak Karbon Kementerian Kehutanan di Kecamatan Rumpin, 13 November 202



04

PENUTUP





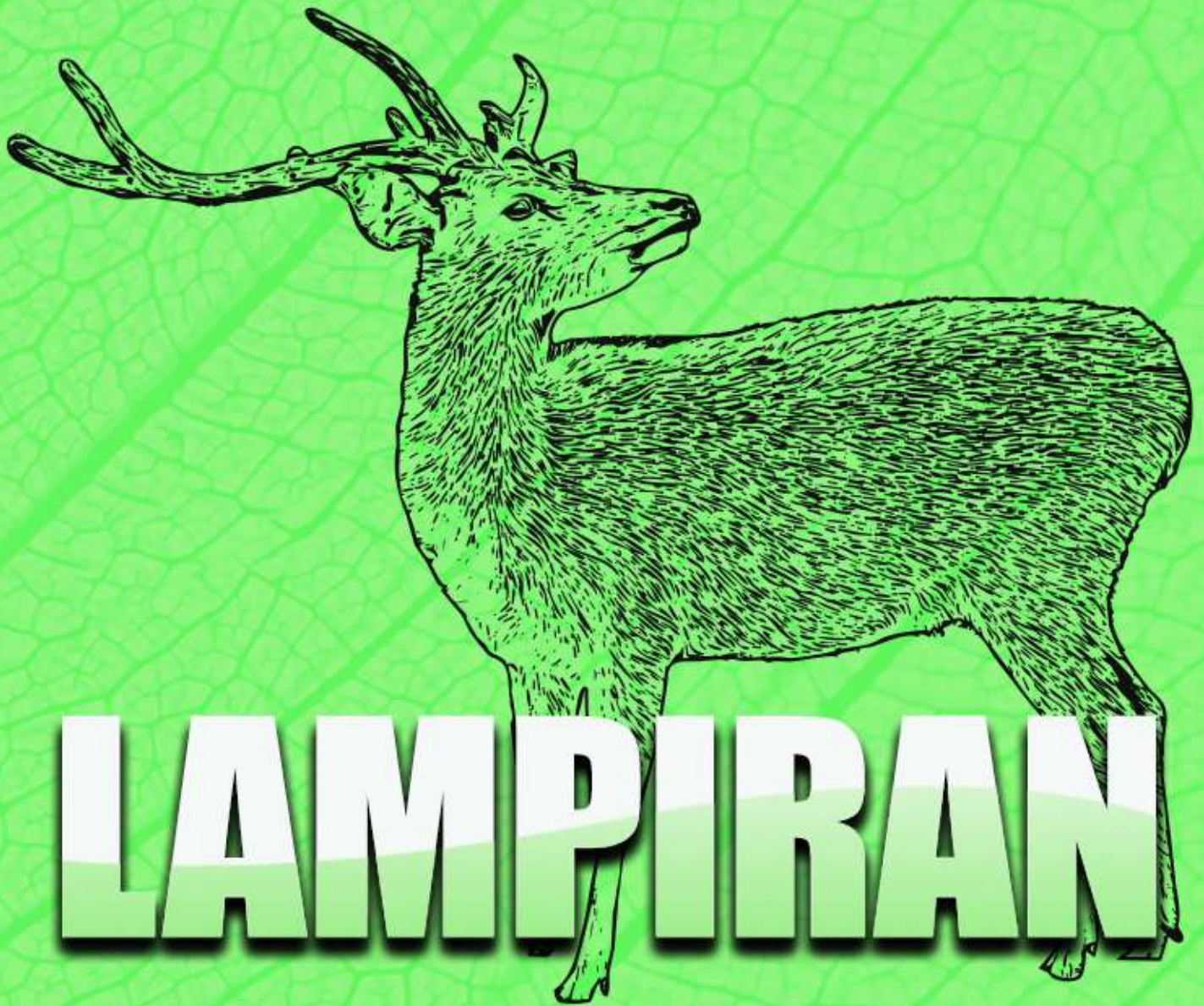
A. KESIMPULAN

Secara umum, kinerja P2HB pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, baik dari aspek implementasi kebijakan (IKP/IKK) maupun dukungan terhadap kinerja anggaran. Hasil penilaian menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan dan dukungan teknis yang dihasilkan P2HB telah berkontribusi dalam mendukung pengembangan hutan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek konsistensi implementasi kebijakan, kualitas perencanaan, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

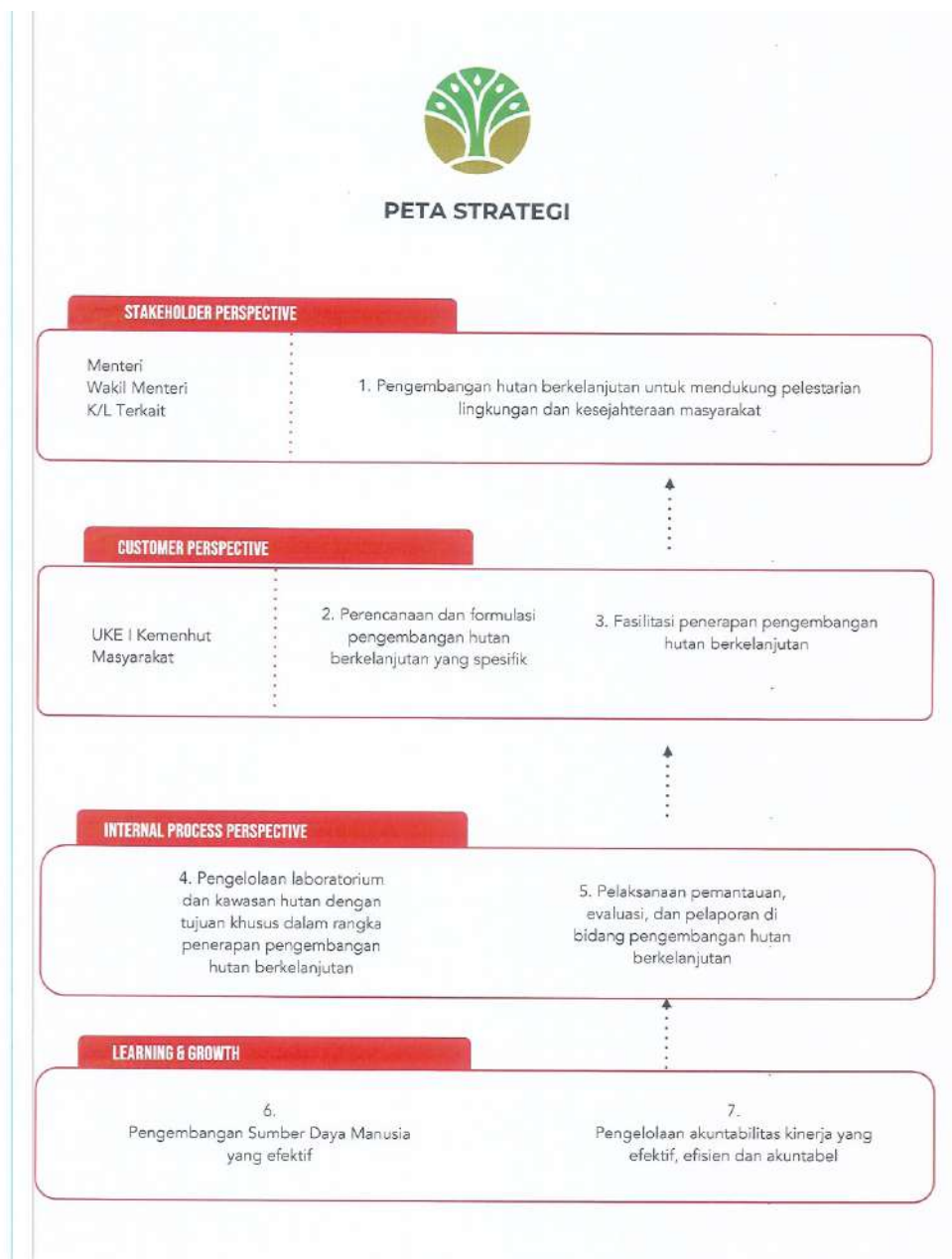
B. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KEDEPAN

Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi berdasarkan hasil penilaian dan analisis kinerja, antara lain:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar perbaikan implementasi kebijakan di unit teknis.
- 2) Masih terdapat ketidakseimbangan antara kualitas perencanaan dan pelaksanaan, baik dalam konteks kebijakan maupun anggaran.
- 3) Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja serta pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan teknis belum berjalan secara konsisten.
- 4) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan umpan balik kebijakan belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan.
- 5) Pemanfaatan KHDTK dan laboratorium kehutanan sebagai wahana dukungan teknis dan pembelajaran kebijakan masih belum optimal.



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja P2HB Tahun 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GUN GUN HIDAYAT, S.HUT., M.SC., PH.D.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P
Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P
NIP. 196708291992031004

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN
BERKELANJUTAN

GUN GUN HIDAYAT, S.HUT., M.SC., PH.D.
NIP. 197310051998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN**

1. Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	1.1 Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	70%

2. Customer Perspective

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang spesifik	2.1 Persentase keselarasan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan yang dihasilkan	85%
3	Fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	3.1 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	5 Lembaga
		3.2 Tingkat pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan yang digunakan	80%

3. Internal Process

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pengelolaan laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus dalam rangka penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	4.1 Tingkat kualitas pengelolaan laboratorium dan KHDTK	80%
5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hutan berkelanjutan	5.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan pengembangan hutan berkelanjutan	4 poin

4. Learning and Growth

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif	6.1 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	4,0 poin
7	Penguatan akuntabilitas kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang efektif, efisien dan akuntabel	7.1 Nilai SAKIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	90-100 (Sangat Baik)
		7.2 Nilai Maturitas SPIP Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	3,8 poin
		7.3 Persentase penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	100%

**ANGGARAN PROGRAM DAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN**

No.	Program/Rincian Output	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
1.	Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Rp 2.388.682.000,-
2.	KHDTK Litbang Kehutanan Lestari Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Rp 4.012.587.000,-
3.	Layanan Laboratorium Kehutanan Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Rp 2.400.988.000,-
	Program Dukungan Manajemen	
4.	Layanan Perkantoran	Rp 8.037.785.000,-
	Jumlah	Rp 16.840.042.000,-

SEKRETARIS JENDERAL



Dr. H. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

Jakarta, 2025

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
HUTAN BERKELANJUTAN



GUN GUN HIDAYAT, S.HUT., M.SC., PH.D.
NIP. 197310051998031001

Lampiran 2

Hasil Kegiatan 3D2N KHDTK-HP Lingkup P2HB

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
1	KHDTK Carita	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan verifikasi data Laporan Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2021 di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita2. Melakukan pengukuran diameter pada PUP petak 83. Pengecekan pal batas4. Melakukan diskusi dengan perangkat desa dan petani penggarap	inventarisasi pohon secara berkala dan penatan batas seluruh areal KHDTK Carita
2	KHDTK Cikampek	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengambilan foto pal batas luar (dokumentasi visual) dan pengecekan kondisi pal batas luar.2. Melakukan koordinasi dengan BUMDes Mulya Lestari terkait rencana budidaya jamur tiram (<i>Pleurotus spp.</i>).3. Melaksanakan pengambilan foto aerial (drone) kawasan KHDTK Cikampek untuk pemetaan visual cakupan kawasan.4. Mendokumentasikan tegakan pohon sebagai bahan evaluasi kondisi tegakan dan perencanaan pengelolaan.5. Mendokumentasikan kondisi gerbang masuk dan keluar KHDTK Cikampek.	Perlu pembaruan data inventariasi, merenovasi werkit dan melengkapi sarpras pendukung untuk kegiatan rutin KHDTK
3	KHDTK Pasir Awi	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan aparat Desa Gobang: Tekanan masyarakat terhadap hutan relative rendah, Kondisi keamanan di sekitar wilayah KHDTK relatif cukup baik karena selain jaraknya cukup jauh dengan pemukiman, masih ada rasa	<ol style="list-style-type: none">1. Pemutakhiran data potensi tegakan2. Pengkayaan beberapa lokasi yang kosong akibat pohon tumbang

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>sungkan masyarakat terhadap lahan milik negara, Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih sangat rendah sehingga dapat ditingkatkan, salah satunya melalui pemanfaatan HHBK dan manfaat hutan yang sudah dirasakan masyarakat sekitar hutan Adalah tersedianya air bersih yang berasal dari mata air di KHDTK Pasir Awi dan pengambilan rebung untuk pangan.</p> <p>2. Pengecekan pal batas KHDTK Pasir Awi</p> <p>3. Hasil observasi potensi KHDTK Pasir Awi diantaranya adalah:</p> <p>a. Jasa lingkungan Di KHDTK Pasir Awi terdapat sekitar 5 sumber air yang mengalir sepanjang tahun. Air tersebut disalurkan ke beberapa bak penampung untuk disalurkan ke rumah-rumah warga Desa Gobang. Masyarakat sekitar memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari.</p> <p>b. Pengecekan penutupan lahan Penutupan lahan KHDTK Pasir Awi cukup baik, beberapa lahan yang kosong telah ditanami kembali.</p> <p>3. Potensi HHBK</p> <p>4. Analisis Vegetasi</p> <p>a. Analisis vegetasi dilakukan dengan membuat plot-plot pengukuran. Penempatan plot dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan membuat plot berukuran 20 x 20 m</p>	<p>2. Verifikasi lokasi dan keberadaan petani penggarap kebun pisang dan kebun karet untuk memastikan legalitas, dan potensi kolaborasi</p> <p>3. Perbaiki sarana prasarana pendukung: Pondok kerja, sign board (Larangan berburu dan membuang sampah di KHDTK, rawan pohon tumbang)</p>

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>untuk mengukur pohon, 10 x 10 m mengukur tiang, 5m x 5 m untuk mengukur pancang dan 2 m x 2 m untuk mengukur semai.</p> <p>b. Hasil ground check penutupan lahan di beberapa titik: Terdapat sekitar 1 hektar lahan berupa kebun pisang yang ditanami oleh beberapa orang petani. Luasannya bisa bertambah karena ada di beberapa titik. Informasi dari seorang penggarap yang ditemui di lapangan, petani tersebut menyewa lahan dari orang lain dan telah berlangsung selama satu tahun terakhir</p> <p>c. Dilakukan pula pengukuran data debit actual, di beberapa titik mata air. Pengukuran dilakukan dengan metode sederhana yaitu metode volumetric karena kondisi mata air yang kecil dan keterbatasan peralatan. Pengumpulan data debit dilakukan dengan menampung aliran air langsung dari mata air menggunakan wadah yang sudah diketahui volumenya dan Lampiran</p>	
4	KHDTK Haurbentes	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rencana tindak lanjut pasca okupasi kawasan yang dijadikan kandang ayam oleh oknum warga lokal yang tidak berkoordinasi dengan pihak Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan. Melakukan updating data potensi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Haur Bentes seperti anakan bibit tanaman, potensi pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> Patok ini perlu dibuat ulang dengan yang lebih besar ukuran meter persegi dengan ditanam kebawah, kedalaman minimal satu meter dan terdapat keterangan GPSnya.

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>kawasan wisata camping ground dan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendata ulang tapal batas luar kawasan KHDTK dan mendokumentasikan sebagai bukti. 4. Penerapan CBSC atau Carbon, Biodiversity, Sosial, dan Conservation, . Pada KHDTK Haur Bentes. 5. Penelitian mikoriza yang dikerjakan Oleh UNB di petak 100b pada KHDTK Haur Bentes. 6. Tempat magang mahasiswa IPB University. 7. Ada Petak Ukur Permanen (PUP) pada petak 100. 8. Ada persemaian berbagai jenis pohon, dengan jumlah lebih dari 1500 bibit. 9. Adanya data pohon aren dan trek jalan aren. 10. Ada accunt sosial media pada instagram dengan naman khdtk_haur_bentes. 11. Adanya AVR dan foto, video kawasan dari atas dengan menggunakan drone. 12. Update data jasa lingkungan seperti mata air yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. 13. Terpeliharanya 3 sumber benih tersertifikasi dari jenis yang berbeda. 14. Samakan solid antar pangku pewan kawasan karena sering berkoordinasi seperti polhut dari TNGHS dan pengawas perhutani, serta polsek Jasingan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu sosialisasi kewarga sekitar KHDTK Haur Bentes mengenai batas kawasan dan fungsi utama, fungsi sosial, dan fungsi konservasi. 3. Adanya perbaikan Mess KHDTK Haur Bentes seperti Mess 1 dan Mess Peranakan ini seperti pada pintu, tembok, kamar mandi, genteng, lantai, tempat parkir, tempat penyimpanan air, saluran air, cat tembok, kunci pintu, kaca dan kamar. 4. Harus ada foto dari atas yang menggunakan drone untuk menentukan batas kawasan atau lainnya. Foto ini untuk melihat kawasan tutupan lahan yang hijau berarti tanaman tegakan dan kawasan terbuka. 5. Tiang listrik tegangan tinggi harus diperbaiki supaya tidak miring,

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
			<p>dipindah atau dibuat lubang baru dengan menyurati pihak Perusahaan Milik Negara untuk permohonan perbaikan.</p> <p>6. Logo baru Kementerian Kehutanan dan logo KHDTK Haur Bentes harus segera ditambah dan dipasang pada gapura dan sekalian diperbaiki gapurnya karena nampak usang, begitu juga dengan reklame.</p>
5	KHDTK Benakat	<p>Hasil dari diskusi oleh pihak yang hadir mengerucutkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak memiliki harapan yang besar terhadap pengelolaan KHDTK Benakat terutama untuk habitat gajah yang dikelola bersama-sama. 2. Dibutuhkan penguatan kelembagaan yang mumpuni dan real di lapangan terutama melalui PKS yang mengikat para pihak. 3. Rencana kerja P2HB ditunggu agar dapat memberikan manfaat banyak pihak, mengehentikan konflik satwa dan manusia, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya. 	<p>Membentuk Forum Komunikasi Pengelolaan KHDTK Benakat untuk Green Koridor Gajah Sumatera dan kolaborasi multi pihak untuk pengembangan agroforestry di dalamnya</p>

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>4. Harapannya masing-masing pihak dapat bekerja di KHDTK Benakat baik Rehab DAS, PS, TNI/POLRI, Pemkab, BKSDA.</p> <p>Hasil dari FGD dengan pihak yang hadir membahas beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTH mendukung program dari pengelola dan berusaha tertib kawasan dengan saling mengingatkan terkait penanaman sawit, jual beli lahan dan pelanggaran lainnya. 2. Perlu pendampingan dan peningkatan fasilitas penunjang untuk aparat yang berwenang untuk dapat meningkatkan pengamanan kawasan. 3. Bantuan bibit dan fasilitas penunjang akan difasilitasi oleh BPDAS. Perbaikan fasum lain seperti jalan, gorong-gorong, dan lainnya perlu tindak lanjut dari pihak desa dan bantuan dari PT disekitarnya. 4. Perlu mengadakan pelatihan penanganan satwa dan pembuatan kompos. 	
6	KHDTK Arcamanik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Dishut Jabar terkait penuntasan laporan tata batas KHDTK Arcamanik dan KHDTK Pasir Awi dan diskusi terkait program Prov Jabar 2. Pengambilan foto udara dan AVR KHDTK 3. Patroli kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki gubuk kerja dan pembuatan informasi kawasan (jalur, plang, informasi tumbuhan, titik kumpul, dll 2. Revitalisasi persemaian

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>4. Survei potensi sekaligus update data lapangan (teridentifikasi potensi madu hutan, pembibitan bambu untuk support program Provinsi, jalur hiking/trail run, ecoeduwisata (patahan lembang dan koleksi bambu), ulat bambu</p> <p>5. Penjaringan masukan dari petugas lapangan (kerja sama dengan para pihak (komunitas bambu, akademisi, dll), perbaikan saung sebagai pusat informasi/titik kumpul, pergantian plang menjadi kemenhut)</p> <p>6. Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk pengambilan berkas penataan batas yang sudah di tandatangani oleh Kadishut</p> <p>7. Dilaksanakan pengambilan sampel 2 jenis bambu, yaitu bambu betung (<i>Dendrocalamus asper</i>) dan bambu ampel (<i>Bambusa vulgaris</i>) untuk sampel produksi arang bambu dan pelet bambu</p> <p>8. Dilaksanakan pengambilan sampel pinus (<i>Pinus merkusii</i>) berupa cabang ranting pinus dan getah (5 kg) untuk sampel produksi pelet pinus dan pengujian mutu getah pinus</p> <p>9. Dilaksanakan pengukuran tegakan pinus pada blok 1 dan 4 sebagaimana data terlampir. Sebagai informasi, tahun tanam pinus diperkirakan adalah tahun 1997</p> <p>10. Dilaksanakan diskusi dengan KTH Pusaka Madu Berkah Alam, Mekarmanik sebagai pembudidaya</p>	<p>3. Peningkatan keterlibatan komunitas /kelompok</p> <p>4. Pengembangan sentra bambu melalui pembangunan pengawetan bambu dan produksi produk-produk bambu</p> <p>5. Penataan kawasan</p>

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		lebah madu untuk peluang pemberdayaan masyarakat yang menunjang peningkatan potensi KHDTK	
7	KHDTK Samboja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memindahkan pos pengamanan bersama dari KM 6 ke KM 9 di sebelah KPH Meratus 2. Memastikan berlangsungnya kerjasama tripartit antara p3hb, Kapolda Kaltim dan OIKN 3. Menyelesaikan PKS tripartit antara P2HB, Bksda Kaltim dan Jejak pulang 4. Cek kegiatan PKS PDAM Kab Kukar di KHDTK Samboja terkait pemasangan booster air 	<p>Kolaborasi pengelolaan ekowisata dengan pihak pemerintah Kabupaten Kebumen dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jika hasil sadapan pinus bisa berkolaborasi dengan Perhutani, maka kendala anggaran dalam pengelolaan KHDTK Gombang dapat teratasi dan menjadi KHDTK yang mandiri</p>
8	KHDTK Gombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan eks BSILHK Solo sekarang namanya Balai Perbenihan Tanaman Hutan Solo, selaku pengampu lama dan juga koordinasi pengelolaan BMN yang terdapat di KHDTK Gombang. 2. Pengurusan administrasi terkait staf pengelola KHDTK Gombang dari pengampu lama ke pengampu baru. 3. Survei potensi sekaligus update kondisi terkini KHDTK Gombang (teridentifikasi potensi ekowisata KHDTK Gombang. dan juga potensi PNPB dari sadapan Pinus. 	<p>Kolaborasi pengelolaan ekowisata dengan pihak pemerintah Kabupaten Kebumen dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jika hasil sadapan pinus bisa berkolaborasi dengan Perhutani, maka kendala anggaran dalam pengelolaan KHDTK Gombang dapat teratasi dan menjadi KHDTK yang mandiri</p>

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengecekan areal RHL tahun 2024 seluas 50 ha di dalam kawasan KHDTK Gombong. 5. Ground cek pal batas kawasan KHDTK Gombong (pal batas perlu direhabilitasi beberapa mengalami kerusakan dikarenakan usia). 6. Pengecekan sarana dan prasarana stasiun Klimatologi (bak penampung air hujan pecah perlu penggantian, perlu penyediaan kertas print data klimatologi). 7. Perjanjian kerjasama antara Perhutani dan BSILHK Solo berakhir tanggal 11 Desember 2025, perlu telaahan apakah dilanjutkan atau tidak. 8. Tidak terjadi perambahan hutan atau kejadian gangguan terhadap kawasan KHDTK Gombong. 	
9	KHDTK Hambala	Kunjungan lapangan belum dapat dilakukan. Permohonan bantuan kepada satker KSDAE terdekat sudah dilakukan yaitu memohon bantuan apabila terdapat kegiatan patroli agar KHDTK Hambala termasuk yang diikutsertakan. SDM/ petugas lapangan di KHDTK Hambala sudah pensiun tahun 2025	Perlu adanya anggaran khusus untuk penyediaan petugas lapangan di KHDTK Hambala
10	HP Gunung Dahu	1. Hasil pengecekan pal batas HP Gunung Dahu disekitar Kampung Tipar dan Nangela Pondok atau arah Barat Daya diperoleh sebanyak kurang lebih 9 titik yang di marking dan hanya ditemukan dua pal yang masih tersisa sedangkan pal lainnya hilang. Kondisi pal yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera menyelesaikan draft PKS 2. Pengukuran tegakan lanjutan dan identifikasi potensi kelompok tani di sekitar HPGD

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>tersisa sudah rusak dan tidak terlihat huruf maupun angkanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat pal batas yang ditemukan berada di berbagai bentuk lahan seperti kebun campur, sawah dan permukiman. Saat mencari pal batas di Kampung Nangela Pondok, yang tinggal di dalam kawasan, kami menemukan pal batas berada di halaman rumah warga seperti gambar di atas. Bahkan kami menemukan pal milik BPN yang sudah terpasang baru. Menurut pengakuan warga, pendataan untuk sertifikat dan lain sebagainya sudah dilakukan tahun sejak tahun 2021. 3. Kami belum bisa bertemu dengan Kepala Desa Bantar Karet, sehingga belum bisa melakukan koordinasi apapun baik itu bantuan tenaga lapangan, kegiatan bersama masyarakat bahkan pembibitan yang akan didistribusikan ke perusahaan. 4. Masyarakat di area Gunung Dahu sudah diberikan penjelasan singkat mengenai fungsi pohon tersebut dan bagaimana peran masyarakat. Namun masih perlu arahan lebih lanjut supaya masyarakat lebih paham mengenai fungsi ekologi dan konservasi tanah yang sudah diterapkan. 5. Kondisi pal yang sudah lama dan banyak yang hilang perlu untuk dilakukan penataan batas di HP Gunung Dahu 	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>6. Kunjungan ke Kantor Desa Bantar Karet berbuah baik, kami bertemu dengan Sekretaris Desa Bantar Karet. Kunjungan ini yaitu koordinasi terkait penambahan petugas lapangan dan penyampaian rencana kegiatan di HP Gunung Dahu.</p> <p>7. Koordinasi bersama Gapoktan Sinar Makmur yang diwakili oleh Bp. Dedi dari Desa Pabangbon, mendapatkan poin – poin aspirasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok Tani Sinar Makmur awalnya berjumlah 25 orang namun saat ini yang aktif tersisa kurang lebih 16 orang. b. Kelompok ini belum memiliki SK Kelompok Tani sehingga belum legal secara penunjukkan dan eksistensinya. c. Kegiatan saat ini yaitu menanam kopi (panen 1 kali/tahun), perawatan irigasi pertanian basah (sawah padi), dan pengelolaan kandang ayam. d. Di Desa Pabangbon terdapat KWT (Kelompok Wanita Tani) yang saat ini akan diaktifkan kembali dan mereka tertarik untuk kegiatan seperti pengembangan tanaman obat atau tanaman rimpang yang dapat dikelola oleh ibu-ibu KWT e. Kelompok Tani Sinar Makmur juga bersedia mengelola apabila kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan madu hutan 	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		8. Pengukuran data diameter dan sebagian tinggi tanaman <i>Rubroshorea leprosula</i> pada Plot 1 dengan jarak tanam 2m x 2m bersama mahasiswa magang dari Ekowisata Vokasi IPB	
11	HP Pasir Hantap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan pal batas antar petak dan pal batas luar kawasan, terdapat beberapa yang sudah patah, sudah tidak bisa terbaca karena sudah tidak jelas. Untuk pal batas luar Kawasan yang masih jelas diantaranya di pal batas luar Kawasan 5,6 dan 9. Sedangkan untuk pal batas antar petak yang sudah tidak terlihat adalah di pal batas 3, 4, 41 dan 93 2. Hasil survei potensi Hutan Penelitian Pasirhantap diantaranya adalah potensi pohon <i>Styrax benzoid</i> (kemenyan) yang berada di petak 14a yang sudah bisa berbuah sebanyak 28 pohon, di petak 47 sebanyak ± 20 pohon dengan diameter 15 cm dan tinggi 8 m tetapi belum bisa berbunga. 3. Terdapat penelitian rotan di petak 26,27 dan petak 28 dengan jenis rotan <i>Tohiti</i> dan rotan <i>Noco</i> sebanyak ± 75 pohon oleh peneliti ibu Diana 4. Melakukan inventarisasi pohon di petak 10,11,14 dan petak 15 5. Terkait status HP Pasir Hantap memang merupakan wilayah kerja dari BBTNGP yang terletak di Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi dan perlindungan <i>Styrax benzoid</i>/kemenyan <ol style="list-style-type: none"> a. Tetapkan ke dua petak sebagai zona konservasi spesies penting karena kemenyan mempunyai nilai ekologi dan ekonomis b. Lakukan perlindungan terhadap pohon induk dengan diameter besar sebagai sumber benih 2. Potensi budidaya dan Pengembangan Getah kemenyan <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi potensi budidaya terbatas jika terdapat regenerasi alami yang baik b. Penelitian pengembangan plot percobaan penyadapan getah

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>Jawa Barat dengan luasan 35 ha, yang terdiri dari 31 ha sebagai zona pemanfaatan hutan dan 4 ha sebagai zona air yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sekitar.</p> <p>6. Di HP Pasir Hantap terdapat beberapa plot, seperti plot rotan tohiti (<i>Calamus inops</i>), dan rotan noko (<i>Calamus zolingerii</i> atau <i>Daemonorops robusta</i>), sebanyak kurang lebih 275 pohon dipetak 26, 27 dan petak 28 dengan tinggi kurang lebih 1 meter dan kemeyan (<i>Styrax benzoin</i>) dipetak 14 sebanyak 29 pohon dan petak 47 sebanyak 17 pohon.</p> <p>7. Untuk plot-plot yang terdapat di HP Pasir Hantap akan dipetakan menggunakan sistem pemetaan digital guna mendukung pengelolaan data yang lebih akurat dan efisien.</p> <p>8. Kegiatan pengukuran batas kawasan HP Pasir Hantap dilakukan secara bersama-sama antara P2HB dengan BBTNGP guna memastikan kejelasan batas administratif dan sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>9. Pada prinsipnya pihak BBTNGP mendukung adanya kolaborasi pengelolaan kegiatan di HP Pasir Hantap, oleh karena itu akan disusun draf kerja sama terkait pengelolaan kegiatan di Kawasan HP Pasir Hantap.</p>	<p>c. Hindari penyadapan pada pohon yang masih muda untuk menjaga kelestarian</p> <p>3. Penelitian lanjutan Menjadikan petak 14 dan 47 sebagai plot permanen untuk studi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan dan produksi getah Respons terhadap kondisi tanah dan iklim mikro

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
12	HP Sobang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey lokasi panorama HP Sobang dengan view pulau umang pada plot kayu campuran pembersihan area sekitar panorama. 2. Survey Lokasi untuk penanaman murbai yaitu berada di area bekas persemaian, area di sekitar pinggiran sawah blok cipaseh dan area pinggir jalan raya 3. Pengelolaan sarpras dan perlengkapan lapangan: Rencana perbaikan mes HP Sobang yaitu perbaikan pagar, perbaikan jendela, dan instalasi air, Melengkapi perlengkapan lapangan diantaranya Sepatu booth sebanyak 2 pasang, meteran 100 m, cat kayu untuk penanda, Telah dilakukan pengecekan oleh pihak ke-3. Selanjutnya menunggu arahan pimpinan untuk di lakukan pengerjaan. 4. Terdapat bekas tebangan jenis kayu racuk (pulai, kecap, laban) di Lokasi HP Sobang yang di borongkan oleh Perhutani. Penebangan dilakukan awal 2024 bersamaan dengan penebangan kayu yang berada di pinggir jalan (jati dan mahoni) dengan tujuan agar tidak mengganggu jaringan listrik PLN. Jumlah kayu racuk yang di tebang belum diketahui. 5. Terdapat 2 tunggak bekas penebangan jenis kayu mahoni di plot tanaman vegetative merbau 6. Area sekitar pinggiran sawah kerap terjadi perluasan lahan garapan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian draft PKS antara PeFI dengan P2HB 2. Inventarisasi tegakan lanjutan 3. Identifikasi fauna lanjutan 4. Perbaikan werkeet 5. Pengukuran tegakan lanjutan, pemeliharaan persemaian murbai, penanaman bibit kayu dan penyelesain PKS

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>beberapa penggarap membersihkan semak belukar dan menteres/ memotong vegetasi yang menaungi tanaman padi. Beberapa area pinggiran sawah yang di bersihkan penggarap ditanami tanaman pisang, serai dan kencur.</p> <p>7. Terdapat satu pohon tumbang jenis khaya yang berada agak jauh dari jalan raya, tidak mengganggu lalu lintas. Pohon tumbang tahun 2021, masih tumbuh karena akar ada yang menancap ke tanah</p> <p>8. Penggarap di sekitar pinggir jalan menanam tanaman mpts berupa sirsak, pete, coklat, mangga, alpukat atas arahan pihak Perhutani setempat. Selain itu tanaman lainnya yang di tanam penggarap berupa serai, singkong dan pisang.</p> <p>9. Sejumlah nomor/kode pal batas luar Perhutani sudah mulai tidak jelas terlihat perlu pengecatan ulang.</p> <p>10. Pengecekan lokasi penggarap (eks kapolres) yang menanam jenis kayu mpts jenis durian, mangga, alpukat di blok cigeulis barat. Disesuaikan dengan peta Kawasan HP Sobang, Lokasi penggarap berada di luar kawasan HP Sobang.</p> <p>a. Tindak lanjut penanaman murbai. Telah dilaksanakan pembuatan persemaian murbai di HP Sobang pada dua Lokasi persemaian. jenis lembang 200 stek, catayana 300</p>	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>stek dan Mip02 500 stek, kemudian jenis x buah local setempat sebanyak 240 stek.</p> <p>b. Orientasi pembuatan arboretum. Telah dilakukan peninjauan lokasi pembuatan arboretum untuk penanaman bibit berbagai jenis kayu dari persemaian Komatsu. Rencana penanaman per family dari beberapa jenis kayu dan menggunakan border trees jenis hopea odorata.</p> <p>c. Pengambilan data analisis vegetasi. Analisis vegetasi dilakukan di beberapa plot tanaman litbang yaitu pada plot kayu campuran jenis khaya, meranti dan mahoni sebanyak 3 plot uji ukuran 20 x 20 m</p> <p>d. Tindak lanjut monev bersama Perhutani. Telah dilakukan pengecekan beberapa plot tanaman litbang terhadap luas HP Sobang yang akan di berikan oleh Perhutani pada PKS 2025.</p> <p>e. Pengumpulan serasah pohon aren di HP Sobang untuk pembuatan wood pellets skala labolatorium</p> <p>11.Penjajagan Kerja Sama dengan PT Globalindo Agro Lestari (GAL) terkait potensi pemanfaatan HP Sobang</p>	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>untuk program CSR.yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan ulat sutera dan pengembangan rusa. b. Pengukuran Kawasan oleh Perhutani c. Identifikasi Plot Litbang d. Potensi Pengembangan Wisata Cileutik e. Kondisi Jalan Dalam Kawasan perlu peningkatan struktur (beton, macadam, atau material lokal). Jalan berfungsi untuk monitoring demplot, akses petani, pemungut HHBK, dan wisata edukasi. f. Sarana & Prasarana di kawasan perlu pembangunan field shelter/ pondok kerja untuk operasional lapangan. g. Rencana Teknis Penanaman Aren diokasi: Petak 13A (1 ha), jarak tanam 6×6 m. h. Penanaman Bambu Betung akan di tanam di lokasi tepi sawah Blok Cigeulis. 	
13	HP Cikole	<p>Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Desa Cikole, Kec. Lembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi HP Cikole relatif aman dan terkendali sebagai kawasan hutan lindung, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikole, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH Bandung Utara. 	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Area HP Cikole yang berada di Lokasi Wana Wisata Cluster Cikole - Jayagiri, dapat dioptimalkan sebagai tempat wisata ilmiah untuk aktivitas penelitian dan pengembangan hutan yang dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat. 3. Berdasarkan data dari Desa Cikole, kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, jumlah penduduk Desa Cikole tahun 2025 meliputi 14.470 orang yang tergabung dalam 4.128 KK. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok sebanyak 5.192 orang, 4.292 orang (82,67%) diantaranya bekerja di sektor pertanian dan sebanyak 900 orang (17,33%) berprofesi sebagai buruh Swasta, PNS, Montir dan Ahli Pengobatan Alternatif. Pengecekan pal batas HP Cikole 4. Luas area HP Cikole 39.80 ha berada di Bagian Hutan Gunung Sanggarah, Kelompok Hutan Gunung Tangkuban Parahu, RPH Cikole, BKPH Lembang, KPH Bandung Utara. Inventarisasi pohon di HP Cikole 5. Membuat plot persegi ukuran (20mx20m), mengukur diameter (dbh) dan menghitung jumlah pohon 	
14	HP Dramaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan kegiatan bulanan dan perekapan data pengunjung. 2. Pembersihan dan merapikan pohon tumbang. 3. Pembersihan sampah di Jalan Raya CIFOR (rutinitas setiap hari Senin). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan data inventarisasi hutan. 2. Patroli dan sosialisasi rutin penanganan pembuangan sampah ilegal.

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan kegiatan Peneliti PREE BRIN (a.n. Indriani Ekasari) tentang “Konservasi Suku Dipterocarpa melalui Seed Rain dan Metode Penyimpanan”. 5. Pembabatan jalur antar petak tegakan (di petak 74, 75, 76, 77, 78, 85, 87 dan 88). 6. Patroli rutin pengamanan kawasan. 7. Pemeriksaan pal batas (patok nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 dan 27 dalam kondisi baik; patok nomor 22 dalam kondisi rusak ringan (nomor pudar); patok nomor 28 dalam kondisi rusak berat (roboh). 8. Inventarisasi flora dan pengukuran pohon di petak 2 dan 3. 9. Inventarisasi fauna, yaitu burung cerukcuk (di petak 208; jumlah 7 ekor), burung kutilang (di petak 206; jumlah 5 ekor), burung tekukur (di petak 4; jumlah 6 ekor), ular hijau (di petak 20; jumlah 1 ekor), biawak (di petak 24 dan 187; jumlah 2 ekor), tupai (di petak 6, 48 dan 65; jumlah 5 ekor), dan musang (158 dan 221; jumlah 1 ekor). 10. Inventarisasi jasa lingkungan, yaitu mata air di petak 139b (digunakan masyarakat), 183 (digunakan masyarakat), 232, 225 dan 226. 11. Pengamatan tegakan sumber benih <i>Rubroshorea balangeran</i> (Bunga Kuncup), <i>Rubroshorea leprosula</i> (Bunga Kuncup), <i>Pterygota alata</i> (Buah Jatuh), <i>Calophyllum tomentosum</i> (Buah Jatuh), <i>Dipterocarpus retusus</i> (Bunga 	

NO	KHDTK-HP	HASIL	REKOMENDASI
		<p>J Kuncup dan Buah Jatuh), Azadirachta excelsa (Bunga Kuncup dan Buah Jatuh), Hopea odorata (Bunga Kuncup dan Khaya anotheca (Bunga Mekar).</p> <p>12. Penanganan pohon tumbang, yaitu Palaquium obtusifolium (di petak 73; jumlah 1 pohon), Terminalia superba (di petak 73; jumlah 1 pohon), Rubroshorea platyclados (di petak 76; jumlah 1 pohon), Dipterocarpus retusus (di petak 28; jumlah 1 pohon).</p> <p>13. Pelayanan kunjungan tamu ke HP Dramaga, yaitu Sekolah Vokasi Ekowisata IPB (magang), SMKN 1 Bogor (tugas sekolah pembuatan film), SMK Baranangsiang Bogor (camping Pramuka), PT. Silva Agro Indonesia (praktik ukur carbon), SMP BOASH Bogor (pembuatan buku tahunan), SD Cendikia (outbound), PREE BRIN (penelitian).</p>	

Lampiran 3

Kegiatan Uji Banding Laboratorium Tahun 2025

Bahan / produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode	Laboratorium Rekanan Uji Banding	Hasil Uji Banding
Kayu	Identifikasi Kayu (struktur anatomi mikroskopis)	IKAMULA Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> IPB University UNHAS 	Tidak berbeda nyata
Kayu	Kelarutan dalam air dingin	SNI 1305:2021	BBSPJIS	Tidak berbeda nyata
	Kelarutan dalam air panas	SNI 1305:2021	BBSPJIS	Tidak berbeda nyata
	Kelarutan dalam alkohol-benzena (ekstraktif)	SNI 8401:2017	BBSPJIS	Tidak berbeda nyata
	Kelarutan dalam NaOH 1%	SNI 1838:2021	BBSPJIS	Tidak berbeda nyata
Arang Aktif	Bagian yang hilang pada pemanasan 950 oC	SNI 06-3730-1995	<ul style="list-style-type: none"> PT. MAS PT. Beckjorindo 	Tidak berbeda nyata
	Kadar air	SNI 06-3730-1995	<ul style="list-style-type: none"> PT. MAS PT. Beckjorindo 	Tidak berbeda nyata
	Kadar abu	SNI 06-3730-1995	<ul style="list-style-type: none"> PT. MAS PT. Beckjorindo 	Tidak berbeda nyata
	Kadar karbon terikat	SNI 06-3730-1995	<ul style="list-style-type: none"> PT. MAS PT. Beckjorindo 	Tidak berbeda nyata

Lampiran 4

Daftar Rekomendasi Kebijakan Kegiatan P2HB

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan			
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi		
1	2	3	4	5			
1					6		
1	Perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan	Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan	1	Rekomendasi	a. Policy Brief “Tata Kelola Penyediaan Bahan Baku Berkelanjutan untuk Hilirisasi Getah Pinus	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan	
				Prosiding	b. Prosiding FGD Tata Kelola Pinus dan Getah Pinus Indonesia		
		2	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)		Rekomendasi	a. Policy Paper “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)”	Rekomendasi revisi/ pembaruan kebijakan pengelolaan PUP PBPH SK. 237 tahun 1995 tentang Pemantauan pertumbuhan dan riap tegakan hutan
						b. Policy Brief “Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)” pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)”	
					Prosiding	c. Prosiding FGD Urgensi dan Relevansi PUP dalam Evaluasi Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5		
					6	
				d. Prosiding FGD Urgensi dan Reviu Kebijakan (PUP) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Propinsi Kalimantan Timur		
				e. Prosiding FGD Urgensi dan Reviu Kebijakan PUP pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Propinsi Riau		
				f. Prosiding FGD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)		
		Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH)	3	Rekomendasi	a. Policy Brief “Pengembangan Hub Pengetahuan dan Kerja Sama Kehutanan sebagai Fondasi Kebijakan Berbasis Bukti”	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Jembatan/Hub Pengetahuan dan Kerjasama
				Prosiding	b. Prosiding Penguatan Jejaring Kerja dalam Mendukung Pembangunan Platform Technical Knowledge Management Hub Kehutanan	

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5		6
					c. Prosiding Penguatan Jejaring Kerja dalam Mendukung Pembangunan Platform Technical Knowledge Management Hub Kehutanan	
					d. Platform TKMH Kehutanan	
		Kajian tentang Kewajiban Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor Fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan.	4	Rekomendasi	a. Policy Paper “ Analisis Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara”	Rekomendasi Kebijakan Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara
					b. Policy Brief “Anali- sis Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara”	
				Prosiding	c. PROSIDING “Kes- esuaian Nama Dagang dan Nama Ilmiah pada Tata Kelola Hasil Hutan dalam Perspektif Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”	
2	Fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan	Profilling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu	5	Rekomendasi	a. Policy Brief “Optimal- isasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak”	Rekomendasi kebijakan Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5		
					6	
				Prosiding	b. Prosiding "Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak"	
		Keanekaragaman Sumber Pangan Hutan : Studi Awal di KHDTK Carita	6	Rekomendasi	a. Policy Brief "Penguatan Peran Pangan Hutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Keanekaragaman Hayati Studi Awal di KHDTK Carita, Provinsi Banten"	1. Rekomendasi kebijakan Penguatan basis data pangan hutan 2. Rekomendasi Kebijakan Integrasi pangan hutan dalam pengelolaan hutan multifungsi 3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan pengetahuan lokal dan transfer pengetahuan 4. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk pangan hutan
				Prosiding	b. Prosiding FGD pengembangan studi pangan hutan	
					c. Prosiding FGD validasi hasil studi pangan hutan	

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5		6
		Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP)	7	Rekomendasi	<p>a. Policy Brief "Pengembangan Aren (Arenga pinnata) di Hutan Penelitian Sobang Penguatan Energi Terbarukan, Multiusaha Kehutanan, dan Ekonomi Masyarakat"</p> <p>b. Policy Paper "Penanaman Aren (Arenga pinnata) di Hutan Penelitian Sobang Integrasi Perbenihan Tanaman Hutan, Energi Terbarukan, dan Pemberdayaan Masyarakat"</p>	Rekomendasi Kebijakan : 1. Menetapkan HP Sobang sebagai lokasi percontohan pengembangan aren berbasis hutan penelitian. 2. Memperkuat integrasi antara BPTH, lembaga riset, dan industri energi dalam satu rantai nilai aren. 3. Mendorong skema kemitraan inklusif antara pengelola hutan, masyarakat lokal, dan BUMN energi. 4. Mengembangkan hilirisasi produk HHBK aren, khususnya gula aren dan turunannya, sebagai penyangga ekonomi sebelum fase bioenergi.
				Prosiding	<p>c. Prosiding Pelatihan Aplikasi Konsep Climate, Biodiversity, Socio-Culture, And Economic Concept (CBSC) untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>d. Prosiding Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kawasan</p>	

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5	6	
					<p>e. Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Expose Tahunan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP) Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan</p> <p>f. Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Rencana Aksi Pengelolaan KHDTK Benakat Berkelanjutan : Rehabilitasi Hutan Benakat Berbasis Green Koridor (Gajah dan Harimau) bersama Masyarakat</p>	
		Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan	8	Rekomendasi	<p>a. Policy Brief “Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi khusus mengenai laboratorium kehutanan 2. Efisiensi layanan dan pengelolaan 3. Modernisasi peralatan dan sistem manajemen laboratorium, 4. Penguatan sistem mutu (akreditasi), 5. Jejaring dan kolaborasi lintas sektor (shared facility, riset kolaboratif)

No	Bidang	Kegiatan	No	Hasil Kegiatan		
				Output Kegiatan	Hasil Rekomendasi	
1	2	3	4	5		6
						6. Integrasi dalam rantai nilai kehutanan, pusat rujukan nasional 7. Branding layanan laboratorium unggulan
				Prosiding	b. Prosiding Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Laboratorium Kehutanan Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	
					c. Prosiding Expose Tahunan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	

Lampiran 5

DAFTAR KERJASAMA TKMH-BRIN

NO.	NAMA MITRA BRIN	JUDUL PKS/KAK	NOMOR	TANGGAL
1.	FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, IPB	PENGELOLAAN PENGETAHUAN BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN	NOMOR : PKS.03/P2HB/PFPHB/KLN.03.03/B/07/2025 NOMOR : 59/IT3.F4/HK.07.00/2025	25 <u>JULI</u> 2025
2.	FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN, UNB	PENGELOLAAN PENGETAHUAN BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN	NOMOR : PKS.04/P2HB/PFPHB/KLN.03.03/B/07/2025 NOMOR : 265/DEK.HUT/LNB/F/VIII/2025	27 <u>AGUSTUS</u> 2025
3.	PT MUTUAGUNG LESTARI	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN HUTAN BERKELANJUTAN BERBASIS INSTRUMEN PENILAIAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	NOMOR : PKS.05/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/09/2025 NOMOR : 0509.3/MUTU/SPK/IX/2025	4 SEPTEMBER 2025
4	DIREKTORAT KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP, KEMARITIMAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN KETENACANUKLIRAN	PENGELOLAAN PENGETAHUAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN BERKELANJUTAN	NOMOR KAK: 06/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/09/2025 NOMOR KAK: 188/IV/KS/09/2025	11 SEPTEMBER 2025
			NOMOR PKS: 06/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/09/2025 NOMOR PKS: 188/IV/KS/09/2025	12 SEPTEMBER 2025
5.	PUSAT RISET EKOLOGI, BRIN	STUDI, RISET DAN INOVASI EKOLOGI HUTAN TROPIS UNTUK Mendukung Pengembangan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan	Nomor 482/V/KS/11/2025 Nomor 07/P2HB/PFPHB/REN.01.10/11/2025	3 NOVEMBER 2025

NO.	NAMA MITRA BRIN	JUDUL PKS/KAK	NOMOR	TANGGAL
6.	PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN, BRIN	RISET DAN PENGEBANGAN BIOPROSPEKSI MIKROBIOMA HUTAN UNTUK Mendukung Pengembangan Pengetahuan Bidang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NOMOR KAK : 513/V/KS/11/2025 NOMOR KAK : 08/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/11/2025	12 NOVEMBER 2025
			NOMOR PKS : 513/V/KS/11/2025 NOMOR PKS: 08/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/11/2025	12 NOVEMBER 2025
7.	DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH	KOLABRASI DALAM PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PENGEMBANGAN TECHNICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT HUB KEHUTANAN UNTUK HUTAN BERKELANJUTAN	NOMOR KAK : 259/IV/KS/11/2025 NOMOR KAK : 09/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/11/2025	14 NOVEMBER 2025
			NOMOR PKS : 259/IV/KS/11/2025 NOMOR PKS : 09/P2HB/PFPHB/REN.01.10/B/11/2025	14 NOVEMBER 2025
8.	PUSAT RISET BIOMASSA DAN BIOPRODUK	PENGELOLAAN PENGETAHUAN TERUTAMA TERKAIT DENGAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU <u>Progres :</u> Konsep PKS sudah dibahas oleh kedua belah pihak dan saat ini sedang dalam proses review di tim kerja sama PRBB.	PROSES PEMBAHASAN PKS	

NO.	NAMA MITRA BRIN	JUDUL PKS/KAK	NOMOR	TANGGAL
9.	PUSAT RISET BIOSISTEMATIKA DAN EVOLUSI	PENGELOLAAN PENGETAHUAN TERUTAMA TERKAIT DENGAN KEANEKARAGAMAN DAN PEMANFAATAN HAYATI Progres : Konsep PKS sudah dibahas oleh kedua belah pihak dan saat ini sedang dalam proses review di BHKS BRIN.	PROSES PEMBAHASAN PKS	
10.	PUSAT RISET <u>ZOOLOGI</u> TERAPAN	PENGELOLAAN PENGETAHUAN TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELESTARIAN DAN KONSERVASI FAUNA SERTA PEMANFAATAN DAN PENDUKUNG PRODUKSI FAUNA Progres : Konsep PKS sudah dibahas oleh kedua belah pihak dan saat ini sedang dalam proses review di BHKS BRIN	PROSES PEMBAHASAN PKS	
11.	PUSAT RISET BIOLOGI TERAPAN	Masih <u>penjajagan</u> PKS		
12.	FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, IPB	Masih <u>penjajagan</u> PKS Progres : Konsep PKS sudah disampaikan ke pihak mitra.		

Lampiran 6

Daftar Lembaga Mitra P2HB Tahun 2025

No.	Lembaga (1 - 69)	No.	Lembaga (70- 142)
1	Fak. Kehutanan (IPB)	70	Kodim 0606 Bogor
2	Departemen Kimia, UI	71	Dinas UPTD Bogor
3	Fak. MIPA (IPB)	72	KRPH Tali Alas
4	Univ. Pakuan	73	KPH Banten
5	Vokasi Ekowisata (IPB)	74	BKPH Jasinga-Leuwiliang
6	Inst. Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	75	BPTH Wilayah 3 Yogyakarta
7	Fak. Kehutanan & Lingkungan (UNB)	76	Dit. IPSDH Ditjen Planologi
8	Univ. Mataram	77	Kemen PUPR
9	Fak. Kehutanan (ITB)	78	Kehutanan Prov Jabar
10	Univ. Pertamina	79	Pemdes Bantar Karet
11	Universitas Andalas	80	Polsek Leuwiliang
12	Univ. Tadulako Sulsel	81	Pemerintah Desa Pabangbon
13	Universitas Negeri Medan	82	Pemerintah Kec. Leuwiliang
14	Univ. Singaperbangsa Karawang	83	Pol PP
15	Univ. Al-Ghifari	84	Asper Jasinga Leuwiliang
16	Univ. Al-Ghifari (Entitas 2)	85	YKIP (Yayasan Komatsu Indonesia)
17	Teknik Material ITB	86	BKPH Sobang
18	Univ. Negeri Semarang	87	Dir. Penindakan Pidana Kehutanan
19	Univ. Riau	88	Dir. Global Profesi Lingkungan
20	Universitas Pattimura	89	Kasie Pol PP Bogor Barat

No.	Lembaga (1 - 69)	No.	Lembaga (70- 142)
21	Poltek Kelapa Sawit CWE	90	Kodim 0606 Bogor
22	Universitas Hasanuddin	91	Yonif 315 Kostrad
23	Inst. Teknologi Sumatera (ITERA)	92	Pusdik Zeni Tempur
24	Univ. Siliwangi (Kampus 2)	93	Kementerian Kehutanan (Menteri)
25	Universitas Jember	94	Divisi Infanteri Kostrad Cibinong
26	Univ. Darma Persada	95	Kebun Raya Balikpapan
27	UPN Veteran Yogyakarta	96	Kecamatan Samboja Barat
28	Univ. Negeri Makassar	97	Kelurahan Situ Gede
29	ITB (Lab MFM-Teknik Fisika)	98	PT <u>Mutu Agung</u> Lestari
30	Polbangtan Bogor	99	PT Cedar Karyatama
31	SMAN 2 Kota Serang	100	PT Silva Agro Indonesia
32	MAN 1 Bogor	101	Organisasi NGO / LSM
33	SMAIT Insantama	102	IPB SSRS Association
34	S1 FMIPA Biologi IPB	103	BEM (Univ. Nusa Bangsa)
35	Pegiat Alam SMAN 5 Bogor	104	Organisasi Koala
36	MTs Nurohmah Taufiq	105	G-Land Valley Padalarang
37	SMA PGRI Ciambar	106	Yayasan Darul Haziti
38	MI Cikampek-Karawang	107	Yayasan Bina Insan Taqwa
39	Fak. Ekologi Manusia (IPB)	108	PH Sumber Kreasi
40	SMP BOASH	109	PT Mahardika Aurora Sinergi
41	SMK Kehutanan	110	Jambore Pramuka Kab. Bogor
42	SMK Bakti Rimba	111	Tanjung Pandan, Bangka Belitung

No.	Lembaga (1 - 69)	No.	Lembaga (70- 142)
43	SMK Bakti Rimbawan	112	MD Production House
44	SMK Bakti Nusa	113	PT Wijaya Sentosa
45	Sekolah Alam Cendekia	114	Sharp Generator
46	Sekolah Alam Balikpapan	115	PT Pertamina EP Zona 7
47	Sekolah Vokasi IPB	116	CV Kharisma Duta Utama
48	PH MD Jakarta	117	CV Xoso
49	SDIT Insantama	118	PT Leef Esens Flora
50	MTS Bogor	119	PT Aaleen Chemical Indonesia
51	MTS Tunas Bangsa	120	PT Pyrotek Indonesia
52	SMAN 5 Kota Bogor	121	PT Surono Ady Mulya
53	SMKN 1 Kota Bogor	122	PT Cipta Bening Berdikari
54	SMK Baranangsiang Bogor	123	PT Pertamina EP Regional 2
55	Politeknik Negeri Samarinda	124	PT Taru Sakti Utama
56	Pusat Riset Ekologi (BRIN)	125	PT Beckjorindo Paryaweksana
57	Riset Hayati & Lingkungan (BRIN)	126	PT Aneka Hasil Usaha
58	Pusat Mikrobiologi Terapan (BRIN)	127	PT Mutuagung Lestari Tbk
59	Pusat Riset Biologi Terapan	128	Konsorsium PT Aintopindo
60	PR Biomassa & Bioproduk (BRIN)	129	PH Falcon Jakarta
61	Dir. Pengelolaan Koleksi Ilmiah (BRIN)	130	PT Cedar Lestarindo
62	Pusat Biosistematika & Evolusi (BRIN)	131	Silat Tunggal Hati Maria
63	Pusat Riset <u>Zoologi</u> Terapan	132	Pokdarwis Situ Gede
64	Pusdiklathut	133	PT Sejarah Alam

No.	Lembaga (1 - 69)	No.	Lembaga (70- 142)
65	Dir. Kebijakan SDA & Nuklir (BRIN)	134	PT KMSI
66	PR Ekologi & Etnobiologi (BRIN)	135	FPLI
67	Balai Pelestarian Kebudayaan XIX	136	LINMAS
68	<u>BBSPJ</u> Industri Selulosa	137	ITTO - Yokohama
69	BBSPJ Industri	138	Yayasan Jejak Pulang
		139	OIKN Polda Kaltim
		140	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
		141	Forum Pohon Langka Indonesia
		142	FKPDAS

Lampiran 7

Inisiasi kerja sama dengan mitra yang masih dalam proses

NO	Mitra	Progress
1	Yayasan Jejak Pulang	Konsep PKS sudah dibahas oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 November 2025. Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan untuk finalisasi.
2	OIKN Polda Kaltim	Konsep PKS sudah difinalisasi. Saat ini sedang menunggu jadwal penandatanganan PKS.
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Konsep PKS telah disusun dan akan segera dilakukan pembahasan dengan mitra.
4	Forum Pohon Langka Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Audiensi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025• Konsep PKS telah disusun dan akan segera dilakukan pembahasan dengan mitra
5	FKPDAS	<ul style="list-style-type: none">• Audiensi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025.• Konsep PKS sudah direview oleh bidang 2 P2HB.

Lampiran 8

Rincian perhitungan IKK Instrumen Pengukuran Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis P2HB Tahun 2025, terdapat pada link :

Penilaian IKK P2HB_2025.xlsx - Google Spreadsheet :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l94QtrCLF2AOg5fgw9_M4dBxS9hWDWL/edit?gid=637895927#gid=637895927



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN**

Jl. Gunung Batu No.5, Bogor, Jawa Barat 16610

Telp. (0251) 8633378

Email: pusphb@kehutanan.go.id